



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TANAH BUMBU

INDIKATOR MAKRO EKONOMI

KABUPATEN **TANAH BUMBU**



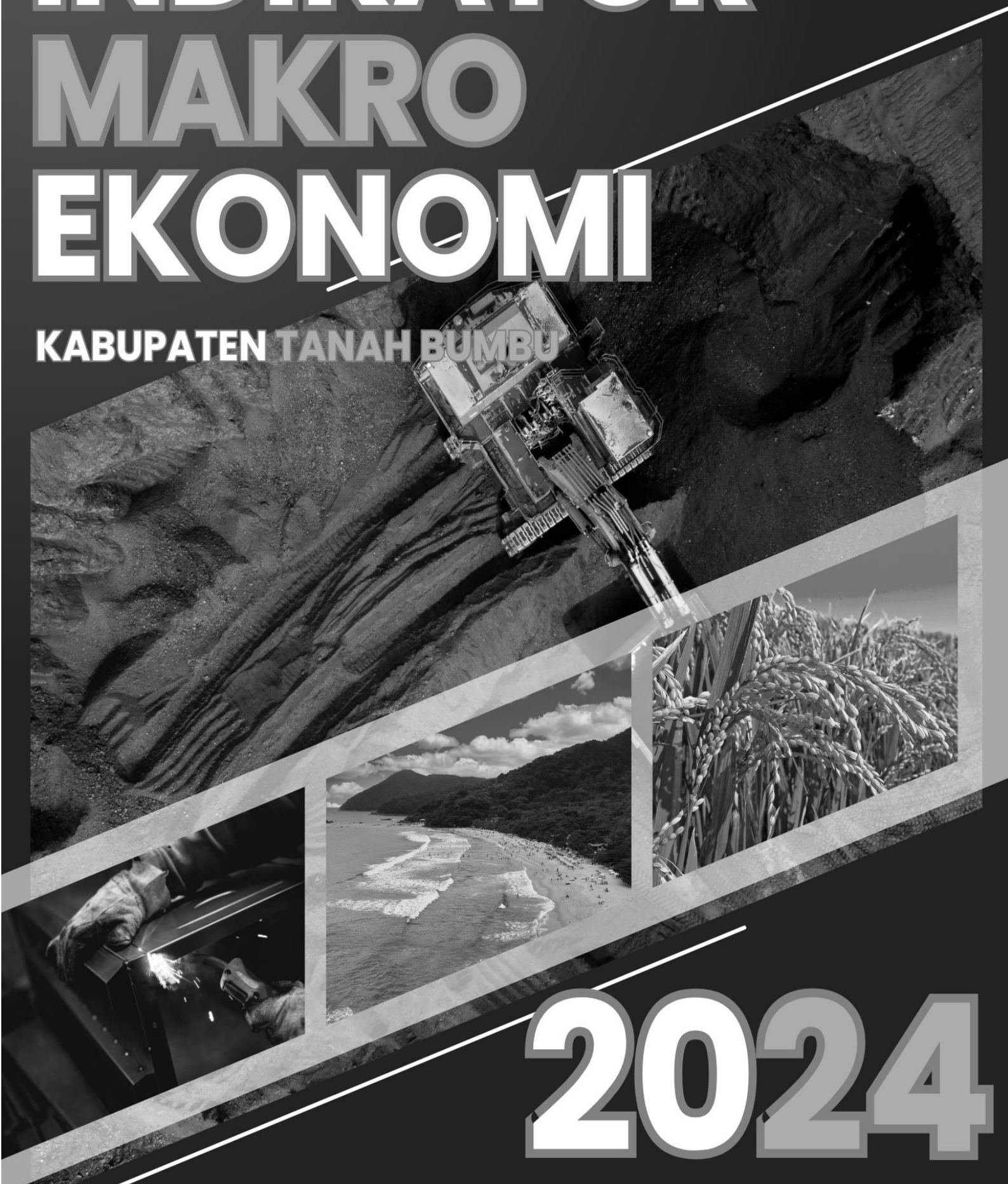
2024



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN TANAH BUMBU

INDIKATOR MAKRO EKONOMI

KABUPATEN TANAH BUMBU



2024



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam bentuk kelancaran dan kemudahan pada proses penyusunan publikasi “Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024” sehingga dapat diselesaikan dan diterbitkan dengan baik.

Publikasi ini diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tanah Bumbu dan merupakan kelanjutan dari publikasi pada tahun sebelumnya. Publikasi ini disusun untuk menambah dan melengkapi referensi mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu yang telah tersedia sebelumnya. Gambaran kondisi perekonomian makro Kabupaten Tanah Bumbu dipaparkan secara komprehensif disertai dengan data pendukung seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan.

Besar harapan dengan adanya publikasi ini dapat memberikan manfaat untuk keperluan penelitian, evaluasi, dan perencanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Bagi pemangku kebijakan khususnya, semoga dapat dijadikan bahan masukan sehingga perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat disusun dengan melihat potensi yang dimiliki.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam buku ini masih terdapat sejumlah kekurangan dan keterbatasan. Kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan untuk penyempurnaan publikasi yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungannya diucapkan terima kasih.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	17
1.1. INKLUSIVITAS PEMBANGUNAN EKONOMI.....	17
1.2. KEBUTUHAN DATA DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	18
1.3. MANFAAT POTRET PEMBANGUNAN EKONOMI	20
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	21
BAB II SUMBER DAYA MANUSIA	
KABUPATEN TANAH BUMBU	25
2.1. PENDUDUK	26
2.1.1 JUMLAH PENDUDUK DAN RASIO JENIS KELAMIN	26
2.1.2 TINGKAT PENDIDIKAN	28
2.1.3 TINGKAT KESEHATAN	31
2.2. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	37
2.2.1 PENJELASAN UMUM INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	37
2.2.2 DIMENSI KESEHATAN	41
2.2.3 DIMENSI PENDIDIKAN	44
2.2.4 DIMENSI STANDAR HIDUP LAYAK	50
2.3. INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG).....	53
2.3.1 PENJELASAN UMUM INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	53
2.3.2 DIMENSI PEMBENTUK INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	56

A.	Keterlibatan Perempuan di Parlemen.....	56
B.	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional.....	57
C.	Sumbangan Pendapatan Perempuan	57
2.4.	INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG).....	60
2.4.1	PENJELASAN UMUM INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)	60
2.4.2	DIMENSI PEMBENTUK INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG).....	61
A.	Dimensi Kesehatan Reproduksi	63
B.	Dimensi Pemberdayaan	64
C.	Dimensi Pasar Tenaga Kerja.....	67
 BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN		
KABUPATEN TANAH BUMBU		71
3.1	PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STRUKTUR PEREKONOMIAN MENURUT KATEGORI.....	71
3.1.1	PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT KATEGORI.....	71
3.1.2	STRUKTUR EKONOMI MENURUT KATEGORI.....	74
A.	Kategori Pertambangan dan Penggalian.....	74
B.	Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.....	78
C.	Kategori Industri Pengolahan.....	82
3.2.	PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STRUKTUR PEREKONOMIAN MENURUT PENGELUARAN.....	86
3.2.1	PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGELUARAN.....	88
3.2.2	STRUKTUR EKONOMI MENURUT PENGELUARAN.....	90
A.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.....	90
B.	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	94
C.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.....	97
D.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR).....	100

E.	Ekspor dan Impor	103
F.	Perubahan Inventori	105
3.3	INFLASI.....	107
3.3.1	INFLASI JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG	108
3.3.2	INFLASI DAN INDEKS HARGA KONSUMEN	110
3.3.3	PENGENDALIAN INFLASI KABUPATEN TANAH BUMBU.....	113
BAB IV KETENAGAKERJAAN		119
4.1.	ANGKATAN KERJA SEBAGAI PENGGERAK PEMBANGUNAN.....	120
4.2.	LAPANGAN USAHA DOMINAN PASAR TENAGA KERJA	129
4.3.	PENGANGGURAN	135
4.4	PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK PERTUMBUHAN DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA.....	139
4.5.	TINGKAT KESEMPATAN KERJA	141
BAB V KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN		145
5.1.	PENGENTASAN KEMISKINAN SEBAGAI SASARAN PEMBANGUNAN	145
5.2.	MENGUKUR KEMISKINAN	147
5.3.	PERKEMBANGAN KEMISKINAN TANAH BUMBU.....	150
5.4.	PENGELUARAN PER KAPITA	157
5.5	MENGUKUR KETIMPANGAN	163
BAB VI PARIWISATA		171
6.1	TINGKAT PENGHUNI KAMAR.....	172
6.2	PERKEMBANGAN PENUMPANG ANGKUTAN UDARA.....	173
6.3	PERKEMBANGAN ANGKUTAN LAUT	174
BAB VII ANALISIS POTENSI		
SEKTORAL.....		179
7.1	ANALISIS LOCATION QUOTIENT (LQ).....	179
7.2	ANALISIS SEKTORAL TIPOLOGI KLASEN	189
7.3	ANALISIS MRP	194

BAB VIII KESIMPULAN	200
8.1 KETERKAITAN INDIKATOR MAKROEKONOMI (PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN, DAN INFLASI)	200
8.2. KESIMPULAN	201
8.3. REKOMENDASI KEBIJAKAN.....	205

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (ribu jiwa), dan rasio Jenis Kelamin Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020-2023.....	26
Tabel 2. 2	Angka partisipasi sekolah (APS) dan angka partisipasi murni (APM) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023	29
Tabel 2. 3	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, 2023	34
Tabel 2. 4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2022-2023	39
Tabel 2. 5	Perkembangan Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tanah Bumbu, 2019-2023	62
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Tanah Bumbu Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019 – 2023.....	73
Tabel 3.2	Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten Tanah Bumbu (Persen), 2019-2023	84
Tabel 3.3	Tabel 3.3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanah Bumbu ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Persen).....	88
Tabel 3.4	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023.....	93
Tabel 3.5	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023	101
Tabel 3.6	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023.....	102
Tabel 4. 1	Persentase Penduduk Tanah Bumbu Berusia 15+ Tahun Menurut Kegiatan Utama Tahun 2023.....	122

Tabel 4. 2	Distribusi Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan menurut Status Angkatan Kerja Tahun 2023	123
Tabel 4. 3	Penduduk Usia 15-24 tahun yang tidak bekerja, tidak sedang sekolah, and tidak sedang mengikuti pelatihan (Not in employment, education, and training/NEET) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2023	128
Tabel 4. 4	Persentase Penduduk Bekerja dan Kontribusi terhadap PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 dan 2023 Kabupaten Tanah Bumbu.....	136
Tabel 4. 5	Pekerja yang Menggunakan Internet atau Tidak dalam Pekerjaan Utama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023.....	140
Tabel 4.6	Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2023.....	141
Tabel 5.1	Perkembangan Kondisi Kemiskinan Kabupaten Tanah Bumbu 2019-2023	151
Tabel 7.1	Nilai LQ Lapangan Usaha Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023	180
Tabel 7.2	Hasil Analisis LQ dan DLQ Lapangan Usaha Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023	186
Tabel 7.3	Klasifikasi Tipologi Klasen	190
Tabel 7.4	Klasifikasi Sektoral Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022.....	191
Tabel 7.5	Klasifikasi Sektoral Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023	192



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Persentase Penduduk Berumur 0-59 Bulan (Balita) yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap, 2019-2023.....	33
Gambar 2. 2	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru, 2021-2023	38
Gambar 2. 3	Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu, 2021-2023	42
Gambar 2. 4	Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota dan Provinsi di Kalimantan Selatan, 2023	43
Gambar 2. 5	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tanah Bumbu, 2021-2023	45
Gambar 2. 6	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Kalimantan Selatan, 2023	46
Gambar 2. 7	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tanah Bumbu, 2021-2023	47
Gambar 2. 8	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Kalimantan Selatan, 2023	48
Gambar 2. 9	Perkembangan Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan Kabupaten Tanah Bumbu, 2021-2023 (Ribu rupiah/orang/tahun).....	51
Gambar 2. 10	Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten/Kota dan Provinsi di Kalimantan Selatan, 2023	52
Gambar 2. 11	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2019-2023	54
Gambar 2. 12	Perkembangan Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen 2019-2023	56
Gambar 2. 13	Perkembangan Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi 2019-2023	57

Gambar 2. 14	Perkembangan Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan 2019-2023	59
Gambar 2. 15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tanah Bumbu, 2019-2023	61
Gambar 2. 16	Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi, 2019-2023.....	63
Gambar 2. 17	Persentase Anggota Legislatif Laki-laki dan Perempuan, 2019-2023.....	65
Gambar 2. 18	Persentase Laki-laki dan Perempuan dengan Pendidikan SMA ke Atas, 2019-2023.....	66
Gambar 2. 19	Tingkat Partisipasi Angkatan (TPAK) laki-laki dan Perempuan (persen), 2019-2023.....	67
Gambar 3. 1	Perkembangan PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023	72
Gambar 3. 2	Perkembangan PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023	75
Gambar 3. 3	Perkembangan Harga Komoditas Batu Bara Tahun 2019-2023 (US\$/MT)	77
Gambar 3. 4	Perkembangan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023	79
Gambar 3. 5	Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Tanah Bumbu (Persen), 2019-2023	80
Gambar 3. 6	Persentase Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian (Persen) Tahun 2023.....	81
Gambar 3. 7	Perkembangan PDRB Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023	83
Gambar 3. 8	Nilai Konsumsi dan Proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2019-2023.....	90

Gambar 3. 9	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 dan 2023	92
Gambar 3. 10	Pertumbuhan Pengeluaran Akhir Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023	94
Gambar 3. 11	Perkembangan Pengeluaran Akhir LNPRT Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023.....	95
Gambar 3. 12	Pertumbuhan Pengeluaran Akhir LNPRT Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023.....	96
Gambar 3. 13	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023	98
Gambar 3. 14	Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Tahun 2019-2023	99
Gambar 3. 15	Perkembangan ICOR Kabupaten Tanah Bumbu 2019-2023.....	103
Gambar 3. 16	Perkembangan dan Struktur Ekspor Impor Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023.....	104
Gambar 3. 17	Inflasi Kabupaten Kotabaru per Bulan (Persen) Tahun 2022-2023.....	111
Gambar 3. 18	Laju Inflasi (year on year) Kabupaten Kotabaru Menurut Paket Komoditas, Tahun 2022-2023 (2018=100)	112
Gambar 3. 19	Produksi Padi Sawah Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2019-2023	115
Gambar 4.1	Perkembangan TPAK Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012-2023.....	125
Gambar 4.2	Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Persen)	126
Gambar 4.3	Angkatan Kerja menurut Pelatihan yang Bersertifikat Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Persen)	127
Gambar 4.4	Angkatan Kerja menurut Usia di Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Persen).....	128
Gambar 4.5	Angkatan Kerja di Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan menurut Migrasi Risen Tahun 2023.....	130

Gambar 4.6	Angkatan Kerja di Kabupaten Tanah Bumbu menurut Migrasi Seumur Hidup Tahun 2023	131
Gambar 4.7	Perkembangan TPT Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012-2023	132
Gambar 4.8	TPT Kabupaten Tanah Bumbu menurut Pola Migrasi Tahun 2023 (persen).....	133
Gambar 4.9	Pengangguran di Kabupaten Tanah Bumbu menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023 (persen).....	135
Gambar 4.10	Persentase Penduduk Bekerja dan Kontribusi terhadap PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 dan 2023 Kabupaten Tanah Bumbu.....	137
Gambar 4.11	Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Formal dan Informal dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.....	138
Gambar 4.12	Persentase Angkatan Kerja menurut Keterampilan Bersertifikat yang Dimiliki di Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.....	139
Gambar 5.1	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2019-2023	154
Gambar 5.2	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2019-2023	156
Gambar 5.3	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2019-2023	159
Gambar 5.4	Persentase Pengeluaran Penduduk menurut Kelompok Makanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023	160
Gambar 5.5	Persentase Pengeluaran Penduduk menurut Kelompok Non Makanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023	162
Gambar 5.6	Kurva Gini Ratio.....	164
Gambar 5.7	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023	166

Gambar 6.1	Tingkat penghunian kamar hotel (TPK) , 2019-2023	172
Gambar 6.2	Perkembangan jumlah penumpang angkutan udara, 2019-2023.....	173
Gambar 6.3	Perkembangan jumlah penumpang Angkutan Laut, 2019-2023	174
Gambar 6.3	Perkembangan jumlah penumpang ASDP, 2019-2023.....	175
Gambar 7.1	Hasil Perhitungan Analisis MRP Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023	195



PENDAHULUAN

"Strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah terus berkembang dari waktu ke waktu demi mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata dan adil"



BAB I PENDAHULUAN

1.1. INKLUSIVITAS PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses yang harus dijalani oleh suatu daerah. Proses ini nantinya akan menyebabkan peningkatan pendapatan perkapita penduduk dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, diperlukan partisipasi aktif dari setiap elemen yang terdapat dalam suatu daerah dalam proses pembangunan. Selain itu, pembangunan di daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal.

Strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terus berkembang dari waktu ke waktu demi mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata dan adil. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dilakukan strategi pembangunan *triple track strategy*, yakni strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-poor* dan *pro-job* melalui percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi akan memacu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan merangsang proses pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, indikator yang lazim digunakan dalam mengukur keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi serta dapat dilihat sektor mana saja yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Publikasi ini disusun dengan harapan dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan program pembangunan yang akan dilaksanakan maupun mengevaluasi pembangunan yang telah berlalu. Publikasi ini mencakup

diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) beserta pertumbuhan ekonomi, pasar *demand*, analisis potensi dan inflasi. Semua uraian yang terkait dengan PDRB dan inflasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang terjadi di pasar barang dan jasa. Sementara hal-hal terkait ketenagakerjaan (tingkat partisipasi angkatan kerja, pengangguran) dimaksudkan untuk mengetahui dinamika di pasar tenaga kerja. Terakhir, dinamika di pasar keuangan diwakili dengan investasi.

Publikasi ini juga dilengkapi dengan konsep dan definisi, serta metodologi penghitungan indikator sehingga dapat lebih mudah dipahami. Penjelasan konsep dan definisi berisi mengenai konsep dan definisi atau pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam bab yang bersangkutan. Sementara pembahasan sendiri berisi uraian analisis dari masing-masing indikator ekonomi. Terdapat tiga pendekatan pemikiran yang digunakan dalam publikasi ini, yakni analisis univariat atau bivariat secara *cross-section* untuk melihat atau mendeskripsikan nilai suatu variabel atau indikator pada tahun tertentu. Kemudian metode kedua menggunakan analisis *time series* untuk melihat pergerakan atau perkembangan suatu variabel dengan membandingkan kondisi antar periode waktu. Sementara metode yang ketiga yakni menggunakan analisis komparasi, dengan membandingkan kondisi di wilayah tersebut dengan kondisi di wilayah lain, misalnya dibandingkan dengan kondisi di Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan.

1.2. KEBUTUHAN DATA DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah memberi indikasi terjadinya proses pembangunan ekonomi. Proses tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dalam mengelola segala sumber daya daerah yang tersedia sehingga tercipta suatu rangkaian kegiatan ekonomi. Ini artinya hasil dari pembangunan ekonomi juga berdampak pada semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu muara dari pembangunan ekonomi daerah idealnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut secara umum.

Dampak dari pembangunan ekonomi terhadap peningkatan kesejahteraan, biasanya ditandai dengan terpenuhinya beberapa kondisi, seperti pertumbuhan ekonomi yang positif, menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya tingkat pengangguran, meningkatnya angka partisipasi kerja dan lain sebagainya.

Perencanaan pembangunan menjadi fokus penting untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Perkiraan potensi ekonomi, hambatan dan resiko yang akan dihadapi tentunya akan membuat rangkaian proses pembangunan lebih tepat sasaran. Dengan kata lain, perencanaan yang baik akan menghasilkan suatu pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan serangkaian kebijakan-kebijakan secara efektif dan efisien.

Namun demikian, menerjemahkan kebijakan ke dalam program-program operasional daerah bukan perkara yang mudah. Dalam hal ini akan terdapat berbagai kendala yang membatasi suatu usulan program, salah satunya adalah kearifan lokal yang menjadi pertimbangan. Oleh karena itu mengenal kekhasan suatu daerah merupakan satu dari sekian upaya untuk merumuskan program kebijakan yang terarah, efektif dan efisien.

Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu dari daerah otonom dengan segala kekhasan lokal dan potensinya memiliki sejarah tersendiri dalam proses perjalanan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara mandiri telah dimulai sejak ditetapkannya Tanah Bumbu sebagai kabupaten yang berdiri sendiri, terpisah dari Kabupaten Kotabaru sejak tanggal 8 April 2003. Perkembangan pembangunan termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bersama-sama dengan masyarakat untuk mengoptimalkan segala daya dan upaya dalam menggali sumber daya dan potensi ekonomi sekaligus mengembangkan sumber daya dan potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.

Untuk menunjang perwujudan pembangunan daerah tentu membutuhkan data berkualitas, sehingga dapat tercipta perencanaan pembangunan yang komprehensif dan tepat sasaran. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bersama *stakeholder* terkait

berusaha menyediakan data yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dalam membuat berbagai kebijakan pembangunan secara umum dan pembangunan ekonomi daerah secara khusus melalui publikasi "Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu 2019". Publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penunjang proses perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

1.3. MANFAAT POTRET PEMBANGUNAN EKONOMI

Publikasi ini akan memberikan potret hasil pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam beberapa tahun terakhir sampai dengan kondisi data di tahun 2023. Publikasi ini dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Bagi pemerintah daerah, tentunya publikasi ini dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Dengan melihat PDRB misalnya, pemerintah daerah dapat mengetahui lapangan usaha yang menjadi penyokong utama ekonomi daerah. Selain itu juga dapat melihat lapangan usaha yang perlu mendapat perhatian lebih agar kinerjanya terus dapat ditingkatkan. Sementara itu indikator-indikator lain seperti kemiskinan, ketimpangan perkembangan harga dan ketenagakerjaan juga berperan penting dalam melihat kondisi makro ekonomi regional Kabupaten Tanah Bumbu baik dari perkembangan maupun posisinya terhadap Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan bagi masyarakat lainnya, publikasi ini dapat bermanfaat sebagai penunjang berbagai kepentingan yang berkaitan dengan perekonomian dan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Publikasi ini lebih mengarahkan kepada upaya memaparkan gambaran keadaan ekonomi makro daerah di Kabupaten Tanah Bumbu, tidak menguraikan bagaimana suatu kebijakan diambil dalam konsep pembangunan ekonomi daerah, namun demikian rekomendasi kebijakan yang bisa diambil juga diselipkan dalam publikasi ini sebagai landasan secara umum.

Untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka kegiatan penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 ditempuh melalui pendekatan:

1. Studi kepustakaan, untuk memperoleh gambaran mengenai sistem ekonomi regional, perencanaan pembangunan regional, dan berbagai hal yang terkait dengan indikator makro ekonomi.
2. Pengumpulan data-data dari berbagai sumber, untuk memperoleh data yang lebih rinci tentang produksi, harga, nilai tambah bruto, data inflasi, harga-harga, data pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.
3. Melakukan analisis statistik deskriptif berdasarkan data-data kuantitatif, sehingga dapat dikaji secara lebih detail terhadap berbagai indikator ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan dan analisis dalam publikasi ini disusun dengan mengikuti sistematika sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pengantar untuk melihat secara sepintas isi buku ini.

Bab II : Menguraikan tinjauan secara umum perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengulas masalah pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi, PDRB per kapita, penggunaan PDRB serta menguraikan secara lebih rinci mengenai sektor-sektor yang dominan dalam kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu.

Bab III : Menguraikan masalah perkembangan harga-harga, yaitu berisi ulasan mengenai perkembangan Indeks Harga Konsumen dan laju inflasi.

Bab IV : Menguraikan masalah perkembangan ketenagakerjaan, terutama ulasan mengenai pengangguran di Kabupaten Tanah Bumbu.

Bab V : Menguraikan masalah kemiskinan seperti garis kemiskinan, persentase kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanah Bumbu.

Bab VI : Merupakan Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan



SUMBER DAYA MANUSIA

"Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing suatu wilayah."

BAB II
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH BUMBU

Penduduk memiliki peran yang vital dalam proses pembangunan suatu wilayah, mulai dari proses perencanaan hingga implementasi kebijakan. Peran penduduk adalah sebagai subjek dan objek dalam proses pembangunan. Penduduk sebagai objek pembangunan artinya bahwa tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, peran penduduk sebagai subjek pembangunan adalah pelaku yang akan melaksanakan pembangunan.

Penduduk bisa menjadi modal sekaligus tantangan dalam pembangunan. Penduduk akan menjadi modal apabila memiliki kualitas yang baik. Artinya penduduk memiliki kompetensi yang dapat dibina dan didayagunakan secara efektif dan bisa menjadi stimulus dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, tetapi memiliki kualitas rendah justru akan menjadi tantangan proses pembangunan. Sehingga sudah semestinya penduduk mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Kualitas penduduk berkaitan erat dengan kemampuan penduduk suatu bangsa untuk mengolah sekaligus memanfaatkan sumber daya alam yang ada, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Indikator kualitas/mutu sumber daya manusia (SDM) dapat dilihat dari sudut pandang beberapa aspek seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan tingkat kesehatan. Tingkat pendidikan merupakan potensi sumber daya manusia yang unggul. Sementara tingkat kesehatan mencerminkan kesejahteraan suatu negara. Sedangkan pendapatan yang tinggi sangat berpengaruh terhadap upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat di suatu negara. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain.

Terdapat tiga indikator sumber daya manusia yang dapat dijadikan acuan tingkat kualitas penduduk dalam suatu wilayah, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Ketimpangan Gender. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil

pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Sedangkan, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berfokus mengukur kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

2.1. PENDUDUK

2.1.1 JUMLAH PENDUDUK DAN RASIO JENIS KELAMIN

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 mencapai 337,33 ribu jiwa. Jumlah tersebut meningkat sekitar 1,55 persen dibandingkan kondisi tahun sebelumnya (332,18 ribu jiwa). Sedangkan, 10 tahun silam yakni tahun 2010 penduduk Kabupaten Tanah Bumbu hanya mencapai 269,58 ribu jiwa. Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun ke tahun disebabkan oleh berbagai Faktor. Selain kelahiran, faktor lain seperti migrasi akibat banyaknya lapangan usaha di Kabupaten Tanah Bumbu juga berperan dalam peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (ribu jiwa), dan rasio Jenis Kelamin Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk Laki-laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
2020	165,05	156,44	321,49	105
2021	167,66	159,23	326,89	105
2022	170,22	161,96	332,18	105
2023	172,70	164,64	337,33	104

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu, Hasil Proyeksi SP2020

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki di Kabupaten Tanah Bumbu cenderung lebih banyak dibandingkan perempuan dalam beberapa tahun terakhir. Terlihat dari rasio jenis kelamin penduduk Tanah Bumbu tahun 2024 sebesar 104 yang artinya terdapat 104 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun ke tahun tidak hanya disebabkan oleh faktor kelahiran, tetapi juga migrasi. Migrasi ke Kabupaten Tanah Bumbu didorong oleh banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah ini. Sebagai daerah yang berkembang dengan banyak sektor industri dan pertambangan, Kabupaten Tanah Bumbu menarik banyak penduduk dari daerah lain yang mencari peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, program pemerintah daerah yang fokus pada pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum turut mendorong minat penduduk untuk bermigrasi ke Tanah Bumbu. Dampak dari urbanisasi ini terlihat jelas dari peningkatan jumlah penduduk yang signifikan selama satu dekade terakhir. Jika dilihat dari data rasio jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Tanah Bumbu selalu lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin yang lebih tinggi dari 100 menunjukkan bahwa untuk setiap 100 perempuan, terdapat lebih dari 100 laki-laki. Pada tahun 2023, rasio ini sedikit menurun menjadi 104 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu berada di angka 105. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan pola migrasi, di mana lebih banyak perempuan yang mungkin berpindah ke Tanah Bumbu, atau bisa juga disebabkan oleh faktor alami lainnya seperti angka kelahiran dan kematian yang mempengaruhi komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, tekanan terhadap infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas umum lainnya akan semakin besar. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah proaktif untuk memastikan bahwa peningkatan jumlah penduduk tidak berdampak negatif pada kualitas hidup warga. Selain itu, upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan dan inklusif akan sangat penting untuk

mengakomodasi pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan pentingnya perencanaan dan pengelolaan yang baik dalam menghadapi dinamika pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu.

2.1.2 TINGKAT PENDIDIKAN

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berakhlak mulia merupakan misi pertama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap penduduk. Tingginya tingkat pendidikan masyarakat disuatu wilayah mengindikasikan adanya potensi sumber daya manusia yang unggul. Tingkat keberhasilan dari pendidikan penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari beberapa angka, seperti angka partisipasi sekolah (APS) dan angka partisipasi murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi APS menunjukkan semakin tingginya penduduk usia sekolah yang bersekolah. Namun, APS tidak menggambarkan dijenjang apa seseorang tersebut sedang bersekolah. Berbeda dengan APS, Angka Partisipasi Murni (APM) dihitung dengan melihat jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Misalnya untuk APM SD adalah proporsi semua anak umur 7-12 tahun yang masih sekolah SD/ sederajat terhadap total anak berumur 7-12 tahun (anak yang telah SMP/ sederajat pada usia 7-12 tahun tidak termasuk dalam perhitungan APM SD).

Tabel 2.2 Angka partisipasi sekolah (APS) dan angka partisipasi murni (APM)
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023

Karakteristik	2019	2020	2021	2022	2023
APS					
7-12	99,98	99,51	99,49	99,74	99,99
13-15	97,74	97,87	98,20	98,03	97,57
16-18	75,23	75,70	75,22	75,04	73,49
APM					
SD	99,09	98,95	99,16	99,41	99,80
SMP	77,42	77,66	78,00	78,44	79,52
SMA	62,78	63,65	64,01	66,22	53,70

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dalam kurun waktu lima tahun terakhir semakin bertambahnya usia sekolah semakin rendah partisipasi sekolahnya. Hal ini terlihat dari APS usia 7-12 dan 13-15 tahun yang berada diatas 95 persen. Dengan kata lain, dalam lima tahun terakhir lebih dari 95 persen penduduk usia 7-15 tahun duduk dibangku sekolah. Sementara itu, pada kelompok usia 16-18 tahun atau usia sekolah SMA/Sederajat sejak 2019-2022 hanya berkisar 75 persen yang bersekolah, bahkan turun menjadi 73,49 persen pada tahun 2023.

Sejalan dengan penurunan APS pada kelompok umur yang lebih tinggi, Angka Partisipasi Murni juga terlihat semakin rendah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 2023, angka partisipasi murni jenjang SD mencapai 99,80 persen. Artinya, hampir seluruh anak berusia 7-12 tahun berada pada jenjang sekolah SD. Sementara itu, untuk jenjang SMP dan SMA dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih berada dibawah 80 persen, dimana pada tahun 2023 APM SMP dan SMA secara berturut-turut sebesar 79,52 dan 53,70 persen. Artinya dari 100 orang penduduk usia 13-15 tahun, ada sekitar 79-80 orang yang masih bersekolah pada jenjang SMP, selebihnya bersekolah dijenjang selain SMP atau tidak bersekolah. Begitu pula pada jenjang SMA, dari 100 orang penduduk berusia 16-18 tahun, ada sekitar 53-54 orang yang masih bersekolah pada jenjang SMA, selebihnya bersekolah dijenjang selain SMA atau tidak bersekolah. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten

Tanah Bumbu dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi sekolah, khususnya pada jenjang sekolah menengah, agar misi “Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berakhlak mulia” dapat tercapai.

Keberadaan infrastruktur pendidikan menjadi pemeran utama dalam menunjang aktivitas belajar mengajar. Keberadaan sekolah yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat menjadi penting dalam aspek pemerataan pendidikan. Kabupaten Tanah Bumbu yang terdiri dari 12 Kecamatan memiliki 212 SD/ sederajat, 90 SMP/ sederajat, dan 44 SMA/ sederajat pada tahun 2023.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator penting yang mengungkapkan sejauh mana anak-anak di wilayah ini mendapatkan akses ke pendidikan. Data APS dan APM di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi dalam sektor Pendidikan. Dari data BPS, kita dapat melihat bahwa APS untuk anak-anak usia 7-12 tahun hampir mencapai tingkat yang sempurna, yakni 99,99 persen pada tahun 2023, menunjukkan bahwa hampir semua anak di kelompok usia ini bersekolah. Namun, seiring dengan bertambahnya usia, partisipasi sekolah mengalami penurunan yang signifikan. APS untuk kelompok usia 13-15 tahun berada pada angka 97,57 persen pada tahun 2023, dan untuk kelompok usia 16-18 tahun, angka ini menurun drastis menjadi 73,49 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Perbedaan yang mencolok juga terlihat pada APM. APM untuk jenjang SD sangat tinggi, mencapai 99,80 persen pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa hampir semua anak usia 7-12 tahun bersekolah di jenjang SD. Namun, APM untuk jenjang SMP dan SMA jauh lebih rendah. Pada tahun 2023, APM untuk SMP adalah 79,52 persen, dan untuk SMA hanya 53,70 persen. Ini berarti bahwa hampir separuh dari anak-anak usia 16-18 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau sederajat. Angka ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam mempertahankan partisipasi sekolah di jenjang yang lebih tinggi.

Jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu juga memainkan peran penting dalam partisipasi sekolah. Pada tahun 2023, terdapat 212 SD/ sederajat, 90 SMP/ sederajat, dan 44 SMA/ sederajat yang tersebar di 12 kecamatan. Ketimpangan

jumlah sekolah di setiap jenjang pendidikan mungkin menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya APS dan APM di jenjang yang lebih tinggi. Dengan hanya 44 SMA/ sederajat, akses ke pendidikan menengah atas mungkin terbatas bagi banyak siswa, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah yang lebih terpencil.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu fokus pada beberapa langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi sekolah, terutama di jenjang SMP dan SMA. Upaya ini bisa meliputi pembangunan lebih banyak sekolah menengah atas di kecamatan yang belum terjangkau, serta penyediaan beasiswa dan program bantuan pendidikan untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Selain itu, meningkatkan kualitas pendidikan dan infrastruktur sekolah juga akan membantu menarik lebih banyak siswa untuk melanjutkan pendidikan mereka. Dengan demikian, misi "Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berakhlak mulia" dapat tercapai dengan lebih efektif.

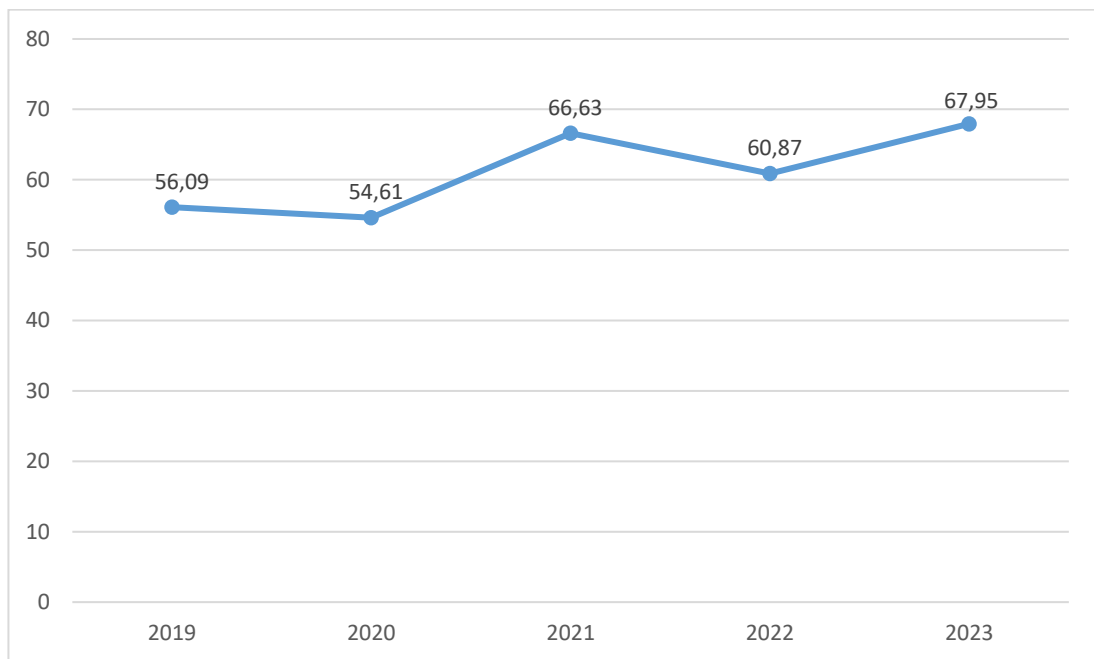
2.1.3 TINGKAT KESEHATAN

Kesehatan penduduk dapat kita lihat dari angka kematian dan angka harapan hidupnya. Tingginya angka kematian menggambarkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah dan tingginya angka harapan hidup menggambarkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Tingkat kesehatan penduduk juga selalu berhubungan dengan pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk suatu wilayah, maka pengeluaran untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga akan semakin tinggi. Penduduk yang memiliki pendapatan tinggi dapat menikmati makanan yang berkualitas dan memenuhi standar kesehatan. Sementara penduduk yang tinggi tingkat pendidikannya diharapkan akan memiliki produktivitas yang tinggi pula bila jika dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kualitas penduduk Indonesia adalah tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, dan tingkat pendapatan. Tingkat pendidikan merupakan potensi sumber daya manusia yang unggul. Sementara tingkat kesehatan mencerminkan kesejahteraan suatu wilayah. Sedangkan pendapatan yang tinggi sangat berpengaruh

terhadap upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat di suatu negara. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain.

Selain angka harapan hidup dan kematian, indikator lainnya yang dapat memberikan gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat adalah angka morbiditas (kesakitan). Angka Morbiditas (kesakitan) merujuk pada konsep yang digunakan BPS dalam Susenas menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga, maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit). Berdasarkan data BPS, Angka Morbiditas (kesakitan) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 relatif rendah, yaitu 6,67 persen.

Pemerintah pusat maupun daerah terus mengupayakan penurunan angka kesakitan. Salah satu upaya pemerintah dalam menurunkan kejadian penyakit dan penularannya dilakukan melalui aksi preventif yaitu program imunisasi rutin lengkap. Imunisasi rutin lengkap terdiri atas imunisasi dasar dan lanjutan. Imunisasi ini diberikan secara gratis di fasilitas-fasilitas kesehatan pemerintah. Meskipun demikian, cakupan imunisasi rutin lengkap sampai saat ini belum mencapai 100 persen. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap berada diantara 56 hingga 67,95 persen pada tahun 2023. Pemerintah masih perlu melakukan sosialisasi secara masif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya imunisasi rutin lengkap.



Gambar 2. 1 Persentase Penduduk Berumur 0-59 Bulan (Balita) yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap, 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Ketersediaan fasilitas kesehatan menjadi salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kemudahan akses menuju fasilitas kesehatan akan mengurangi beban finansial yang diperlukan masyarakat untuk mendapatkan pengobatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, terdapat 2 Rumah Sakit Umum, 1 Rumah Sakit Ibu dan Anak, 14 Puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan, serta beberapa fasilitas kesehatan lainnya seperti yang tertera pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, 2023

NO	FASKES	JUMLAH
1	RUMAH SAKIT UMUM	2
2	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK	1
3	PUSKESMAS RAWAT INAP	5
4	PUSKESMAS NON RAWAT INAP	9
5	PUSKESMAS KELILING	2
6	PUSKESMAS PEMBANTU	2
7	KLINIK SWASTA	35
8	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER	42
9	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI	18
10	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER SPESIALIS	4
11	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN	34
12	TEMPAT PRAKTIK MANDIRI PERAWAT	11
13	POSKESDES	144

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

Data kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu mengungkapkan beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tingkat kesehatan penduduk dapat dilihat dari angka kematian, angka harapan hidup, dan angka morbiditas (kesakitan). Angka morbiditas Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2023 relatif rendah, yaitu 6,67 persen. Ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil penduduk yang mengalami gangguan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Upaya penurunan angka kesakitan di Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan melalui berbagai program, salah satunya adalah program imunisasi rutin lengkap.

Program imunisasi rutin lengkap adalah salah satu cara pemerintah untuk menurunkan kejadian penyakit dan penularannya. Namun, cakupan imunisasi lengkap di Kabupaten Tanah Bumbu belum mencapai 100 persen. Dalam lima tahun terakhir, persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap berkisar antara 56 hingga 67,95 persen pada tahun 2023. Meskipun ada peningkatan, angka ini masih di bawah target yang diharapkan. Sosialisasi yang lebih masif dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi sangat diperlukan untuk mencapai cakupan yang lebih tinggi.

Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan penduduk. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, terdapat 2 Rumah Sakit Umum, 1 Rumah Sakit Ibu dan Anak, 14 Puskesmas yang tersebar di 12 kecamatan, dan berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Di antaranya terdapat 5 Puskesmas Rawat Inap, 9 Puskesmas Non Rawat Inap, 2 Puskesmas Keliling, dan 2 Puskesmas Pembantu. Selain itu, terdapat 35 klinik swasta, 42 tempat praktik mandiri dokter, 18 tempat praktik mandiri dokter gigi, 4 tempat praktik mandiri dokter spesialis, 34 tempat praktik mandiri bidan, 11 tempat praktik mandiri perawat, dan 144 Poskesdes. Jumlah fasilitas kesehatan yang cukup banyak ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Namun, meskipun fasilitas kesehatan tersedia, perlu adanya peningkatan dalam hal aksesibilitas dan kualitas pelayanan. Dengan 2 Rumah Sakit Umum dan 1 Rumah Sakit Ibu dan Anak, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa rumah sakit ini mampu menangani berbagai kasus kesehatan dengan fasilitas dan tenaga medis yang memadai. Selain itu, peningkatan jumlah Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu juga dapat membantu mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Secara keseluruhan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan saling terkait dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berakhlak mulia di Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan memperhatikan data morbiditas yang relatif rendah namun dengan cakupan imunisasi yang belum

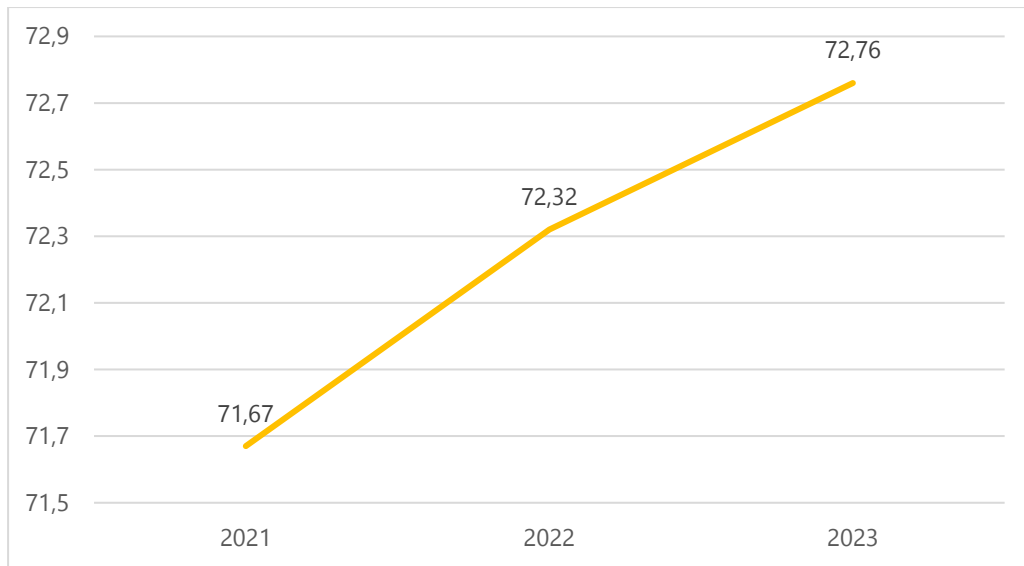
optimal, serta ketersediaan fasilitas kesehatan yang baik namun memerlukan peningkatan kualitas, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah ini.

2.2 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

2.2.1 PENJELASAN UMUM INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Pembangunan yang ideal pada dasarnya mencakup pembangunan secara keseluruhan. Tidak hanya pembangunan ekonomi yang perlu ditingkatkan oleh suatu daerah, tetapi pembangunan manusia yang ada didalamnya juga menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menentukan arah perkembangan perekonomian suatu wilayah. Tujuan utama dari pembangunan manusia harus mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (*Human Development Report* 1990). Hal ini berkesinambungan dengan arah pembangunan Tanah Bumbu tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, produktif dan berakhlak mulia.

Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup yang layak (*decent living*). Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Selanjutnya, dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut IPM Kabupaten Tanah Bumbu selama 2021-2023.



Gambar 2.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru, 2021-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Catatan:

1. Kelompok "sangat tinggi": $IPM \geq 80$
2. Kelompok "tinggi": $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok "sedang": $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok "rendah": $IPM < 60$

Salah satu indikator yang dapat melihat kualitas sumber daya manusia yang ada di wilayahnya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan Gambar 1, IPM Kabupaten Tanah Bumbu sejak tahun 2021 selalu mengalami peningkatan. Capaian IPM Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021 adalah sebesar 72,55 kemudian meningkat menjadi 73,34 pada tahun 2022, dan meningkat lagi menjadi 73,86 pada tahun 2023. Dengan demikian, dari tahun 2022 ke tahun 2023 IPM Kabupaten Tanah Bumbu berhasil meningkat 0.52 poin. Dengan melihat angka capaian IPM daerah tersebut, pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Tanah Bumbu tergolong pada kelompok tinggi (dengan kisaran 70 sampai kurang dari 80). Tanah Bumbu telah termasuk dalam kelompok IPM tinggi sejak tahun 2018, sebelumnya IPM Tanah Bumbu masuk dalam kelompok menengah. Capaian IPM yang tinggi ini cukup membanggakan, meski demikian perlu diperhatikan indikator-indikator pembentuk IPM agar

pembangunan daerah dapat berjalan maksimal dengan dukungan sumber daya manusia yang optimal.

Tabel 2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2022-2023

Kabupaten/Kota	IPM		Peringkat IPM		Selisih IPM	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KALIMANTAN SELATAN	74.00	74.66	13	12	0,55	0,66
Tanah Laut	72.33	72.98	8	8	0.47	0.65
Kota Baru	71.57	72.01	11	11	0.63	0.44
Banjar	73.25	74.01	5	4	0.85	0.76
Barito Kuala	69.87	70.67	13	13	0.79	0.8
Tapin	72.61	73.52	6	6	0.71	0.91
Hulu Sungai Selatan	72.47	73.21	7	7	0.54	0.74
Hulu Sungai Tengah	72.32	72.76	9	10	0.65	0.44
Hulu Sungai Utara	70.33	71.12	12	12	0.7	0.79
Tabalong	74.82	75.43	3	3	0.57	0.61
Tanah Bumbu	73.34	73.86	4	5	0.79	0.52
Balangan	72.20	72.97	10	9	0.62	0.77
Kota Banjarmasin	79.46	79.98	2	2	0.37	0.52
Kota Banjarbaru	80.82	81.25	1	1	0.41	0.43

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Pada Indeks Pembangunan Manusia dengan menggunakan metode baru Kabupaten Tanah Bumbu berada pada peringkat 5 dari 13 Kabupaten/Kota di tahun 2023. Meskipun secara peringkat mengalami penurunan (dari peringkat 4 di 2022, menjadi peringkat 5 di 2023) namun secara pertumbuhan, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Bumbu masih terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di Tanah Bumbu sudah cukup

baik, namun perlu di tingkatkan lagi agar dapat mengejar ketertinggalan di era revolusi industri 4.0 saat ini yang mana sekat ruang dan waktu tidak menjadi penghalang untuk terus berkembang.

Dengan capaian Kabupaten Tanah Bumbu yang berada pada posisi kelima, hal ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Tanah Bumbu untuk tetap berorientasi pada pembangunan manusia ke depannya, karena manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya dalam proses pembangunan daerah. Upaya peningkatan IPM tidak dapat dilakukan secara instan, akan tetapi dengan melakukan sinergisitas antara pembangunan ekonomi, perbaikan derajat kesehatan, serta peningkatan pengetahuan dan pendidikan penduduk. Oleh karena itu, perlu ditinjau lebih lanjut bagaimana capaian masing-masing komponen pembentuk IPM di Kabupaten Tanah Bumbu.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia dalam tiga dimensi utama: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Berdasarkan data IPM Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2021 hingga 2023, terlihat tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021, IPM Tanah Bumbu mencapai 72,55, meningkat menjadi 73,34 pada tahun 2022, dan kemudian meningkat lagi menjadi 73,86 pada tahun 2023. Peningkatan sebesar 0,52 poin dari tahun 2022 ke 2023 menunjukkan kemajuan yang stabil dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam konteks perbandingan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, meskipun IPM Tanah Bumbu mengalami peningkatan, peringkatnya turun dari posisi 4 pada tahun 2022 ke posisi 5 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, beberapa daerah lain di provinsi tersebut mengalami peningkatan yang lebih cepat. Misalnya, Kabupaten Banjar yang pada tahun 2022 berada di peringkat 5 berhasil naik ke peringkat 4 pada tahun 2023 dengan peningkatan IPM sebesar 0,76 poin, lebih tinggi dari peningkatan yang dicapai oleh Tanah Bumbu.

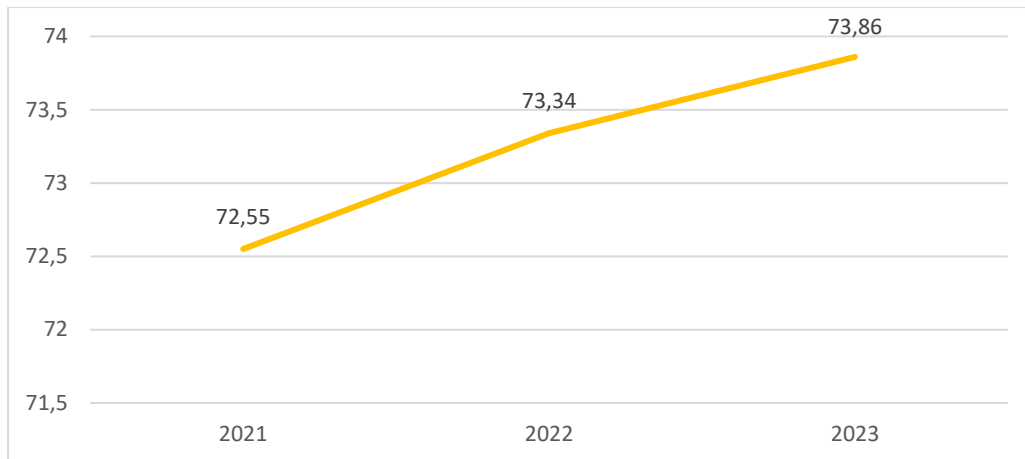
Komponen-komponen pembentuk IPM juga menunjukkan data penting. Dalam dimensi umur panjang dan sehat, indikator umur harapan hidup saat lahir berperan signifikan. Perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan dasar menjadi faktor penting. Di dimensi pengetahuan, indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah menjadi fokus, di mana peningkatan akses dan kualitas pendidikan sangat diperlukan. Misalnya, meskipun angka partisipasi sekolah (APS) kelompok usia 16-18 tahun mengalami penurunan, upaya peningkatan pendidikan di tingkat dasar dan menengah harus tetap menjadi prioritas.

Standar hidup yang layak, diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan, juga menunjukkan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif. Peningkatan ekonomi daerah akan berkontribusi pada peningkatan dimensi ini, yang pada gilirannya akan meningkatkan keseluruhan IPM.

Secara keseluruhan, meskipun Kabupaten Tanah Bumbu mengalami peningkatan IPM yang konsisten, tetap diperlukan upaya sinergis antara pembangunan ekonomi, perbaikan derajat kesehatan, dan peningkatan pengetahuan serta pendidikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan manusia berjalan seimbang dan berkelanjutan, serta dapat bersaing dengan daerah lain dalam era revolusi industri 4.0. Upaya kolaboratif dari berbagai sektor akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih tinggi dan merata.

2.2.2 DIMENSI KESEHATAN

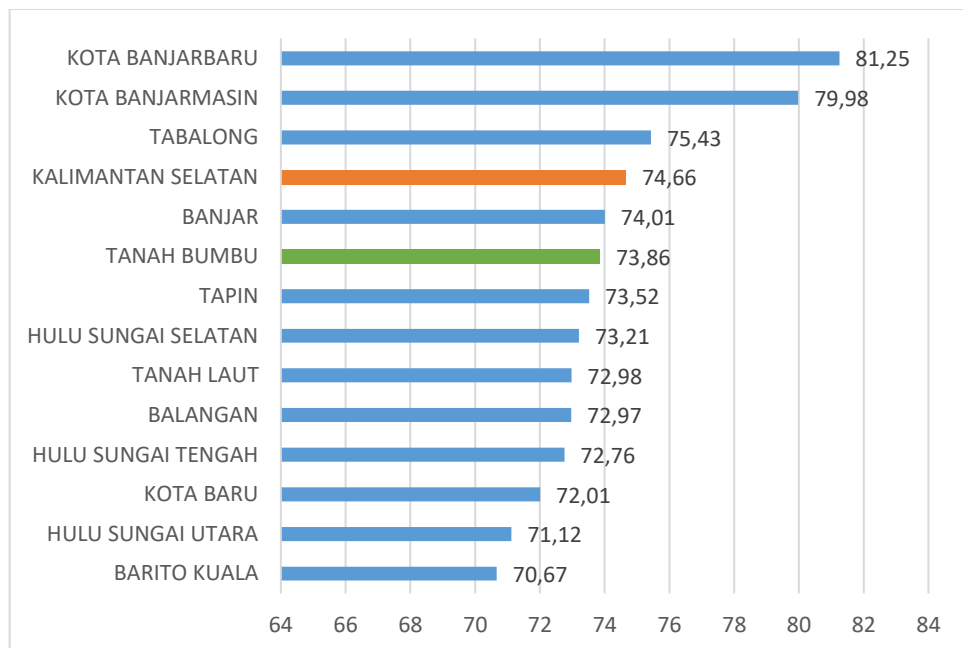
Indikator Umur Harapan Hidup (UHH) sering digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam bidang kesehatan. Umur Harapan Hidup dapat menggambarkan sejauh mana tingkat kesehatan penduduk pada di suatu daerah. Semakin tinggi derajat kesehatan masyarakat secara tak langsung dapat menaikkan usia harapan hidupnya. Pada tahun 2023, UHH Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar 73,86 tahun.



Gambar 2.3 Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu, 2021-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

UHH Kabupaten Tanah Bumbu dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Dibandingkan tahun 2022, UHH Kabupaten Tanah Bumbu telah meningkat 0,52 tahun. Walaupun begitu capaian UHH Kabupaten Tanah Bumbu masih menduduki peringkat kelima di Provinsi Kalimantan Selatan dan UHH Kabupaten Tanah Bumbu juga masih di bawah UHH Provinsi Kalimantan Selatan (74,66). Perlu adanya strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di bidang kesehatan untuk mempercepat peningkatan UHH Kabupaten Tanah Bumbu agar bisa mencapai minimal UHH Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 2.4 Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota dan Provinsi di Kalimantan Selatan, 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

UHH Kabupaten Tanah Bumbu mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, UHH tercatat sebesar 72,55. Angka ini meningkat menjadi 73,34 pada tahun 2022, dan mencapai 73,86 pada tahun 2023. Kenaikan sebesar 0,52 dari 2022 ke 2023 menunjukkan bahwa ada perbaikan yang signifikan dalam bidang kesehatan masyarakat di Tanah Bumbu.

Namun, meskipun UHH di Tanah Bumbu terus meningkat, daerah ini masih menduduki peringkat kelima di Provinsi Kalimantan Selatan untuk indikator ini. UHH Tanah Bumbu pada tahun 2023 masih di bawah UHH Provinsi Kalimantan Selatan yang tercatat sebesar 74,66. Ini menandakan bahwa Tanah Bumbu perlu mengimplementasikan strategi kesehatan yang lebih efektif untuk meningkatkan usia harapan hidup penduduknya hingga setara dengan atau melebihi rata-rata provinsi.

Perbandingan dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa Tanah Bumbu berada di bawah beberapa kabupaten/kota seperti Kota Banjarmasin dengan UHH sebesar 79,98 dan Kota Banjarbaru dengan UHH sebesar 81,25. Sementara itu, beberapa daerah dengan UHH lebih

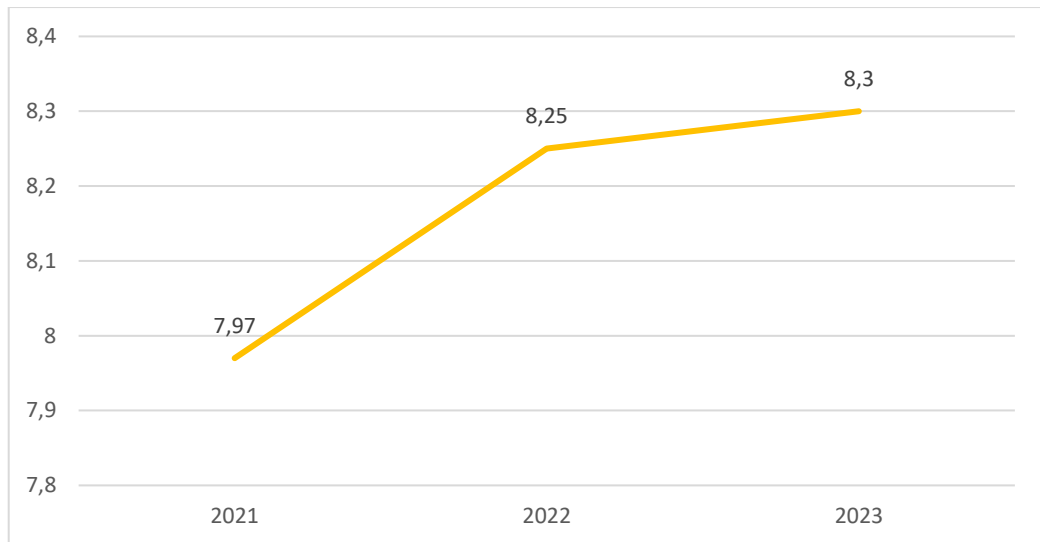
rendah dari Tanah Bumbu mencakup Hulu Sungai Utara dengan UHH sebesar 71,12 dan Barito Kuala dengan UHH sebesar 70,67.

Untuk meningkatkan UHH, pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan layanan kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, serta program-program kesehatan preventif. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat juga dapat berkontribusi pada peningkatan UHH. Upaya berkelanjutan dan lebih intensif masih diperlukan untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal dan memastikan bahwa penduduk dapat menikmati usia harapan hidup yang lebih panjang dan berkualitas.

2.2.3 DIMENSI PENDIDIKAN

Selain dimensi kesehatan, IPM dibentuk dari dimensi pendidikan yang merepresentasikan sejauh mana tingkat pengetahuan dan mutu sumber daya manusia di suatu daerah melalui dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk berusia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun ke atas.

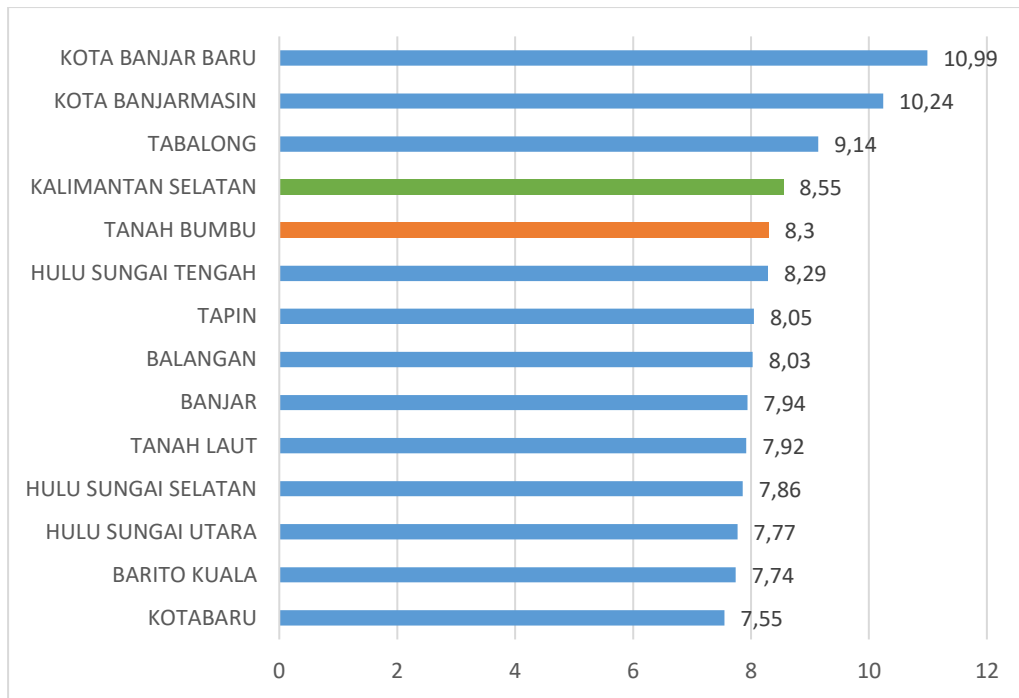
Rata-rata lama sekolah (RLS) mengindikasikan level pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dijalani oleh penduduknya. Lama sekolah dikonversi berdasarkan tingkat pendidikan yang diselesaikan, namun tidak termasuk tahun tidak naik kelas. Setiap level pendidikan yang ditamatkan dan yang telah dijalankan oleh seseorang akan dikonversi ke dalam satuan tahun lama sekolah.



Gambar 2.5 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tanah Bumbu, 2021-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

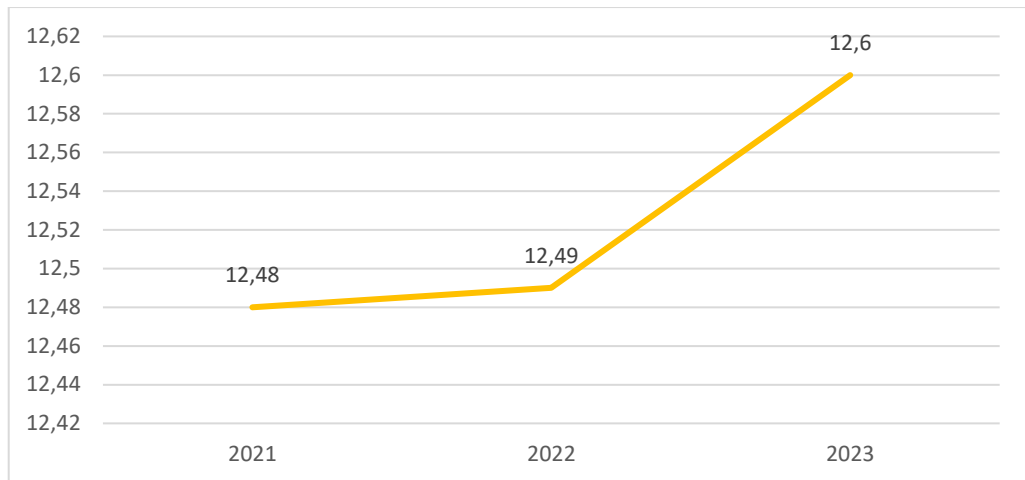
RLS Tanah Bumbu terus meningkat selama tiga tahun terakhir, peningkatan pada tahun 2022 dari 2021 merupakan salah satu peningkatan yang tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 RLS meningkat 0.05 tahun, menjadi 8,30 tahun. Angka ini berarti bahwa secara rata-rata penduduk Tanah Bumbu yang telah berusia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas 2 atau 3 SMP/ sederajat. Angka ini mulai menyusul angka rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 8,55 tahun.



Gambar 2.6 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Kalimantan Selatan, 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

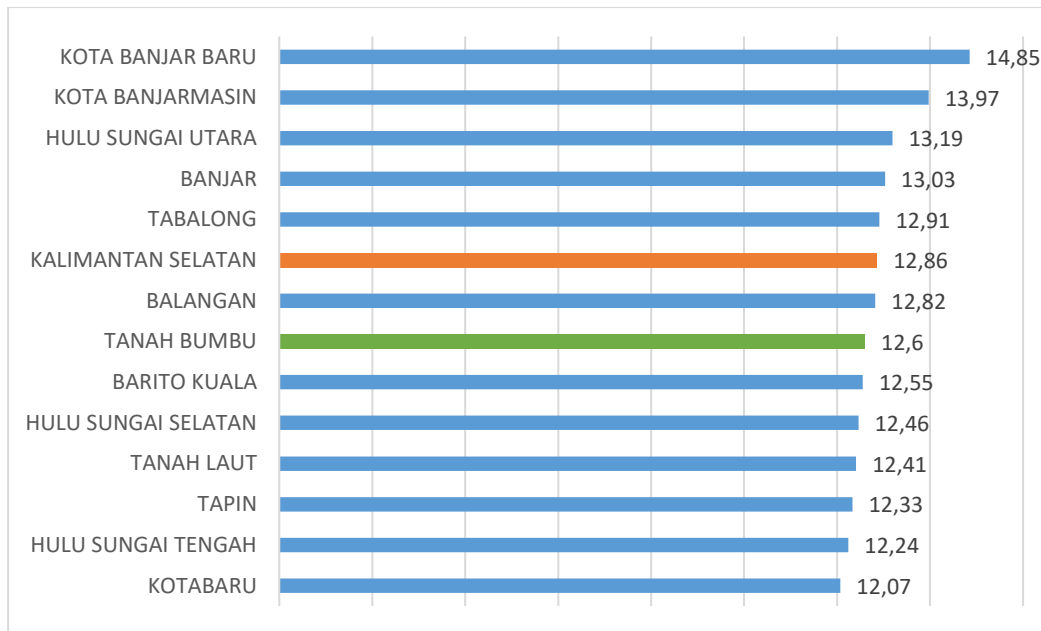
HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Semakin tinggi angka HLS, maka semakin baik tingkat pengetahuan dan mutu sumber daya manusia di daerah tersebut.



Gambar 2.7 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tanah Bumbu, 2021-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik

HLS Tanah Bumbu terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 RLS meningkat 0.11 tahun, menjadi 12,60 tahun. Angka ini berarti bahwa secara rata-rata penduduk Tanah Bumbu berusia 7 tahun ke atas rata-rata memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan hingga kelas 12 SMA atau tahun pertama di universitas/akademi/sekolah tinggi . Angka ini sedikit lebih rendah dari harapan lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 12,86 tahun.



Gambar 2.8 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Kalimantan Selatan, 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik

Untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah memang tidaklah mudah, terutama rata-rata lama sekolah karena yang diukur adalah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Artinya, rata-rata lama sekolah ini merupakan angka yang sudah terjadi sebelumnya, sehingga upaya-upaya yang dilakukan saat ini dampaknya baru dapat terlihat di tahun-tahun mendatang. Namun, upaya untuk meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah tentu tetap harus menjadi perhatian. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antarjenjang pendidikan, melalui pemberian penyuluhan kepada sekolah-sekolah maupun pendidikan kepada orang tua sendiri. Selain itu peningkatkan aksesibilitas penduduk ke sekolah-sekolah, terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, karena tak jarang faktor yang menyebabkan putus sekolah adalah masalah aksesibilitas.

Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan tingkat pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Data dari BPS menunjukkan bahwa RLS di Kabupaten Tanah Bumbu terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, RLS mencapai 7,97 tahun. Angka ini meningkat menjadi 8,25 tahun pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 8,30 tahun pada tahun 2023. Peningkatan sebesar 0,05 tahun pada tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 8,55 tahun pada tahun 2023, RLS di Kabupaten Tanah Bumbu sedikit tertinggal. Namun, peningkatan yang konsisten setiap tahunnya menunjukkan adanya usaha yang berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di wilayah ini.

Harapan lama sekolah (HLS) mengukur berapa tahun pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh anak-anak usia 7 tahun ke atas. HLS di Kabupaten Tanah Bumbu juga menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2021, HLS tercatat sebesar 12,48 tahun. Angka ini sedikit naik menjadi 12,49 tahun pada tahun 2022, dan mencapai 12,60 tahun pada tahun 2023. Peningkatan 0,11 tahun dari 2022 ke 2023 mencerminkan adanya harapan yang lebih tinggi terhadap sistem pendidikan di Tanah Bumbu. Jika dibandingkan dengan HLS di Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 12,86 tahun pada tahun 2023, Kabupaten Tanah Bumbu masih perlu melakukan berbagai upaya untuk mencapai atau bahkan melampaui standar provinsi. Meskipun demikian, peningkatan HLS menunjukkan bahwa semakin banyak anak di Tanah Bumbu yang memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA atau bahkan tahun pertama di universitas.

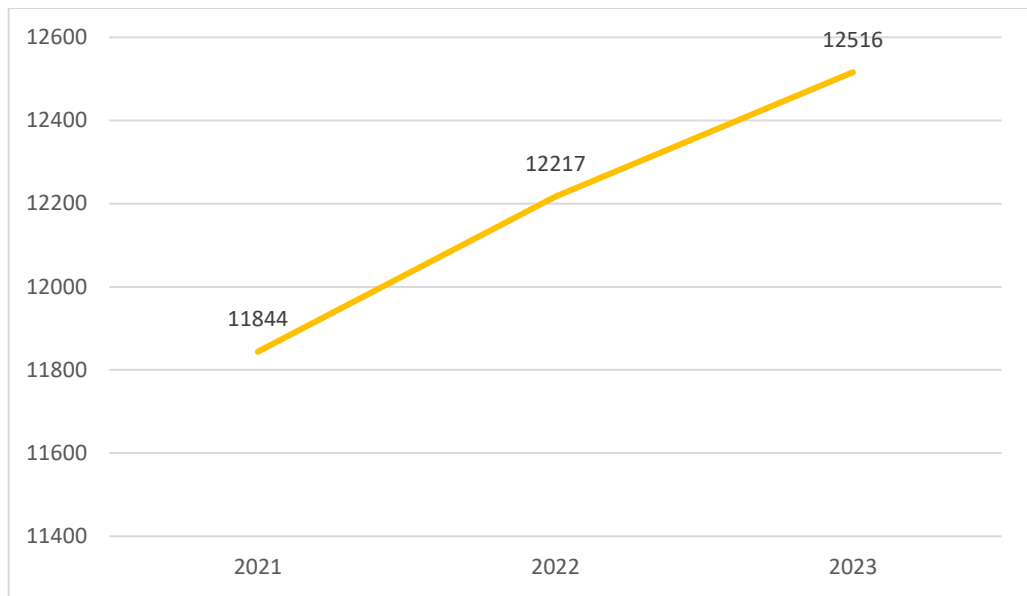
Untuk meningkatkan dimensi pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu, berbagai strategi perlu diimplementasikan. Salah satu tantangan utama dalam meningkatkan RLS adalah mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil. Pemberian penyuluhan kepada sekolah-sekolah dan pendidikan kepada orang tua juga penting untuk memastikan bahwa anak-anak tetap bersekolah dan melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, peningkatan infrastruktur pendidikan dan fasilitas belajar di daerah terpencil perlu menjadi perhatian. Kebijakan pemerintah daerah yang proaktif dalam menyediakan beasiswa dan program dukungan pendidikan bagi keluarga kurang mampu juga dapat membantu meningkatkan RLS dan HLS.

Dimensi pendidikan dalam IPM Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan peningkatan yang positif baik dalam RLS maupun HLS selama tiga tahun terakhir. Meskipun masih terdapat kesenjangan dengan rata-rata provinsi, tren peningkatan ini memberikan harapan bahwa dengan usaha yang konsisten dan strategi yang tepat, kualitas pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu akan terus membaik, berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

2.2.4 DIMENSI STANDAR HIDUP LAYAK

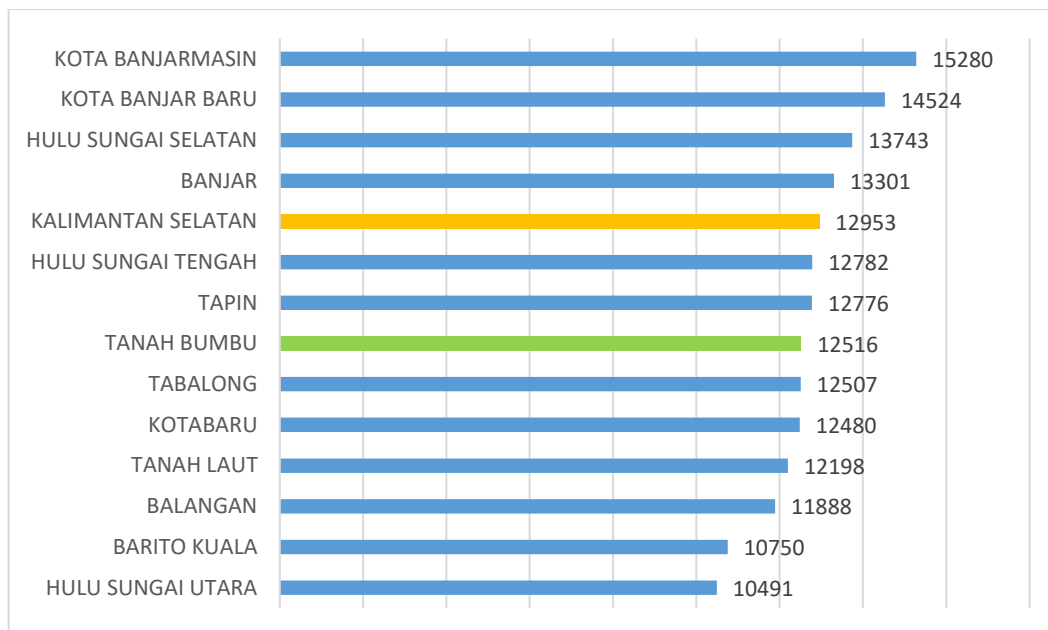
Dimensi standar hidup layak digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mendekati dimensi ini adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ini digunakan untuk melihat kemampuan dan daya beli masyarakat dalam rangka mencapai hidup layak.



Gambar 2.9 Perkembangan Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan Kabupaten Tanah Bumbu, 2021-2023 (Ribu rupiah/orang/tahun)

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2023 pengeluaran perkapita yang disesuaikan di Tanah Bumbu adalah 12.516 ribu rupiah, yang berarti untuk mencapai standar hidup layak minimal diperlukan 12,516 juta rupiah per orang untuk satu tahun. Angka ini meningkat dari tahun 2022, yakni 12,217 juta rupiah. Secara umum, angka pengeluaran perkapita yang disesuaikan ini terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan semakin tingginya daya beli sekaligus semakin tingginya uang yang diperlukan untuk mencapai standar hidup layak. Pengeluaran perkapita Tanah Bumbu ini sedikit lebih rendah dari pengeluaran perkapita provinsi Kalimantan Selatan, yakni 12,53 juta rupiah per orang per tahun.



Gambar 2.10 Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten/Kota dan Provinsi di Kalimantan Selatan, 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Tanah Bumbu adalah sebesar 11.844 ribu rupiah per orang per tahun. Angka ini meningkat menjadi 12.217 ribu rupiah pada tahun 2022 dan mencapai 12.516 ribu rupiah pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat sekaligus mencerminkan meningkatnya jumlah uang yang diperlukan untuk mencapai standar hidup layak. Kenaikan pengeluaran per kapita dari tahun 2022 ke 2023 adalah sebesar 299 ribu rupiah, yang menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir.

Jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita di tingkat provinsi Kalimantan Selatan, pengeluaran per kapita Tanah Bumbu pada tahun 2023 masih sedikit lebih rendah. Pengeluaran per kapita di provinsi Kalimantan Selatan adalah 12.530 ribu rupiah per orang per tahun. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun Tanah Bumbu mengalami peningkatan yang signifikan, daerah ini masih perlu mengejar ketertinggalan untuk mencapai atau bahkan melampaui rata-rata provinsi.

Selain itu, jika dilihat dari data pengeluaran per kapita yang disesuaikan di berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2023, Tanah Bumbu berada pada posisi menengah. Pengeluaran per kapita di Tanah Bumbu sebesar 12.516 ribu rupiah lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah seperti Hulu Sungai Utara (10.491 ribu rupiah) dan Barito Kuala (10.750 ribu rupiah), namun masih lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lainnya seperti Banjar (13.301 ribu rupiah), Hulu Sungai Selatan (13.743 ribu rupiah), dan Kota Banjarmasin (15.280 ribu rupiah).

Peningkatan pengeluaran per kapita di Tanah Bumbu yang konsisten selama tiga tahun terakhir mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, untuk mencapai standar hidup yang lebih tinggi dan meningkatkan peringkat dibandingkan daerah lain di provinsi Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu perlu terus meningkatkan daya beli masyarakatnya. Salah satu caranya adalah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui berbagai program yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemerintah daerah Tanah Bumbu dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat peningkatan pengeluaran per kapita. Ini termasuk mendorong investasi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menyediakan lapangan kerja yang lebih baik. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan pengeluaran per kapita di Tanah Bumbu dapat terus meningkat dan mendekati atau bahkan melampaui rata-rata provinsi di masa mendatang.

2.3. INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)

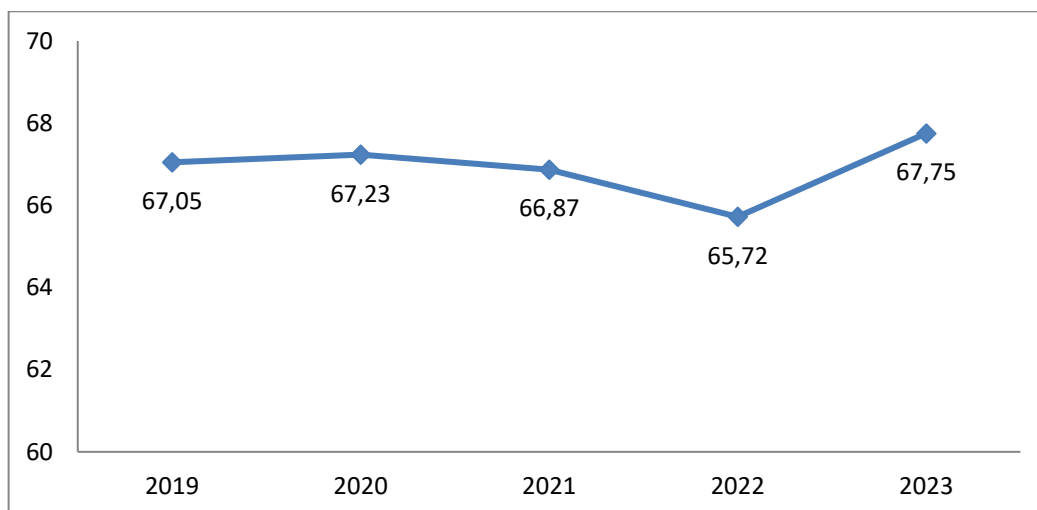
2.3.1 PENJELASAN UMUM INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)

Kesetaraan dan keadilan gender sering diartikan sebagai kondisi dimana posisi laki-laki dan perempuan setara dan seimbang. Arti dari kesetaraan gender bukan hanya pencapaian persamaan status dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga bermakna sebagai pemberdayaan. Pemberdayaan yang dimaksud mencakup adanya upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk

berperan serta dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta memiliki kesempatan dalam kegiatan ekonomi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indeks yang menunjukkan tolak ukur keaktifan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. IDG ditujukan untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. Variabel yang digunakan dalam pengukuran pemberdayaan gender (*gender empowerment*) adalah:

1. Keterlibatan perempuan di parlemen diukur dengan keanggotaan DPRD.
2. Peran perempuan sebagai tenaga profesional di bidang ekonomi diukur seberapa banyak perempuan yang bekerja sebagai pekerja profesional, kepemimpinan, teknisi dan ketatalaksanaan atau pekerja terampil.
3. Penguasaan sumber daya ekonomi yaitu perkiraan sumbangan pendapatan perempuan.



**Gambar 2.11 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2019-2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2019, IDG Kabupaten Tanah Bumbu tercatat sebesar 67,05. Angka ini menunjukkan kontribusi perempuan dalam berbagai sektor publik, meskipun masih banyak ruang untuk peningkatan. Pada tahun berikutnya, 2020, IDG sedikit meningkat menjadi 67,23, mencerminkan adanya upaya

pemberdayaan perempuan yang mulai menunjukkan hasil positif. Namun, IDG mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022, menjadi masing-masing 66,87 dan 65,72. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan atau meningkatkan pemberdayaan perempuan di Tanah Bumbu. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini bisa mencakup kurangnya kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan, kendala sosial dan budaya, atau dampak dari kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil.

Pada tahun 2023, IDG kembali meningkat secara signifikan sebanyak 2,03 poin menjadi 67,75. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam peranan perempuan dalam bidang publik di Kabupaten Tanah Bumbu. Angka ini juga mencerminkan adanya keberhasilan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan yang telah diterapkan.

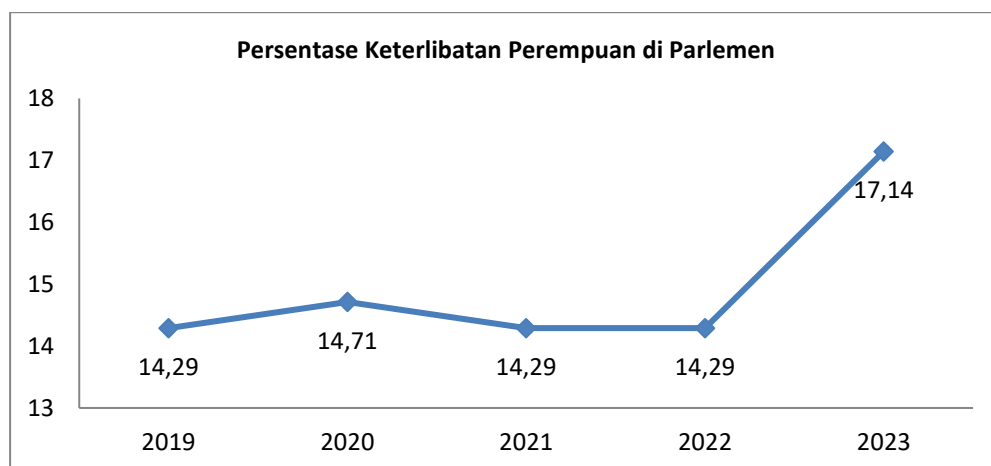
Menggali lebih dalam, keterlibatan perempuan di parlemen, yang diukur melalui keanggotaan di DPRD, adalah salah satu komponen penting dalam IDG. Perempuan yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan politik dapat memberikan perspektif berbeda yang memperkaya kebijakan publik. Selain itu, peran perempuan sebagai tenaga profesional di bidang ekonomi diukur melalui jumlah perempuan yang bekerja sebagai pekerja profesional, teknisi, dan pekerja terampil. Penguasaan sumber daya ekonomi juga merupakan indikator penting, yang mencerminkan kontribusi pendapatan perempuan terhadap ekonomi keluarga dan daerah.

Secara keseluruhan, perkembangan IDG dari tahun 2019 hingga 2023 di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan pola fluktuasi dengan peningkatan signifikan di tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pemberdayaan perempuan, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik. Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan politik, serta penguatan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, menjadi kunci penting untuk mendorong IDG lebih tinggi di masa mendatang.

2.3.2 DIMENSI PEMBENTUK INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)

A. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Partisipasi perempuan di parlemen merupakan salah satu indikator kunci dalam IDG. Partisipasi perempuan di parlemen diwakili oleh indikator proporsi keterwakilan perempuan di DPR. Indikator ini menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Keikutsertaan di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan.



Gambar 2.12 Perkembangan Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen 2019-2023

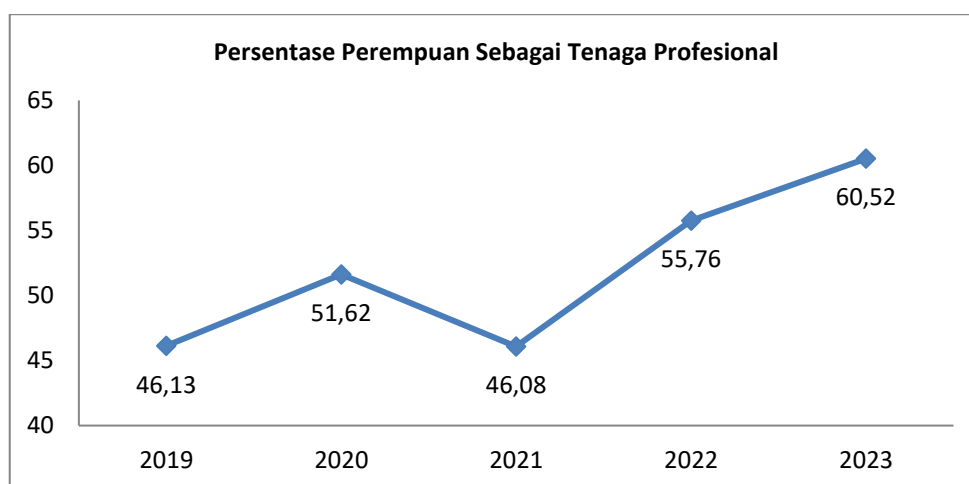
Sumber: Badan Pusat Statistik

Data menunjukkan fluktuasi dalam persentase keterlibatan perempuan di parlemen dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, keterlibatan perempuan tercatat sebesar 14.29 persen, meningkat sedikit menjadi 14.71 persen pada tahun 2020. Namun, terjadi penurunan kembali ke 14.29 persen pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023, ada peningkatan signifikan menjadi 17.14 persen. Tren ini menunjukkan upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, meskipun masih perlu lebih banyak langkah untuk mencapai kesetaraan yang diinginkan.

Salah satu usaha untuk meningkatkan persentase keterlibatan perempuan di parlemen yaitu dengan menambah peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan partai politik, khususnya DPRD. Selain itu, masyarakat dapat lebih diedukasi bahwa perempuan sebenarnya juga mempunyai pengaruh di ranah politik sehingga layak dipilih dalam pemilu dan pilkada.

B. Perempuan Sebagai Tenaga Profesional

Peran perempuan sebagai tenaga profesional juga merupakan aspek penting dalam IDG. Aspek sosial budaya yang berkembang di Indonesia mengakibatkan perbedaan pandangan tentang pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap lebih cocok di sektor domestik, sedangkan laki-laki di sektor publik. Sebagian perempuan yang memutuskan untuk masuk ke dunia kerja pun tak jauh dari pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Padahal seharusnya perempuan mempunyai peluang dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan di dunia kerja.



Gambar 2.13 Perkembangan Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

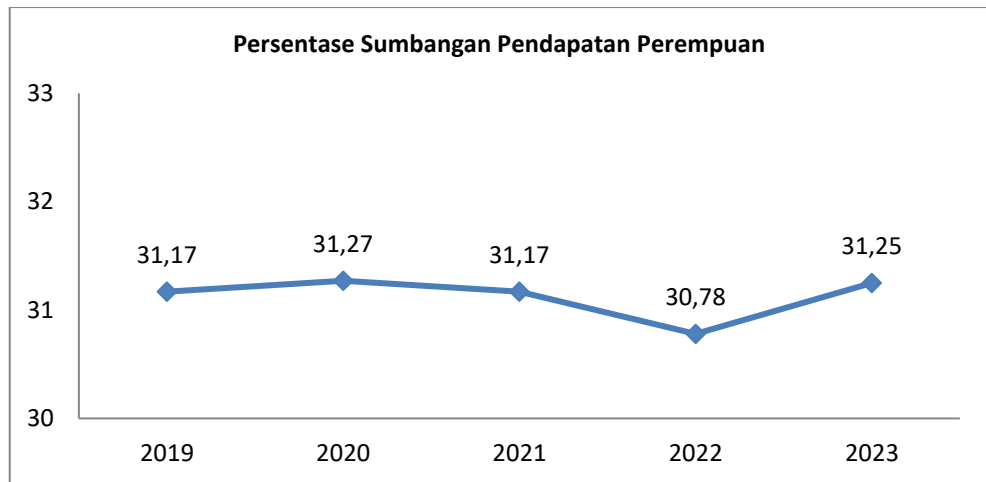
Data menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dalam persentase perempuan sebagai tenaga profesional selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, persentase perempuan di posisi ini sebesar 46.13 persen, meningkat signifikan menjadi 51.62 persen pada tahun 2020. Namun,

terjadi penurunan menjadi 46.08 persen pada tahun 2021. Setelah itu, ada peningkatan yang cukup besar pada tahun 2022 menjadi 55.76 persen dan lebih lanjut meningkat menjadi 60.52 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam keterlibatan perempuan dalam dunia profesional, yang penting untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan.

Dengan demikian, peranan perempuan dalam dimensi ini tergolong sudah baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Upaya yang dapat dilakukan agar capaian ini dapat dipertahankan yaitu menjaga peluang keterlibatan perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi. Selain itu, peningkatan dari segi kualitas perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi juga harus selalu ditingkatkan dengan cara pelatihan *softskill* maupun *hardskill*.

C. Sumbangan Pendapatan Perempuan

Sumbangan pendapatan perempuan adalah indikator lain yang mengukur pemberdayaan ekonomi perempuan. Perempuan yang berdaya dapat dilihat dari kondisi finansial perempuan. Keterbatasan kontribusi perempuan dalam perekonomian sering terjadi karena adanya diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja.



Gambar 2.14 Perkembangan Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2019, sumbangan pendapatan perempuan tercatat sebesar 31.17 persen, sedikit meningkat menjadi 31.27 persen pada tahun 2020. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing menjadi 31.17 persen dan 30.78 persen. Pada tahun 2023, ada sedikit peningkatan menjadi 31.25 persen. Meskipun ada fluktuasi, data ini menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam perekonomian tetap penting, dan perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pendapatan yaitu lebih meningkatkan peluang perempuan untuk bekerja dan menambah lapangan pekerjaan untuk perempuan. Selain itu, lebih meningkatkan pelatihan-pelatihan untuk menambah keahlian bagi perempuan.

Secara keseluruhan, analisis data menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi dalam beberapa indikator, tren umum menunjukkan peningkatan dalam pemberdayaan perempuan di berbagai dimensi. Keterlibatan perempuan di parlemen mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023, menunjukkan kemajuan dalam representasi politik perempuan. Selain itu, peningkatan persentase perempuan sebagai tenaga profesional menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam keterlibatan perempuan

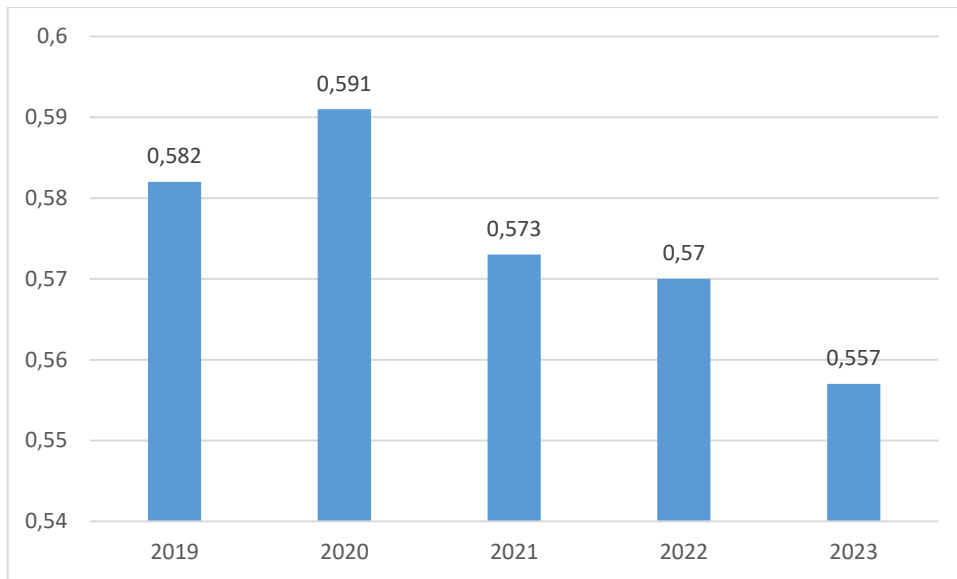
dalam sektor publik dan profesional. Namun, sumbangan pendapatan perempuan menunjukkan fluktuasi, menyoroti perlunya kebijakan yang lebih fokus untuk meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan. Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan keterlibatan perempuan di berbagai bidang akan sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih besar di masa depan.

2.4. INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)

2.4.1 PENJELASAN UMUM INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)

Seiring dengan stabilnya pembangunan ekonomi nasional, ketimpangan gender di Kabupaten Tanah Bumbu turut menunjukkan perbaikan. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Tanah Bumbu selama lima tahun terakhir turun secara konsisten. Sejak tahun 2019 hingga 2023, IKG berkurang sebesar 0,025 poin atau rata-rata turun 0,005 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin menyempit atau kesetaraan yang semakin membaik.

Pada Tahun 2021 capaian IKG Kabupaten Tanah Bumbu turun cukup dalam yaitu sebesar 0,018 poin menjadi 0,573. Penurunan ini tercatat sebagai perubahan terdalam IKG dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selanjutnya, IKG Kabupaten Tanah Bumbu terus mengalami penurunan meskipun terjadi perlambatan yaitu sebesar 0,003 poin pada tahun 2022 dan sebesar 0,013 poin pada tahun 2023. Gambaran lengkap tren IKG dari tahun 2019 hingga 2023 beserta perubahan nilainya dapat dilihat pada Gambar 2.16.



Gambar 2.15 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tanah Bumbu, 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan tren positif dengan penurunan ketimpangan gender secara konsisten selama lima tahun terakhir. Dari tahun 2019 hingga 2023, IKG berkurang sebesar 0.025 poin atau rata-rata turun 0.005 poin per tahun. Penurunan IKG ini mengindikasikan peningkatan kesetaraan gender di wilayah tersebut. Pada tahun 2021, IKG Kabupaten Tanah Bumbu turun signifikan sebesar 0.018 poin menjadi 0.573, yang merupakan penurunan terdalam dalam lima tahun terakhir. Tren penurunan ini terus berlanjut dengan penurunan sebesar 0.003 poin pada tahun 2022 dan 0.013 poin pada tahun 2023.

2.4.2 DIMENSI PEMBENTUK KETIMPANGAN GENDER

Indeks Ketimpangan Gender adalah sebuah indeks komposit yang dibangun dari lima indikator yang menggambarkan tingkat kesetaraan gender di suatu wilayah. Untuk mengkaji apa yang menjadi determinan utama perubahan nilai IKG Indonesia, maka pembahasan akan kembali kepada tren atau perkembangan indikator atau dimensi pembentuk IKG, yaitu kesehatan, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Tabel 2.5 Perkembangan Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten Tanah Bumbu, 2019-2023

Dimensi/Indikator	Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022	2023
Kesehatan Reproduksi						
MTF	Perempuan	0,325	0,466	0,318	0,295	0,237
MHPK20	Perempuan	0,404	0,416	0,421	0,353	0,390
Pemberdayaan						
Keterwakilan di Legislatif (%)	Laki-Laki	85,71	85,29	85,71	85,71	82,86
	Perempuan	14,29	14,71	14,29	14,29	17,14
Pendidikan SMA ke atas (%)	Laki-Laki	34,42	31,52	30,01	33,89	33,64
	Perempuan	25,19	26	26,75	27,55	26,45
Pasar Tenaga Kerja						
TPAK (%)	Laki-Laki	84,64	85,78	85,91	84,63	91,06
	Perempuan	46,54	52,86	48,79	42,8	45,01

Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara keseluruhan, ketiga dimensi pembentuk IKG secara konsisten mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari perkembangan masing-masing indikator yang terus menunjukkan tren perubahan positif. Dimensi yang pertama yaitu dimensi kesehatan reproduksi menunjukkan tren membaik. Persentase perempuan yang memiliki risiko terkait dengan kesehatan reproduksi semakin menurun.

Di sisi lain, dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja secara berkelanjutan menunjukkan perubahan ke arah yang semakin setara. Perkembangan indikator penyusun Indeks Ketimpangan Gender (IKG) selama 2019–2023 dapat dilihat di Tabel (diatas). Dalam 5 tahun terakhir pernah terjadi peningkatan ketimpangan gender yaitu pada tahun 2020 yang naik 0,009 poin, utamanya dipengaruhi oleh meningkatnya ketimpangan dalam dimensi kesehatan reproduksi. Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) meningkat dari 32,5 persen pada tahun 2019 menjadi 46,6 persen pada tahun 2020, sementara proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama

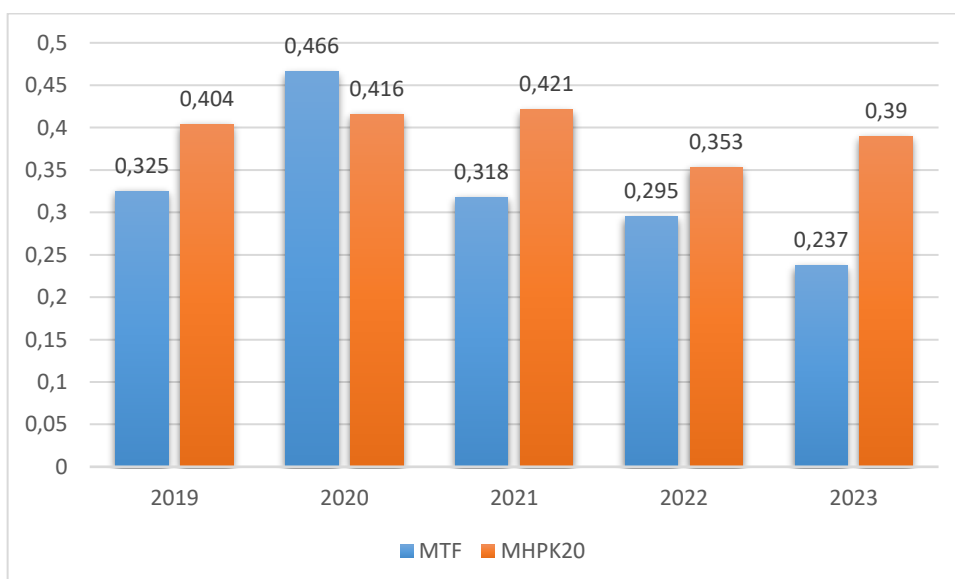
berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20) naik dari 40,4 persen pada tahun 2019 menjadi 41,6 persen pada tahun 2020.

A. DIMENSI KESEHATAN REPRODUKSI

Dimensi kesehatan reproduksi perempuan dibentuk dari 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF); dan
2. Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20).

Pada tahun 2019, angka MTF mencapai sebesar 32,5 persen, sempat mengalami kenaikan menjadi 46,6 persen pada tahun 2020 dan kemudian secara berkala sesuai tren yang diinginkan yaitu turun hingga menjadi 23,7 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan layanan kesehatan masyarakat, terutama kaum perempuan, cukup berhasil. Pada tahun 2019, ada lebih dari 23 persen perempuan usia 15-49 tahun tidak melahirkan di fasilitas kesehatan. Jumlah ini terus menurun hingga pada tahun 2023 hanya terdapat 12 dari 50 perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan.



Gambar 2.16 Indikator Dimensi Kesehatan Reproduksi, 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

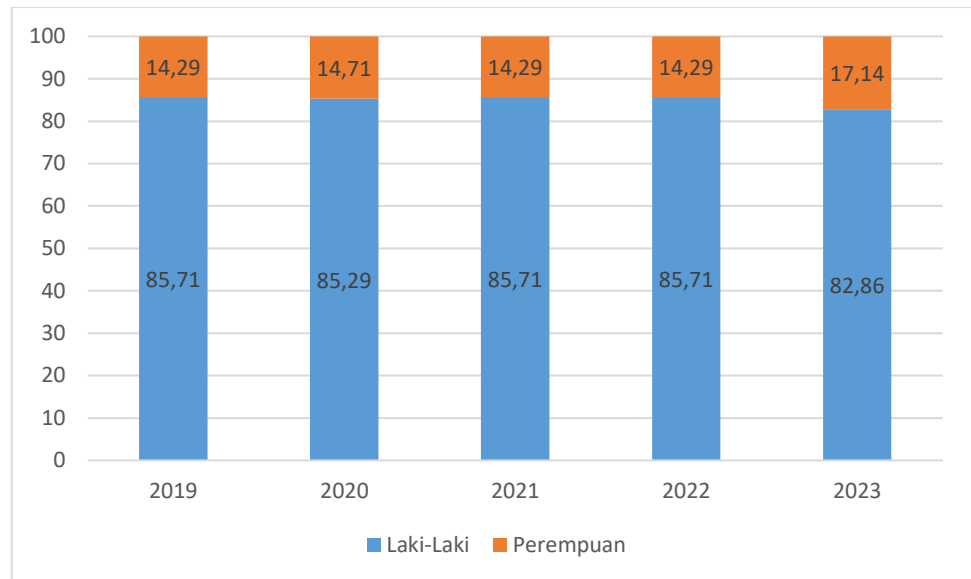
Indikator dimensi kesehatan reproduksi selanjutnya adalah indikator MHPK20 yang cenderung berfluktuasi selama tahun 2019–2023. Pada 2019, MHPK20 tercatat sebesar 40,4 persen, yang berarti 4 dari 100 perempuan usia 15-49 tahun ketika melahirkan anak lahir hidup pertama masih berusia kurang dari dua puluh tahun. Jumlah ini kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 41,6 persen dan tahun 2021 menjadi 42,1 persen. Pada tiga tahun berikutnya MHPK20 kembali turun menjadi 35,3 persen, tetapi kemudian meningkat kembali pada 2023 menjadi 39 persen.

Jika dilihat dari pola perubahan per tahun kedua indikator dimensi kesehatan reproduksi, maka dapat disimpulkan bahwa kedua indikator membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda. Indikator MTF sudah menunjukkan perubahan positif berkelanjutan yang penting untuk dijaga. Namun tidak demikian halnya dengan indikator MHPK20 yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Dibutuhkan edukasi kepada masyarakat mengenai kesehatan reproduksi serta kehamilan di usia yang sudah matang baik dari segi mental maupun fisik.

B. DIMENSI PEMBERDAYAAN

Dimensi pemberdayaan dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Persentase anggota legislatif; dan
2. Persentase penduduk 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas.



Gambar 2.17 Persentase Anggota Legislatif Laki-laki dan Perempuan, 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

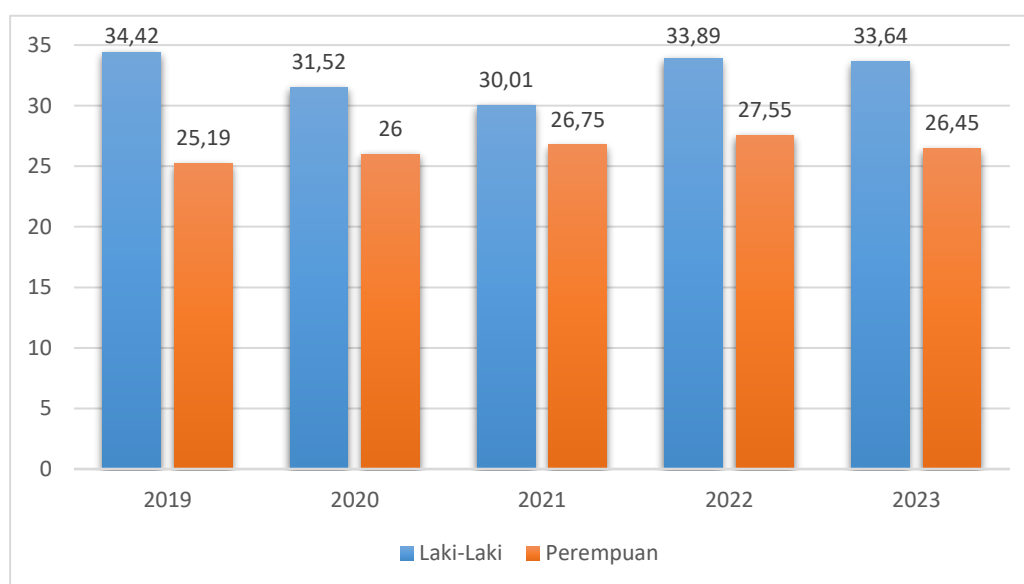
Selama periode tahun 2019 hingga 2023, persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif cenderung mengalami peningkatan. Persentase perempuan di legislatif menunjukkan tren peningkatan dari 14.29% pada tahun 2019 menjadi 17.14% pada tahun 2023. Meskipun ada penurunan pada tahun 2021 (14.29%), peningkatan pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan yang semakin setara.

Kondisi ini merepresentasikan peran perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan yang cenderung semakin setara. Meski demikian, terdapat sedikit penurunan pada tahun 2021 dibanding 2020. Fenomena penurunan ini dapat diakibatkan oleh banyak hal, terutama dinamika politik baik di pusat maupun di daerah. Sebagaimana diketahui, persentase anggota legislatif sangat tergantung terhadap hasil pemilihan umum yang berlangsung lima tahun sekali dan adanya pergantian antarwaktu (PAW) yang sepenuhnya menjadi kewenangan partai politik peserta pemilu.

Dengan demikian, umumnya jumlah persentase anggota legislatif antartahun tidak mengalami banyak perubahan, kecuali di tahun politik atau di tahun dilaksanakannya pemilu. Tahun 2021 bukanlah tahun pemilu, sehingga menurunnya persentase anggota legislatif perempuan murni dikarenakan adanya mekanisme pergantian antarwaktu yang terjadi di internal partai politik.

Sementara itu, indikator penduduk usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas dalam kurun waktu yang sama juga cenderung mengalami peningkatan untuk penduduk perempuan. Persentase perempuan lulusan SMA ke atas meningkat 1,26 persen poin dari 25,19 persen pada tahun 2019 menjadi 26,45 persen pada tahun 2023. Sementara itu untuk penduduk laki-laki cenderung mengalami fluktuasi naik turun. Persentase laki-laki lulusan SMA ke atas menurun 0,78 persen poin dari 34,42 persen pada tahun 2019 menjadi 33,64 persen pada tahun 2023. Peningkatan pendidikan perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki membuat tingkat pendidikan antara perempuan dan laki-laki cenderung lebih setara.

Dengan “gap” antara pendidikan tinggi perempuan dan laki-laki yang semakin kecil, maka indikator pendidikan tinggi ini menjadi salah satu indikator yang paling menjanjikan untuk segera mendapatkan titik keseimbangan atau berada pada kondisi yang sepenuhnya setara antara laki-laki dan perempuan.



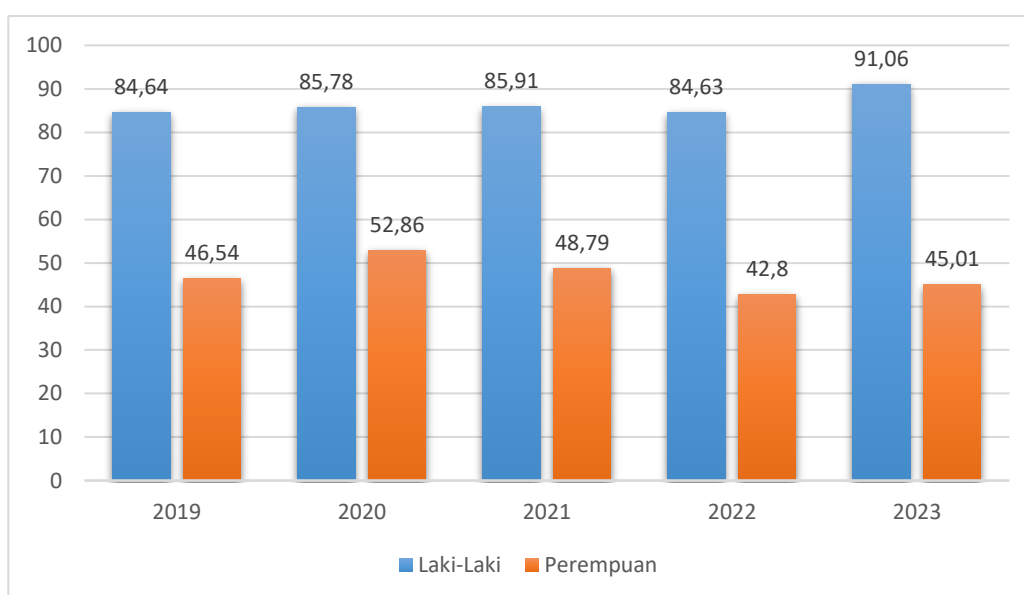
Gambar 2.18 Persentase Laki-laki dan Perempuan dengan Pendidikan SMA ke Atas, 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

C. DIMENSI PASAR TENAGA KERJA

Dimensi terakhir dari Indeks Ketimpangan Gender adalah dimensi pasar tenaga kerja, yang mencerminkan kesamaan peluang antara kaum laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses yang adil terhadap sumber ekonomi utama yaitu lapangan pekerjaan. Dimensi pasar tenaga kerja direpresentasikan dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Selama periode tahun 2019–2023, TPAK perempuan dan laki-laki terus meningkat. TPAK laki-laki pada tahun 2019 tercatat sebesar 84,64 persen, meningkat 6,42 persen poin menjadi 91,06 persen pada tahun 2023. Sementara TPAK perempuan menurun 1,53 persen poin dari 46,54 persen pada tahun 2019 menjadi 45,01 persen pada tahun 2023.



Gambar 2.19 Tingkat Partisipasi Angkatan (TPAK) laki-laki dan Perempuan (persen), 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama periode tahun 2019 hingga 2023, persentase TPAK perempuan cenderung mengalami fluktuasi naik turun dan mengalami nilai tertinggi pada tahun 2020 yang mencapai 52,86 persen. Hal itu tidak lain merupakan efek pandemic Covid-19 yang mengakibatkan banyak pemutusan hubungan kerja dan sulitnya mencari kerja dan memulai usaha. Peningkatan level pendidikan

perempuan seperti yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya, juga turut menjadi salah satu katalis bagi perempuan untuk meningkatkan partisipasinya di pasar tenaga kerja. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, tentu menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing kaum perempuan di pasar tenaga kerja.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa fluktuasi dalam indikator-indikator tertentu, tren umum menunjukkan peningkatan kesetaraan gender di Kabupaten Tanah Bumbu. Perbaikan dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan IKG secara keseluruhan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik.



PDRB Kabupaten Tanah Bumbu

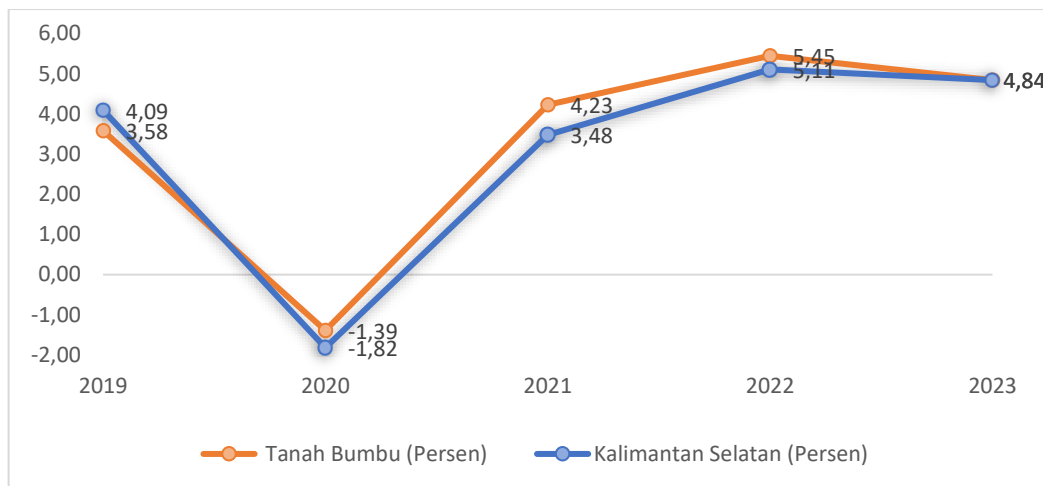
"Meningkatkan sektor perekonomian adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu"

3.1 PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STRUKTUR PEREKONOMIAN MENURUT KATEGORI

3.1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT KATEGORI

Kabupaten Tanah Bumbu, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki perkembangan ekonomi yang menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Analisis terhadap beberapa sektor utama ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu memberikan gambaran tentang kondisi perekonomian daerah ini, mencakup pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), distribusi sektor ekonomi, serta indikator ekonomi lainnya yang relevan.

PDRB merupakan indikator utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Secara absolut, nilai PDRB Kabupaten Tanah Bumbu atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2023, PDRB Kabupaten Tanah Bumbu atas dasar harga berlaku telah mencapai Rp 33,66 triliun, atau bertambah Rp2,05 triliun dari tahun 2022 yang sebesar Rp31,61 triliun. Sementara itu, nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp16,92 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp17,74 triliun.



Gambar 3.1 Perkembangan PDRB Kategori Pertambahan dan Penggalian Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu dan BPS Provinsi Kalimantan Selatan (diolah)

Secara persentase, pergerakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu pada periode 2021-2023, yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan terus tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan. Pertumbuhan ekonomi terendah di Kabupaten Tanah Bumbu terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -1,39 persen, sedangkan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,45 persen.

Berdasarkan perkembangan internal dan dinamika ekonomi yang terjadi beberapa tahun terakhir, kinerja pembangunan perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun 2022, artinya bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2023 relatif sedikit lebih rendah dari kondisi tahun 2022. Jika tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 5,45 persen, maka pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai sebesar 4,84 persen.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Tanah Bumbu Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019 – 2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,16	0,93	2,23	4,26	1,10
B	Pertambangan dan Penggalian	0,74	(2,66)	1,98	5,51	5,37
C	Industri Pengolahan	2,49	(4,64)	32,72	8,21	4,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,64	4,30	4,95	7,64	8,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,69	6,87	6,35	2,48	2,12
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	5,54	(1,11)	1,76	4,15	4,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,21	(4,05)	0,36	4,60	3,10
H	Transportasi dan Pergudangan	6,69	(3,76)	1,38	9,71	13,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,81	(0,47)	1,99	7,47	9,21
J	Informasi dan Komunikasi	7,48	8,47	7,33	7,42	6,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,80	3,35	(2,78)	(0,41)	5,24
L	Real Estat	8,71	5,45	4,01	4,81	4,04
M,N	Jasa Perusahaan	8,86	(1,13)	3,02	6,73	6,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,22	(3,48)	3,78	1,94	4,59
P	Jasa Pendidikan	8,52	1,07	1,10	3,52	4,58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,10	8,62	8,10	3,16	2,84
R,S,T, U	Jasa lainnya	7,99	(1,60)	1,22	6,70	5,06
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		3,58	(1,39)	4,23	5,45	4,84

* *Angka sementara/Preliminary Figures*

** *Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

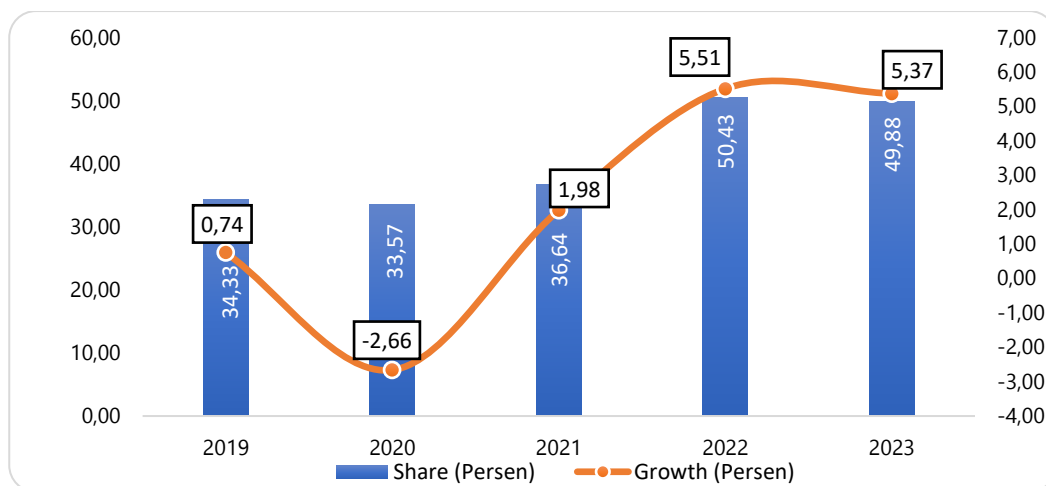
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan yang tetap tinggi di kategori sekunder dan tersier seperti kategori pengadaan listrik dan gas, penyediaan makan dan minum serta transportasi dan pergudangan. Pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut dialami oleh kategori transportasi dan pergudangan 13,08 persen, kategori penyediaan makan dan minum 9,21 persen, kategori pengadaan listrik dan gas 10,55 persen, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib 9,71 persen, kategori konstruksi 9,48 persen, kategori jasa perusahaan 8,11 persen, kategori jasa keuangan dan asuransi 8,04 persen, dan kategori jasa pendidikan 6,76 persen.

Sektor primer dalam perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu yaitu kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan serta kategori pertambangan dan penggalian, pertumbuhannya relatif lebih kecil dibandingkan kategori yang lain namun apabila dibandingkan tahun sebelumnya pertumbuhannya cenderung lebih besar. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu lebih tinggi daripada tahun sebelumnya.

3.1.2 STRUKTUR EKONOMI MENURUT KATEGORI

A. Kategori Pertambangan dan Penggalian

Pertambangan dan Penggalian merupakan lapangan usaha dengan *share* terbesar dalam menyusun Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tanah Bumbu. Walaupun memiliki kecenderungan kontribusi terhadap PDRB yang menurun dalam tujuh tahun terakhir, namun Kategori Pertambangan dan Penggalian masih menyumbangkan lebih dari 49 persen total PDRB Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2023.

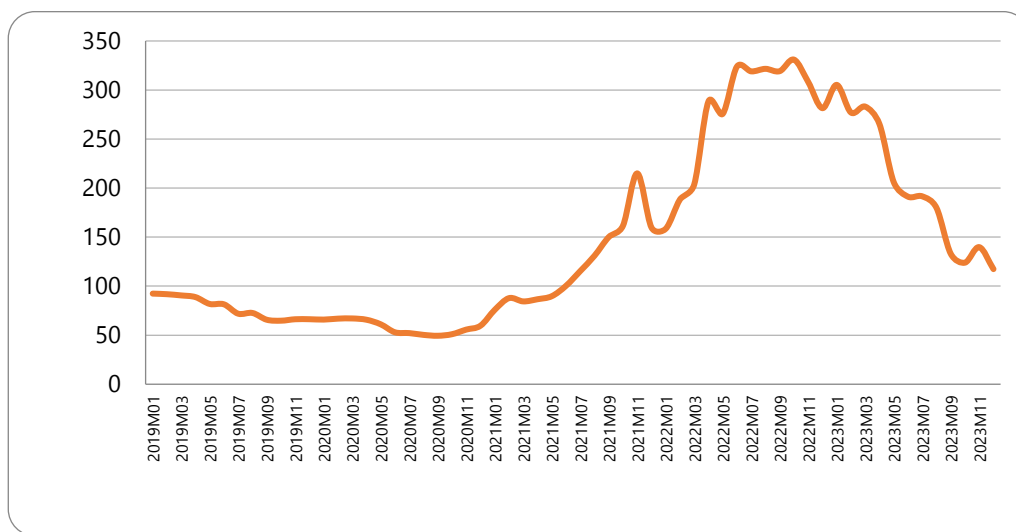


**Gambar 3.2 Perkembangan PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023**

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu (diolah)

Kinerja kategori pertambangan dan penggalian di Provinsi Kalimantan Selatan termasuk di Kabupaten Tanah Bumbu sangat tergantung pada kondisi perekonomian global, karena komoditas yang dihasilkan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah batu bara yang merupakan komoditas unggulan ekspor. Dengan kata lain, produksi batu bara Kabupaten Tanah Bumbu sangat tergantung pada *demand* di negara tujuan ekspornya. Beberapa negara seperti China, India, Jepang, dan Korea Selatan merupakan tujuan utama ekspor batu bara Indonesia. Walaupun sempat mengalami percepatan pertumbuhan pada tahun 2022, namun aktivitas pertambangan dan penggalian kembali melesu pada tahun 2023.

Selain dipengaruhi oleh berkurangnya produksi batu bara, harga acuan untuk komoditas batu bara dunia juga terus mengalami penurunan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Harga acuan batu bara sempat mencapai lebih dari 300 US\$/MT pada bulan Oktober tahun 2022, dan mengalami penurunan tajam hingga mencapai 117 US\$/MT pada akhir 2023. Pertumbuhan PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian menyentuh angka 5,51 persen tahun 2023 naik secara signifikan setelah terjun bebas ke angka negatif 2.66 persen di tahun 2020. Akan tetapi, angka ini mengalami perlambatan ke angka 5,37 persen pada tahun 2023.



Gambar 3.3 Perkembangan Harga Komoditas Batu Bara Tahun 2019-2023 (US\$/MT)

Sumber: *World Bank Commodity Price Data*

Apabila dilihat dari kontribusinya, meskipun kategori pertambangan dan penggalian masih merupakan kontributor utama pembentukan nilai tambah di Kabupaten Tanah Bumbu, namun besaran kontribusinya makin menurun dalam beberapa tahun belakangan. Hal ini seiring dengan perlambatan produksi yang terjadi terkait dengan penurunan demand dan penurunan harga komoditas kategori ini dalam waktu yang bersamaan.

Apabila dilihat berdasarkan perizinannya, perusahaan pertambangan batu bara yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perusahaan dengan izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUP-OP). Menurut data ESDM tercatat lebih dari 30 persen IUP Batubara di wilayah Kalsel berada di Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagian besar perusahaan pertambangan batu bara di Kabupaten Tanah Bumbu menggunakan izin IUP-OP, namun terdapat juga beberapa perusahaan besar yang menggunakan izin PKP2B seperti PT. Arutmin Indonesia yang beroperasi di Kecamatan Batulicin dan Kecamatan Satui, PT. Borneo Indobara, dan PT. Wahana Baratama Mining.

Batu bara merupakan komoditas global yang pergerakannya sangat bergantung pada kondisi perekonomian global. Apabila terjadi guncangan atau resesi pada perekonomian dunia, sektor pertambangan termasuk batu bara ini akan mempunyai potensi terkena dampak resesi. Batu bara juga merupakan jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga apabila eksploitasi berlebihan terhadap komoditas ini maka bukan tidak mungkin suatu saat nanti akan habis dan tidak mampu menopang perekonomian. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa komoditas unggulan selain batu bara yang nantinya mampu menggerakkan perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka panjang. Kelesuan penambangan batu bara di satu sisi memberikan nilai positif di sisi lain di sisi lain ada juga negatifnya.

Beberapa penelitian menunjukkan dampak negatif tambang batu bara terhadap tanah, air dan udara. Jika permukaan batu bara yang mengandung pirit (besi sulfide) berinteraksi dengan air dan udara maka akan terbentuk asam sulfat. Jika terjadi hujan di daerah pertambangan, maka asam sulfat tersebut akan bergerak sepanjang aliran air, dan sepanjang terjadinya hujan di daerah pertambangan maka produksi asam sulfat terus terjadi, baik selama penambangan beroperasi maupun tidak. Jika batu bara pada tambang terbuka, seluruh lapisan yang terbuka berinteraksi dengan air dan menghasilkan asam sulfat, maka akan merusak kesuburan tanah dan pencemaran sungai mulai terjadi akibat kandungan asam sulfat yang tinggi, hal ini berdampak pada terbunuhnya ikan-ikan di sungai, tumbuhan, dan biota air yang sensitif terhadap perubahan pH yang drastis. Walaupun menjadi pembentuk utama perekonomian di Kabupaten Tanah Bumbu, namun penambangan batu bara juga membawa dampak pada kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Bumbu.

Selain itu, penambangan batu bara juga menghasilkan gas metana, gas ini mempunyai potensi sebagai gas rumah kaca. Berdasarkan penelitian, kontribusi gas metana yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, memberikan kontribusi sebesar 10,5 persen pada emisi gas rumah kaca. Dari hasil panel antar Pemerintah Negara anggota PBB tentang Perubahan Iklim, gas metana mempunyai potensi pemanasan global 21 kali lebih besar dibandingkan dengan

karbon dioksida selama 100 tahun terakhir. Jika PLTU batu bara menghasilkan bahaya pada emisi hasil bakarnya, maka proses penambangan batu bara dapat menghasilkan gas-gas berbahaya. Gas-gas berbahaya ini dapat menimbulkan ancaman bagi para pekerja tambang dan merupakan sumber polusi udara. Di samping itu penambangan batu bara merusak vegetasi yang ada, menghancurkan satwa liar dan habitatnya, degradasi kualitas udara, mengubah pemanfaatan lahan dan hingga pada batas tertentu dapat mengubah topografi umum daerah penambangan secara permanen.

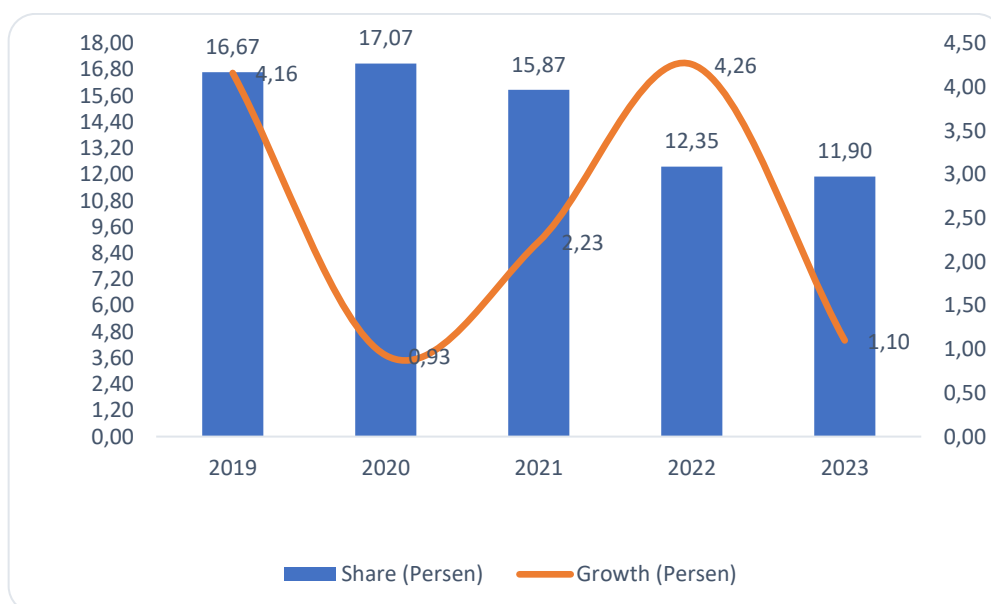
Kesadaran global untuk mengurangi emisi karbon seperti kesepakatan Paris pada akhir 2015 mendorong negara-negara peserta untuk mengurangi suhu global. Salah satunya dengan menekan konsumsi energi berbasis fosil, dimana salah satunya adalah batu bara selain minyak dan gas. China sebagai tujuan utama ekspor batu bara Kabupaten Tanah Bumbu mulai mengurangi pasokan energi batu bara dan mulai beralih ke pembangkit listrik tenaga matahari dan angin. Di India juga ada kebijakan dari Perdana Menteri yang baru untuk mengoptimalkan potensi batu bara dalam negerinya. Sudah ada kebijakan pihak swasta boleh masuk dan menggarap tambang batu bara di India. Dengan demikian diperkirakan produksi batu bara nasional India akan meningkat dan berpengaruh pada impor India akan komoditas batu bara.

B. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Terdapat tiga subkategori yang tercakup dalam kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencakup yaitu subkategori Pertanian; subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu; dan subkategori Perikanan. Subkategori Pertanian sendiri meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Keseluruhan penyusun kategori ini memiliki peran yang cukup vital dalam perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu, selain dari segi *share* PDRB serta penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2023 kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berada pada urutan kedua penyumbang PDRB terbesar dengan kontribusi 16,59 persen terhadap PDRB Kabupaten Tanah Bumbu. Pada tahun 2020 terjadi perlambatan pada pertumbuhan beberapa sektor penggerak utama perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu seperti Pertambangan dan Penggalian serta sektor Industri Pengolahan akibat terkena dampak pandemi COVID-19, namun sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap memiliki pertumbuhan positif sebesar 0,9 persen. Hal ini menunjukkan kondisi pertanian Tanah Bumbu yang cukup stabil dan mampu mendorong perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu di saat sektor utama lainnya sedang melesu.

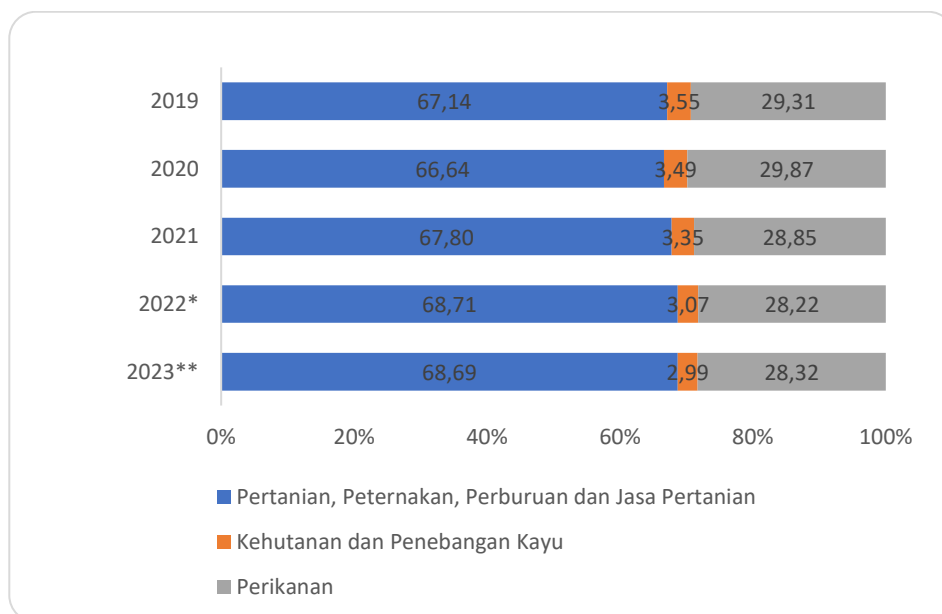
Selain pertumbuhan yang cukup stabil, kontribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meningkat menjadi 12,35 persen pada tahun 2022. Sayangnya, di tahun 2023, kontribusi sektor ini mengalami sedikit penurunan ke angka 11,90 persen dikarenakan terjadi penurunan produksi padi pada beberapa kecamatan yang mengalami banjir di bulan Januari dan November, turunnya harga gabah, fenomena Siklon Tropis yang mengganggu aktivitas nelayan melaut, dan tercemarnya air sungai di kecamatan yang memiliki lapangan usaha pertambangan yang menyebabkan nelayan tidak dapat mencari ikan.



Gambar 3.4 Perkembangan PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu (diolah)

Sub kategori Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan membentuk lebih dari 60 persen PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kontribusi sub kategori Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2019, sub kategori ini memiliki kontribusi sebesar 67,14 persen kemudian meningkat menjadi 68,69 persen pada tahun 2023. Sedangkan *share* dari sub kategori perikanan mengalami tren yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 dan 2020 *share* sub kategori perikanan berada pada angka 29,31 persen dan 29,88 persen. Akan tetapi, semenjak tahun 2021 sampai 2023 mengalami sedikit penurunan kontribusi sebanyak kurang lebih 1-1,5% jika dibandingkan dengan tahun 2019-2020. Selanjutnya, sub kategori Kehutanan dan Penebangan memiliki *share* yang cenderung stabil antara 2-3 persen dari total PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selama tahun 2019-2023.

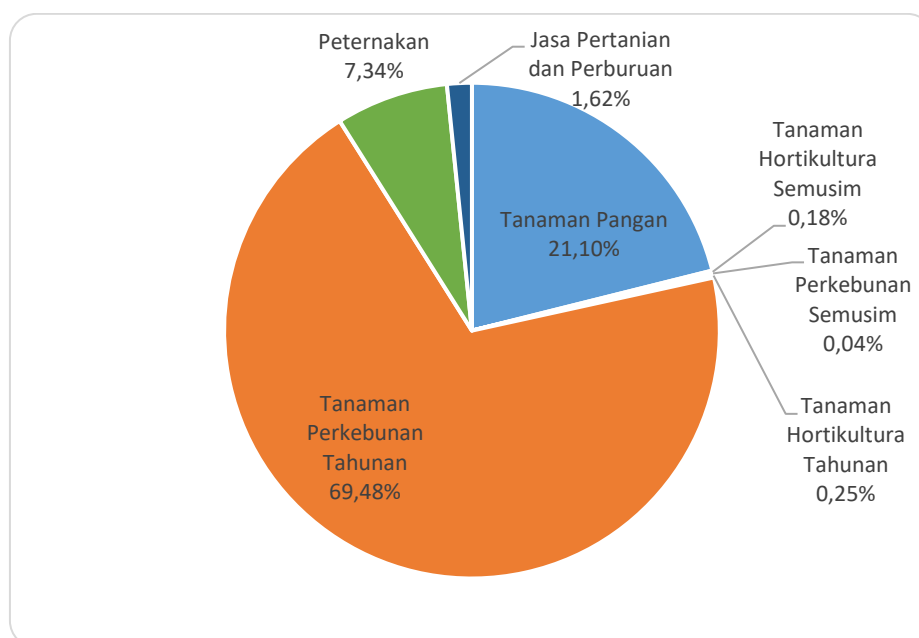


Gambar 3. 5 Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Tanah Bumbu (Persen), 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu (diolah)

Berbagai produk perikanan potensial di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan bahwa hal ini sejalan dengan salah satu misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mewujudkan perekonomian daerah berbasis pengembangan potensi maritim dan agroindustri.

Selain itu, wilayah Kabupaten Tanah Bumbu terkenal dengan potensi hasil perkebunan kelapa sawit dan karet. Hampir 70 persen penyusun PDRB Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan adalah tanaman perkebunan. Produk yang dihasilkan dari kedua jenis komoditi tersebut adalah Crude Palm Oil (CPO) yang berasal dari industri pengolahan kelapa sawit serta SIR20 yang berasal dari industri pengolahan tanaman karet. Tanaman pangan menjadi penyusun terbesar kedua pada PDRB Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan. Merupakan hal yang wajar jika kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki penyerapan tenaga kerja yang cukup besar karena Kabupaten Tanah Bumbu memiliki berbagai industri besar untuk pengolahan komoditi kelapa sawit dan karet.



Gambar 3.6 Persentase Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian (Persen) Tahun 2023

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu (diolah)

Selain kelapa sawit yang menjadi komoditas andalan, komoditas perkebunan lainnya, seperti karet memiliki potensi yang tidak kalah pentingnya. Produksi karet alam Kabupaten Tanah Bumbu masih disokong oleh perkebunan karet rakyat dan perkebunan besar Negara (PTPN). Tantangan dalam usaha meningkatkan produksi karet adalah pembinaan terhadap perkebunan rakyat agar dapat meningkatkan produktivitas. Kabupaten Tanah Bumbu telah memiliki beberapa industri pengolahan karet mentah menjadi karet setengah jadi. Jika suatu wilayah dapat memproduksi karet menjadi produk jadi atau barang akhir tentu dapat memiliki nilai tambah yang semakin tinggi. Oleh karena itu, hilirisasi produk secara lebih luas tetap diperlukan agar dapat meningkatkan nilai tambah PDRB dan terlebih lagi dapat menjangkau perkebunan karet di pelosok-pelosok Tanah Bumbu.

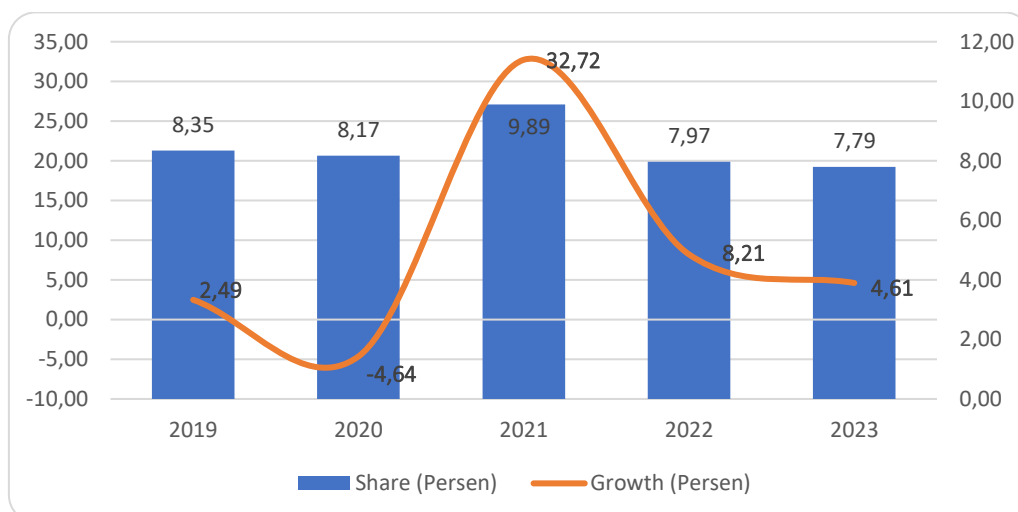
Subkategori tanaman pangan juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam membentuk PDRB pertanian. Subkategori tanaman pangan yang berfungsi sebagai penyangga ketahanan pangan daerah juga harus semakin ditingkatkan kinerjanya. Tanaman pangan mengambil porsi sekitar 19,43 persen dari nilai tambah kategori Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian, dengan komoditi utamanya adalah padi baik padi sawah maupun padi ladang.

C. Kategori Industri Pengolahan

Terdapat 16 subkategori yang terangkum dalam kategori Industri Pengolahan mulai dari industri batubara dan pengilangan migas, makanan dan minuman, tekstil, kayu, kertas, karet, hingga industri pengolahan lainnya. Pada tahun 2023 Kategori Industri Pengolahan mengalami sedikit perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2022. Dalam lima tahun terakhir PDRB Kategori Industri Pengolahan mengalami perlambatan sejak tahun 2019 sampai hingga mencapai negatif 4,64 persen pada tahun 2020.

Akan tetapi, terjadi peningkatan yang signifikan mencapai 32,72 persen pada tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi dari industri makanan dan minuman seperti industri pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO) pada

tahun 2021 dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Walaupun produksi Industri Pengolahan pada tahun 2022 mengalami penurunan signifikan, namun *share* yang diberikan terhadap total PDRB masih berada pada angka lebih dari 7 persen, kemudian *share*nya mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 sebesar 0,18 persen dibandingkan tahun 2022.



Gambar 3.7 Perkembangan PDRB Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu (diolah)

Subkategori yang mendominasi kinerja industri manufaktur di Kabupaten Tanah Bumbu adalah industri makanan dan minuman. Produksi industri makanan dan minuman rata-rata mencapai lebih dari 71 persen dari total produksi industri pengolahan keseluruhan di Kabupaten Tanah Bumbu. Komoditas utama dari industri makanan dan minuman Kabupaten Tanah Bumbu adalah *Crude Palm Oil* (CPO). Komoditas tersebut menjadi kontributor terbesar kedua ekspor Kalimantan Selatan setelah batu bara. Oleh karena itu, kinerja industri makanan dan minuman Kalimantan Selatan tidak terlepas dari pengaruh dinamika perekonomian global. Perubahan harga komoditas sawit dunia akan berpengaruh pada harga pasaran CPO.

Tabel 3. 2 Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten Tanah Bumbu (Persen), 2019-2023

No	Subkategori	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
2	Industri Makanan dan Minuman	95,75	95,51	74,77	72,64	71,53
3	Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,11	0,12	0,09	0,08	0,09
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,83	0,87	0,64	0,58	0,54
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,03	0,03	21,89	24,29	25,51
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,83	0,90	0,72	0,66	0,52
10	Industri Barang Galian bukan Logam	1,18	1,23	0,92	0,84	0,88
11	Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	0,12	0,12	0,09	0,08	0,09
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	-	-	-	-	-
14	Industri Alat Angkutan	0,78	0,84	0,62	0,58	0,58
15	Industri Furnitur	0,25	0,26	0,19	0,17	0,17
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
C	Industri Pengolahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tanah Bumbu sebetulnya masih mampu memberikan potensi daya ungkit (*leverage*) yang lebih besar. Sebab sampai saat ini agroindustri sawit di Tanah Bumbu masih terbatas pada industri pengolahan CPO. Padahal industri turunan dari komoditas tersebut masih banyak yang bisa digarap semisal industri sabun, minyak goreng, bahan kecantikan, dan industri kimia lainnya yang menjadi turunannya. Potensi ini tentunya dapat membuka peluang investasi sehingga mampu memicu perluasan kesempatan kerja masyarakat. Tentunya hal ini harus diikuti keseriusan pemangku kebijakan untuk mendorong tumbuhnya agroindustri-agroindustri tersebut. Selain menjanjikan nilai tambah yang diyakini lebih besar, agroindustri juga akan menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi berkelanjutan (*sustainable*).

Selain ditopang oleh CPO, industri pengolahan di Kabupaten Tanah Bumbu juga memiliki prospek menjanjikan untuk komoditas karet. Industri karet juga menjadi pengungkit (*leverage*) bagi perkebunan karet yang banyak diusahakan oleh petani karet di Kabupaten Tanah Bumbu. Subkategori industri lainnya adalah industri barang galian bukan logam seperti batako, industri kayu dan industri alat angkutan berupa kapal, industri amplang dan industri kain tenun. Industri amplang dan tenun yang ada di Kota Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, merupakan ciri khas yang dapat dijadikan oleh-oleh atau cinderamata dari Tanah Bumbu. Industri tenun pagatan sendiri berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta pelestarian tradisi budaya dari masyarakat bugis Pagatan.

Semenjak pandemi Covid-19 dan di saat pertumbuhan ekonomi minus, industri kimia, farmasi dan obat tradisional justru mengalami perkembangan yang signifikan. Peningkatan yang berarti ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam beberapa tahun terakhir, industri ini hanya menyumbang sekitar 0,03 persen terhadap total produksi industri pengolahan tetapi industri ini meningkat menjadi 21,89 persen di tahun 2023. Salah satu alasan perkembangan industri ini adalah dibangunnya pabrik

biodiesel baru yaitu PT. Johnlin Agro Raya (JAR) yg diresmikan pada Bulan Oktober 2023 dengan total produksi mencapai 1.500 ton per hari.

Salah satu upaya untuk mendorong atmosfer industri di wilayah Tanah Bumbu menjadi lebih baik adalah dengan dukungan infrastuktur yang memadai seperti kondisi jalan sebagai arus keluar masuknya produk industri serta ketersediaan listrik yang menyeluruh. Infrastruktur yang baik dapat mendorong efisiensi industri. Misalnya saja dengan kemudahan arus transportasi, maka produk hasil industri baik yang berasal dari industri mikro maupun industri besar sedang dapat lebih mudah diekspor atau dijual ke luar daerah wilayah Tanah Bumbu dan pemasaran produk daerah menjadi lebih luas. Hal tersebut dapat meningkatkan PDRB dari sisi *Demand*. Secara keseluruhan, Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan kinerja ekonomi yang positif dengan pertumbuhan yang konsisten dalam berbagai sektor utama. Peningkatan PDRB, pertumbuhan sektor pertanian dan pertambangan, serta investasi infrastruktur yang signifikan adalah indikator yang menunjukkan bahwa perekonomian daerah ini berada di jalur yang baik untuk terus berkembang. Meskipun tantangan seperti pengangguran masih ada, upaya yang terus menerus dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memperkuat infrastruktur akan sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan.

3.2 PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STRUKTUR PEREKONOMIAN MENURUT PENGELUARAN

Mengukur perekonomian suatu wilayah dapat didekati melalui tiga pendekatan, yakni produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Ketiga pendekatan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam kegiatan ekonomi. Perubahan pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa akan berdampak pada perubahan produksi sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pula pada pendapatan. Perubahan pendapatan juga akan berpengaruh terhadap pengeluaran, karena naik turunnya pendapatan akan mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa. Kegiatan produksi akan mengikuti permintaan barang dan jasa ini. Sehingga,

dalam pengukuran ekonomi melalui penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung dengan tiga pendekatan tersebut.

Dari sisi pengeluaran, PDRB adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor institusi di dalam suatu wilayah. Sektor institusi tersebut adalah rumah tangga, badan usaha, pemerintahan dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga. Permintaan barang dan jasa untuk kegiatan ekonomi menurut System of National Account (SNA) tahun 2008, dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu konsumsi antara dan konsumsi/permintaan akhir. Konsumsi antara adalah produksi barang dan jasa yang dihasilkan digunakan sebagai *input* (bahan baku) untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi sedangkan konsumsi/permintaan akhir adalah produksi barang dan jasa yang dihasilkan digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir (institusi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah) dan komponen permintaan akhir lainnya. PDRB dari sisi permintaan kadang disebut juga PDRB Pengeluaran yang memperlihatkan penggunaan akhir barang dan jasa oleh berbagai institusi.

Produk Domestik Regional Bruto dari sisi permintaan atau pengeluaran diformulasikan dengan persamaan di bawah ini:

$$Y = C + G + I + X - M$$

$$Y = \text{PDRB}$$

$$C = \text{Konsumsi rumah tangga ditambah LNPRT}$$

$$G = \text{Konsumsi Pemerintah}$$

$$I = \text{Investasi}$$

$$X = \text{Ekspor}$$

$$M = \text{Impor}$$

Secara rinci komponen permintaan akhir terdiri dari: (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga; (2) Pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga; (3) Pengeluaran konsumsi pemerintah; (4) Pembentukan modal tetap bruto; (5) Perubahan Stok; (6) Ekspor dan Impor.

3.2.1 PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT PENGELUARAN

Dari sisi pengeluaran, PDRB adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor institusi di dalam suatu wilayah, termasuk rumah tangga, badan usaha, pemerintah, dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT). Permintaan barang dan jasa untuk kegiatan ekonomi menurut System of National Accounts (SNA) 2008 dikelompokkan menjadi dua: konsumsi antara dan konsumsi/permintaan akhir. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat didekati melalui pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran melihat pertumbuhan kegiatan ekonomi dari sisi pengeluaran berbagai pelaku ekonomi. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi cenderung positif, kecuali pada tahun 2020 dimana perekonomian secara umum terdampak negatif karena adanya pandemi Covid-10. Konsumsi antara adalah produksi barang dan jasa yang digunakan sebagai input dalam proses produksi, sedangkan konsumsi/permintaan akhir adalah produksi barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir oleh institusi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah, serta komponen permintaan akhir lainnya.

Tabel 3.3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanah Bumbu ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,91	(0,13)	1,60	4,29	4,27
2. Konsumsi LNPRT	8,08	(1,22)	1,20	4,47	7,82
3. Konsumsi Pemerintah	3,58	(3,66)	4,51	1,65	7,02
4. PMTB / <i>GFCF</i>	5,78	(1,50)	1,77	4,62	5,96
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-

Total PDRB	3,58	(1,39)	4,23	5,45	4,84
-------------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Sumber : Badan Pusat Statistik

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Komponen pengeluaran umumnya memiliki pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2023 ini, pertumbuhan ekonomi secara umum melambat dari tahun 2022, yakni 4,84 persen dari sebelumnya 5,45 persen pada 2022. Untuk komponen konsumsi rumah tangga, terjadi sedikit perlambatan pada tahun 2023 ini dari 4,29 persen menjadi 4,27 persen. Sementara untuk komponen Konsumsi LNPRT dan Pemerintah terjadi percepatan yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan semakin normalnya kegiatan ekonomi selepas pandemi Covid-19, sehingga berbagai kegiatan LNPRT dan pemerintahan bisa dilaksanakan dengan optimal.

Tahun 2023 juga tahun menjelang Pemilu 2024, sehingga berbagai kegiatan terkait pemilu dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun LNPRT. Investasi menunjukkan pertumbuhan dari 462% pada 2022 menjadi 596% pada 2023, menunjukkan peningkatan kepercayaan investor dan aktivitas ekonomi yang meningkat. Data untuk perubahan inventori dan net ekspor tidak tersedia selama periode ini, menunjukkan bahwa kontribusi dari kedua komponen ini tidak dihitung atau tidak signifikan. Total PDRB menunjukkan perlambatan dari 545% pada 2022 menjadi 484% pada 2023. Meskipun mengalami perlambatan, pertumbuhan tetap positif, menunjukkan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

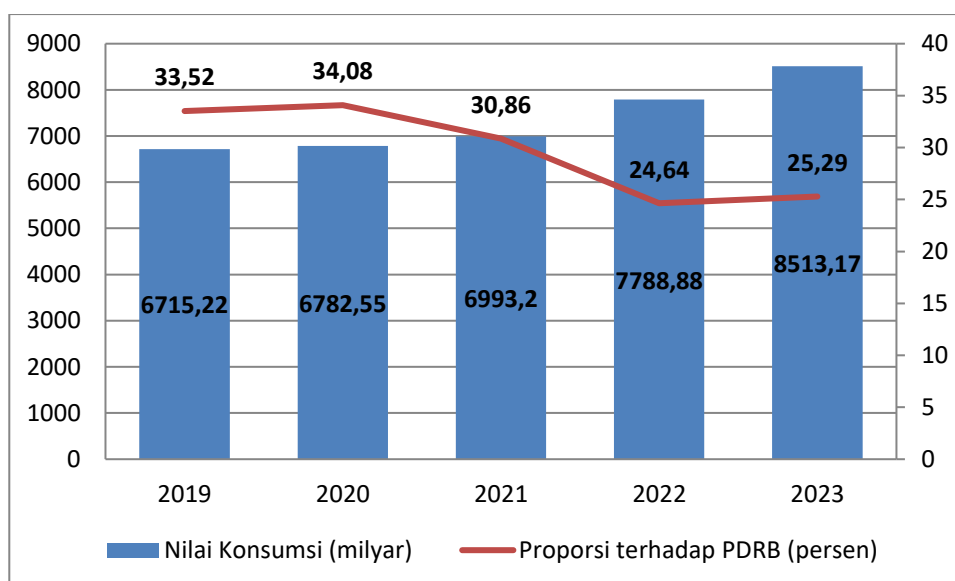
Secara keseluruhan, komponen pengeluaran menunjukkan tren pertumbuhan yang positif meskipun ada beberapa fluktuasi. Konsumsi rumah tangga tetap stabil, sementara konsumsi LNPRT dan pemerintah menunjukkan percepatan signifikan. Investasi juga meningkat, menunjukkan pemulihan dan peningkatan kepercayaan setelah pandemi. Meskipun total PDRB mengalami sedikit perlambatan pada 2023, perekonomian secara keseluruhan tetap tumbuh positif, menunjukkan stabilitas dan pemulihan yang berkelanjutan.

3.2.2 STRUKTUR EKONOMI MENURUT PENGELUARAN

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan institusi dalam kegiatan ekonomi yang berperan sebagai konsumen akhir. Secara umum konsumsi rumah tangga diklasifikasikan dalam tujuh kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*). Kelompok tersebut meliputi pengeluaran untuk makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Selama periode 2019-2023, pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan kontribusi signifikan terhadap PDRB, berkisar antara 24-34 persen. Pada tahun 2023, pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai 8,51 trilyun rupiah untuk 337,33 ribu jiwa penduduk di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Angka tersebut memiliki kontribusi sekitar 25,29 persen dari nilai PDRB total pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa setidaknya seperempat dari total produk yang tersedia di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, baik yang berasal dari produksi sendiri maupun impor dari luar wilayah, digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga.

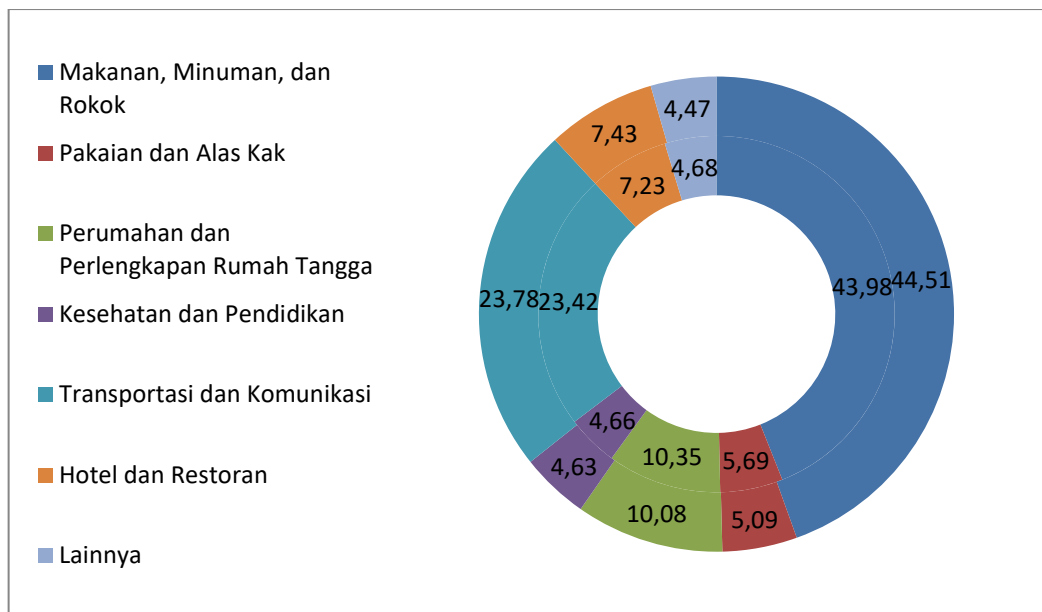


Gambar 3.8 Nilai Konsumsi dan Proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Pola konsumsi penduduk mengalami perubahan selama lima tahun terakhir. Data di bawah menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2019-2023 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan secara nominal (ADH Berlaku), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk dan meningkatnya harga-harga. Peningkatan jumlah penduduk mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tetapi jika dilihat dari proporsi,

Besaran pengeluaran konsumsi rumah tangga pada 2019 hingga 2023 didominasi oleh tiga jenis komponen pengeluaran yaitu komponen Makanan, Minuman dan Rokok, komponen Transportasi dan Komunikasi serta komponen Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Kelompok makanan, minuman, dan rokok masih menjadi komponen terbesar pembentuk pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga yaitu mencapai 44,51 persen. Kelompok tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022 yakni 44,49 persen. Pengeluaran untuk transportasi dan komunikasi memberikan kontribusi terbesar kedua yaitu 23,78 persen pada tahun 2023. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu 23,04 persen. Secara umum pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kelompok bukan makanan menurun dari 56,02 persen pada tahun 2019 menjadi 55,49 persen pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran untuk makanan dan minuman masih menjadi pengeluaran utama dibanding pengeluaran untuk non makanan. Namun, selisih persentase antara pengeluaran makanan dan non makanan relatif kecil, ini menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non-makanan yang masih cukup kuat.



Gambar 3.9 Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 dan 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Tabel berikut menunjukkan pola pengeluaran konsumsi rumah tangga di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu selama tahun 2019-2023. Seiring tahun pengeluaran konsumsi juga terus mengalami pertumbuhan, baik dari segi kuantitas maupun harga. Dari besaran jumlah penduduk dan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut, bisa dilihat bahwa secara rata-rata konsumsi penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 25,24 juta rupiah perkapita pertahun. Konsumsi ini terdiri dari semua konsumsi baik pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Meningkatnya konsumsi ini selain mengimplikasikan adanya peningkatan daya beli juga mengimplikasikan bahwa cukup atau bahkan melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) yang turut mendorong semakin tingginya konsumsi. Terkait penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa, pemenuhan konsumsi secara lokal memberikan keuntungan yang berlipat, di samping mendorong ekonomi domestik, gejolak harga komoditi konsumsi tersebut lebih mudah dikendalikan. Peningkatan nominal pada angka ADH Berlaku menunjukkan terjadinya kenaikan harga setiap tahunnya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pertumbuhan ADH Berlaku yang lebih tinggi dari ADH Konstan juga mengindikasikan bahwa

kenaikan harga ini cukup tinggi setiap tahunnya, bahkan lebih tinggi dari pertambahan produksi barang dan jasa.

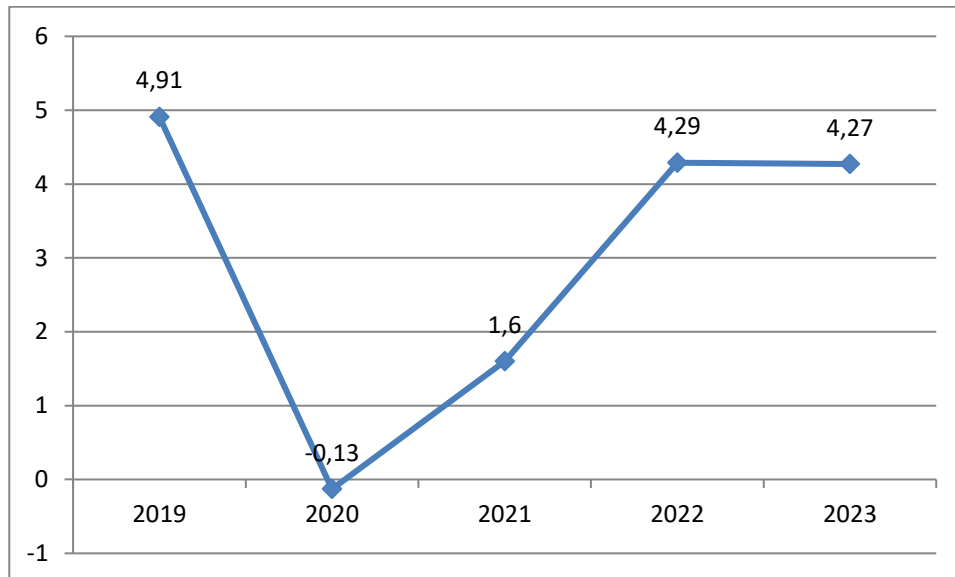
**Tabel 3.4 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023**

Uraian (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2022* (5)	2023** (6)
Total Konsumsi Rumah Tangga/					
a. ADHB (Miliar Rp)	6.715,22	6.782,55	6.993,20	7.788,88	8.513,17
b. ADHK 2022 (Miliar Rp)	4.735,12	4.782,92	4.804,59	5.010,80	5.224,84
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	33,52	34,08	30,86	24,64	25,29
Rata-rata konsumsi per kapita per tahun (Juta Rp)					
a. ADHB	18,08	21,12	21,39	23,45	25,24
b. ADHK 2010	12,74	14,72	14,70	15,08	15,49
Pertumbuhan (Persen)					
a. Total konsumsi	4,91	(0,13)	1,60	4,29	4,27
b. Per kapita / per capita	(0,70)	15,51	(0,16)	2,63	2,68
Jumlah penduduk (000 orang)	371,52	321,23	326,89	332,18	337,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Pola pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Kabupaten Tanah Bumbu cenderung fluktuatif. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2019 sebesar 4,91 persen. Pada tahun 2020, karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi di berbagai sektor yang juga menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga ikut menurun hingga negatif 0,13 persen. Penurunan ini terjadi karena masyarakat cenderung berhemat dikarenakan berbagai faktor, seperti menurunnya pendapatan dan tidak pastinya kondisi perekonomian. Pada 2021 konsumsi rumah tangga meningkat kembali hingga 1,60 persen seiring dengan perekonomian yang mulai kembali bergeliat, dan semakin meningkat pada 2022 hingga mencapai 4,29 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga

pada tahun 2023 cenderung stabil tetapi sedikit melambat menjadi sebesar 4,27 persen.



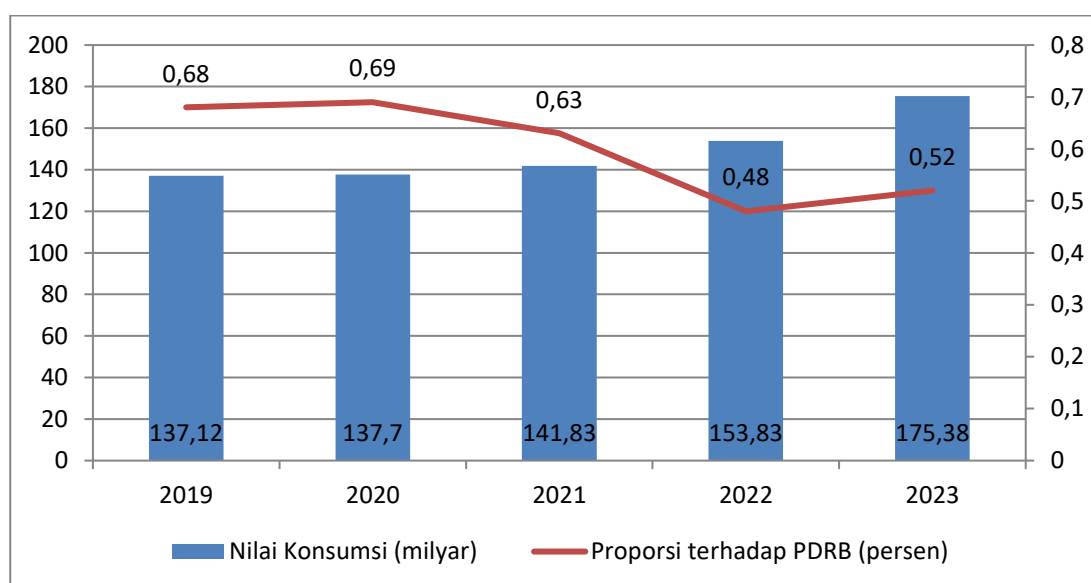
Gambar 3.10 Pertumbuhan Pengeluaran Akhir Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

B. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)

Lembaga Non Profit (LNP) terbagi ke dalam dua kelompok yaitu Lembaga Non Profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) serta Lembaga Non Profit yang melayani bukan rumah tangga. LNPRT merupakan lembaga yang menyediakan kebutuhan barang dan jasa secara gratis atau pada tingkat harga tertentu yang secara ekonomi bagi anggota rumah tangga tidak berarti, serta bebas dari kontrol pemerintah. Harga yang tidak berarti memiliki makna bahwa harga tidak memiliki pengaruh signifikan pada jumlah produsen yang ingin menyediakan barang dan jasa, serta pada jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen.

Terdapat tujuh jenis lembaga yang tercakup dalam LNPRT yaitu organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa. Organisasi yang termasuk ke dalam LNPRT melayani masyarakat dan tidak berorientasi pada keuntungan (non komersial). Pembiayaan kegiatan dari LNPRT biasanya bersumber dari sumbangan atau bantuan dari perorangan, organisasi, maupun pemerintah.



Gambar 3.11 Perkembangan Pengeluaran Akhir LNPRT Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023

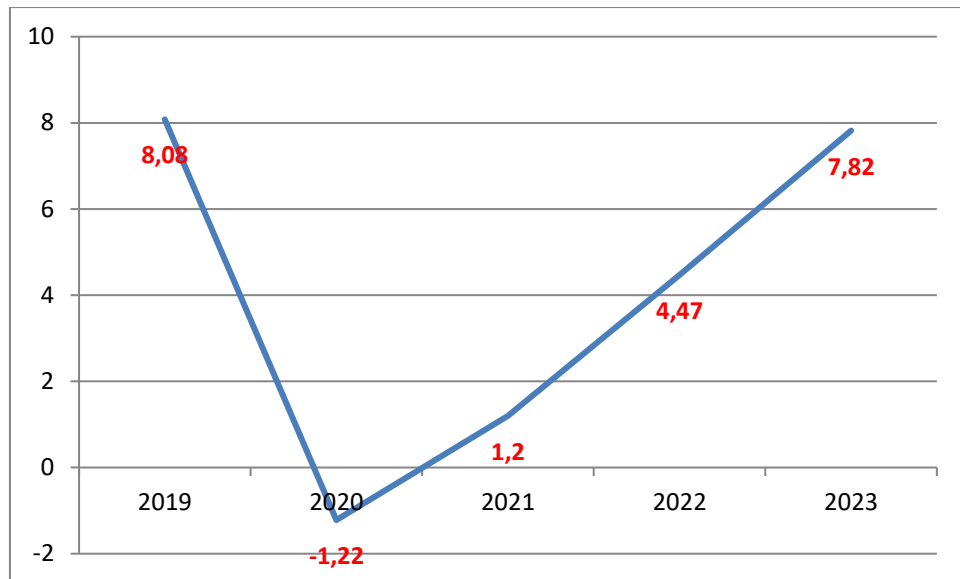
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Pengeluaran LNPRT memiliki kontribusi yang kecil dalam penyusun PDRB dari sisi pengeluaran dan memiliki kecenderungan meningkat setiap tahun. Selama periode tahun 2019-2023 proporsi terhadap PDRB cenderung fluktuatif dan berada di bawah 1 (satu) persen. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan. Pada tahun 2019 pengeluaran LNPRT memiliki kontribusi 0,68 persen dan meningkat hingga menjadi 0,69 persen pada tahun 2020. Kontribusi ini menurun menjadi 0,63 persen pada 2021 dan kembali menurun pada 2022 sebesar 0,48 persen. Kontribusi pengeluaran konsumsi LNPRT terhadap PDRB kembali meningkat pada 2023 menjadi 0,52 persen atau 175,38 miliar rupiah. Hal

ini sejalan dengan adanya aktivitas partai politik yaitu persiapan menghadapi Pemilihan Umum 2024 yang mulai dilaksanakan pada semester dua tahun 2023.

Pada tahun 2019 pertumbuhan pengeluaran LNPRT berada di atas 8 persen. Hal ini dipengaruhi adanya aktivitas partai politik yang meningkat dalam melaksanakan Pemilihan Umum 2019. Pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh partai politik (di mana parpol merupakan salah satu kategori LNPRT) pada pesta demokrasi tersebut meningkat sehubungan dengan adanya sosialisasi baik melalui media massa maupun elektronik. Pada 2020, pertumbuhan LNPRT turun menjadi negatif^{1,22} dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membuat LNPRT mengurangi berbagai kegiatan mereka terkait dengan adanya pembatasan kegiatan oleh pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Pada 2021 sejalan dengan relaksasi pembatasan mobilisasi dan penghapusan pembatasan mobilisasi pada 2022, kegiatan LNPRT mulai bergeliat kembali, sehingga angka pertumbuhannya kembali meningkat hingga 1,20 persen dan 2,47 persen pada 2021 dan 2022. Pada tahun 2023 kegiatan LNPRT mengalami pertumbuhan hingga 7,82 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 adalah masa persiapan Pemilu 2024 dimana pada tahun 2023 banyak partai politik melakukan sosialisasi ataupun kampanye untuk menghadapi Pemilu 2024.



**Gambar 3.12 Pertumbuhan Pengeluaran Akhir LNPRT
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

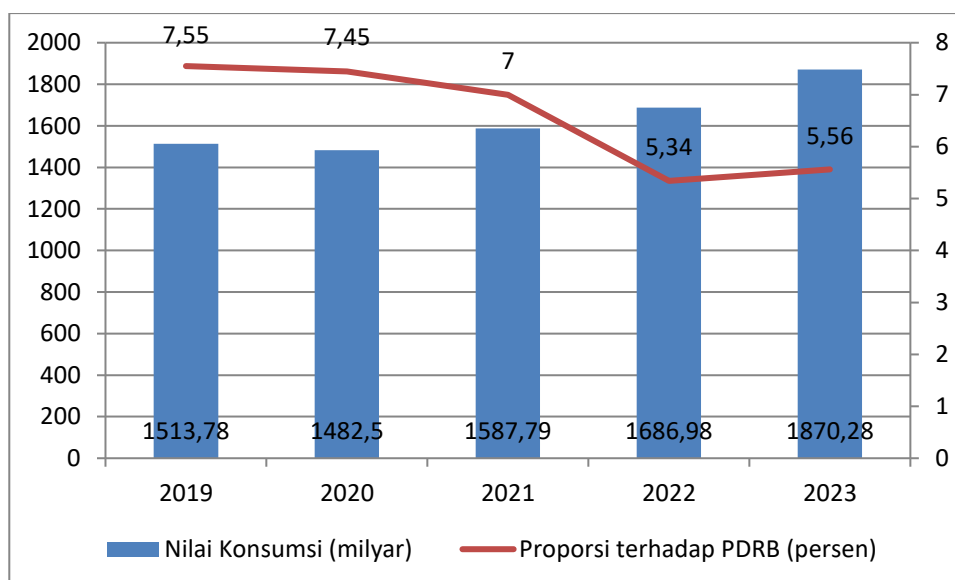
C. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pemerintah memiliki peran sebagai konsumen, produsen, serta penentu kebijakan baik fiskal maupun moneter dalam suatu kegiatan perekonomian. Peran dan fungsi pemerintah antara lain penyedia barang dan jasa bagi kelompok maupun individu dalam rumah tangga, menjadi pemungut dan pengelola pajak serta pendapatan, mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer, serta terlibat dalam kegiatan produksi non pasar.

Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah menyediakan jasa administrasi pemerintah yang diperlukan oleh masyarakat dan dunia usaha serta melakukan konsumsi baik konsumsi barang dan jasa yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari maupun pengeluaran berupa belanja modal untuk pembangunan infrastruktur sosial kemasyarakatan untuk tujuan kesejahteraan rakyat. Jadi secara konsep seluruh pembiayaan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dikategorikan menjadi pengeluaran konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Sehingga konsep pengeluaran konsumsi pemerintah di sub bab ini adalah pengeluaran konsumsi pemerintah

berupa belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, serta belanja bantuan sosial.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah meliputi seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintah dan pertahanan. Pengeluaran ini berupa belanja pegawai (upah dan gaji), penyusutan barang modal pemerintah dan pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin dan habis dipakai/dikonsumsi sendiri (belanja perjalanan dinas, biaya pemeliharaan dan pengeluaran lain yang bersifat rutin). Pengeluaran tersebut dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit kegiatan yang sulit dipisahkan dengan kegiatannya.

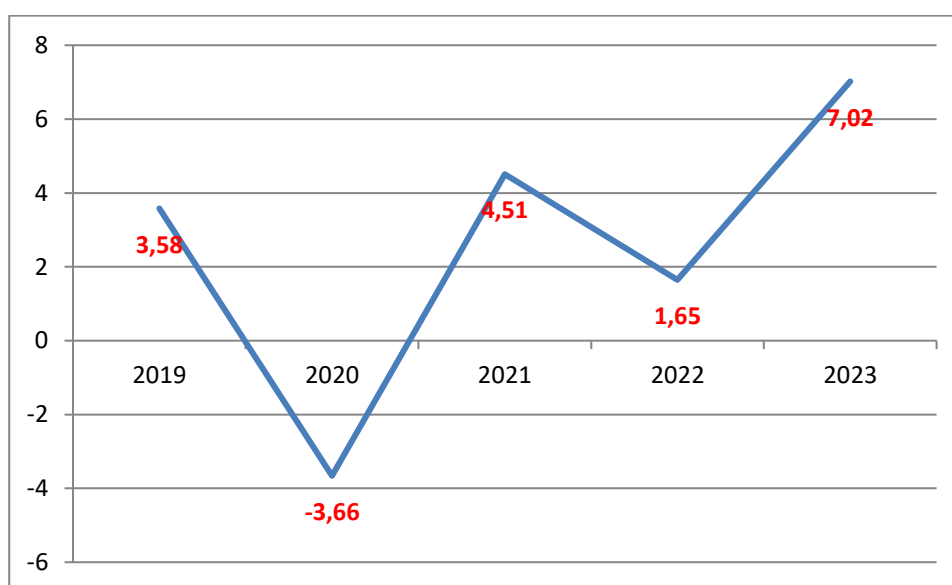


Gambar 3.13 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Pengeluaran pemerintah terus mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan APBD dan APBN. Pengeluaran pemerintah memiliki kontribusi sekitar 5-7 (tujuh) persen dari total PDRB dari sisi pengeluaran. Selama periode 2019-2023 kontribusi pengeluaran pemerintah cukup fluktuatif. Kontribusi Pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami penurunan pada 2020 hingga 2022. Pada tahun 2023, kontribusi pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan menjadi 5,56 persen terhadap total PDRB.

Pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah juga berfluktuasi. Tahun 2019 pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai 3,58 persen. Namun seiring adanya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah pun menurun hingga negatif 3,66 persen. Pada tahun berikutnya, seiring dengan perkenomian yang mulai bergerak kembali, pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah pun kembali pertumbuhan positif sebesar 4,51 persen pada tahun 2021 dan 1,65 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023, pertumbuhan konsumsi pemerintah mengalami percepatan 7,02 persen. Belanja barang yang dilakukan institusi pemerintah dapat menjadi salah satu alat penggerak perekonomian regional. Adanya belanja pemerintah yang efektif dapat menggerakkan perekonomian lokal yaitu dengan belanja hasil produksi domestik Kabupaten Tanah Bumbu.



Gambar 3.14 Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Jika pengeluaran pemerintah terus bertumbuh maka diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam dunia usaha, sehingga dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, belanja pegawai yang dibayarkan kepada aparat pemerintah hendaknya bisa juga dibelanjakan di daerah tersebut, tidak dibawa ke daerah lain, sehingga akan turut mendorong konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya ikut mendorong pertumbuhan

ekonomi regional. Meskipun tidak sebesar dorongan konsumsi rumah tangga, peran pemerintah dalam membelanjakan anggarannya juga dapat membantu ekonomi lokal.

D. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah salah satu komponen yang dapat menggambarkan investasi dalam PDRB dari sisi pengeluaran. PMTB merupakan proses penambahan dan pengurangan barang modal pada tahun tertentu. Unsur "Bruto" menunjukkan bahwa di dalam PMTB masih terdapat unsur penyusutan atau dengan kata lain nilai barang modal belum diperhitungkan nilai penyusutannya. PMTB adalah semua pengadaan barang modal untuk digunakan/dipakai sebagai alat yang tetap (*fixed assets*). Pembentukan modal sesungguhnya merupakan motor pertumbuhan ekonomi. Hampir semua ahli ekonomi menekankan arti penting pembentukan modal (*Capital Formation*) sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi. Pembentukan atau pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor sekaligus faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Melalui persediaan mesin, alat-alat dan perlengkapan meningkat, skala produksi meluas sehingga *overhead* ekonomi dan sosial tercipta. Pembentukan modal membawa pada pemanfaatan penuh sumber-sumber yang ada sehingga dapat menaikkan besarnya output, pendapatan dan pekerjaan, menekan angka inflasi dan defisit neraca pembayaran.

Dalam fungsi produksi yang cukup dikenal juga memasukkan variabel modal sebagai salah variabel yang masuk dalam fungsi produksi. Suatu alokasi modal yang masuk ke daerah dapat menjadi salah satu komponen akselerator ekonomi dengan alokasi yang tepat. Jika modal tersebut diinvestasikan pada sektor yang memiliki daya penyebaran kuat dan penyerapan tenaga kerja yang besar, maka dapat mendorong percepatan ekonomi. Pemerintah sebagai regulator perlu membuat aturan yang memudahkan investor masuk tetapi tetap menjaga akselerasi ekonomi lokal. Selain itu aliran investasi yang masuk diharapkan memberikan keuntungan ganda yaitu meningkatkan pertumbuhan

ekonomi juga memberikan pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan.

Di sisi lain, belanja modal pemerintah juga harus didorong untuk memberikan pelayanan sosial publik kepada masyarakat juga mendorong perkembangan ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur seperti yang dilakukan pemerintah Tanah Bumbu berupa pembangunan jalan sangat efektif membuka wilayah dan meningkatkan aksesibilitas ekonomi bagi masyarakat. Adanya jalan yang memadai memberikan keuntungan kepada masyarakat desa untuk memasarkan produknya dengan harga yang kompetitif dan tidak merugikan. Selain itu juga memberikan keuntungan tambahan berupa mudahnya memperoleh barang kebutuhan rumah tangga dengan harga yang lebih murah.

Lebih dari 60 persen struktur komponen penyusun PMTB di wilayah Tanah Bumbu adalah berupa bangunan atau sekitar 2,7 triliun rupiah pada tahun 2023. Pertumbuhan PMTB selama lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 5,96 persen pada tahun 2023 dan terendah - ,1,50 persen pada 2020. Adanya penurunan dalam pertumbuhan PMTB pada tahun 2020 sejalan dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya aktivitas perekonomian secara umum, termasuk menurunnya investasi. Namun, pada 2023 ini pertumbuhan PMTB kembali meningkat. Ini menunjukkan bahwa atmosfer investasi di Kabupaten Tanah Bumbu cukup baik.

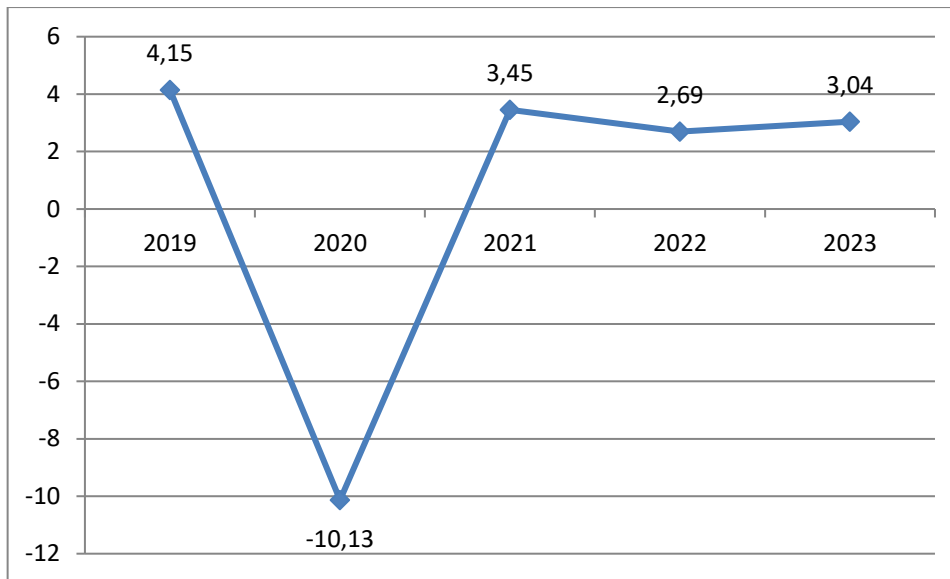
**Tabel 3.5 Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	3.367,80	3.369,94	3.485,55	3.874,50	4.345,10
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.239,17	2.205,59	2.244,61	2.348,33	2.488,35
Proporsi terhadap PDRB					
(% - ADHB)	16,81	16,94	15,38	12,26	12,91

Uraian (1)	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022* (5)	2023** (6)
Struktur PMTB					
a. Bangunan					
(Miliar Rp)	2.166,91	2.161,70	2.236,47	2.446,45	2.736,58
(%)	64,34	64,15	64,16	63,14	62,98
b. Non Bangunan					
(Miliar Rp)	1.200,89	1.208,24	1.249,08	1.428,05	1.608,52
(%)	35,66	35,85	35,84	36,86	37,02
Total PMTB					
(Miliar Rp)	3.367,80	3.369,94	3.485,55	3.874,50	4.345,10
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan					
a. Bangunan (%)	5,23	(1,66)	1,98	3,68	5,59
b. Non Bangunan (%)	6,93	(1,17)	1,34	6,55	6,71
Total PMTB	5,78	(1,50)	1,77	4,62	5,96

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan salah satu parameter untuk menggambarkan rasio investasi kapital terhadap hasil (*output*) yang diperoleh dari investasi tersebut. Kapital atau barang modal dibuat oleh manusia dari sumber daya alam yang digunakan secara berulang dalam suatu proses produksi. Sedangkan *output* adalah nilai hasil dari suatu proses produksi yang digambarkan sebagai Nilai Tambah. ICOR memiliki makna berapa besar penambahan kapital yang diperlukan untuk penambahan *output*. Semakin tinggi nilai ICOR, menunjukkan bahwa untuk menambah satu unit *output* dibutuhkan penambahan kapital yang lebih tinggi juga. Dalam penghitungan ICOR, angka PMTB digunakan sebagai pendekatan angka penambahan kapital. Dalam lima tahun terakhir ICOR Kabupaten Tanah Bumbu, dengan pengecualian pada tahun 2020, diperlukan 2 – 4 unit penambahan kapital.



Gambar 3.15 Perkembangan ICOR Kabupaten Tanah Bumbu 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Investasi mempunyai keterkaitan dan mempengaruhi keberlangsungan kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Dengan adanya investasi kapasitas produksi dapat ditingkatkan, yang berarti meningkatkan *output*, serta berdampak pula pada meningkatnya pendapatan. Efek positif investasi ini mampu memberikan dorongan terhadap perkembangan berbagai aktivitas ekonomi, tidak hanya sektor yang bersangkutan, tapi juga sektor-sektor lain yang terkait dengannya, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga secara simultan hal ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

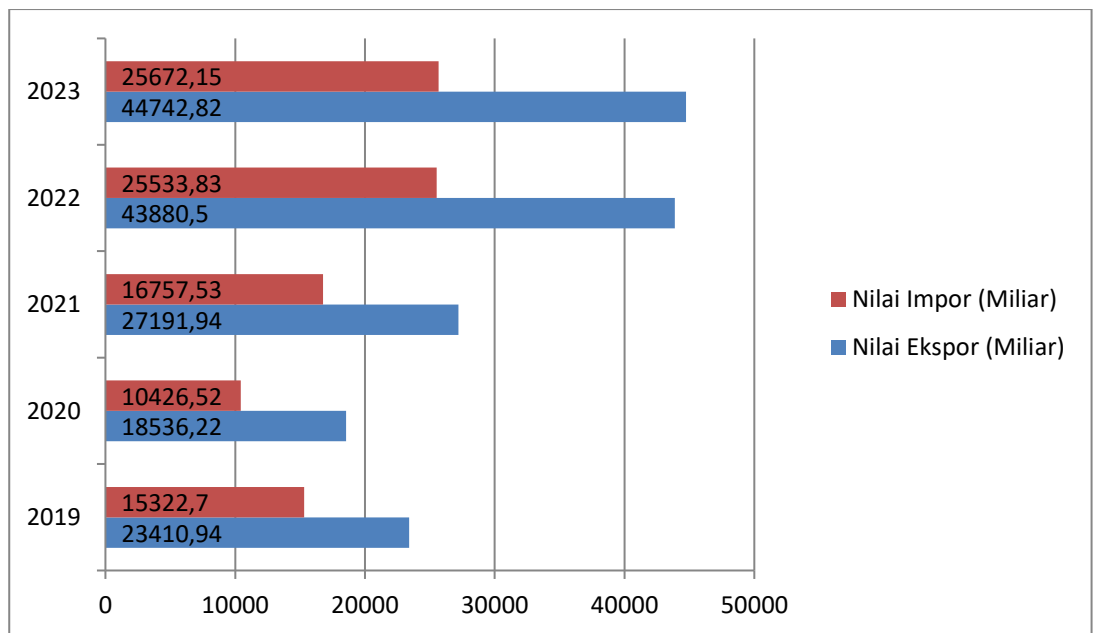
E. Ekspor dan Impor

Kebutuhan konsumsi di Kabupaten Tanah Bumbu tidak bisa sepenuhnya diakomodir oleh produksi domestik Tanah Bumbu, terutama konsumsi rumah tangga baik makanan maupun non makanan. Dalam sistem ekonomi terbuka seperti sekarang ini, sangat tidak mungkin suatu daerah mampu secara swasembada memenuhi kebutuhan domestiknya. Selain keberagaman jenis barang yang dibutuhkan, alasan keunggulan komparatif wilayah juga mendorong terjadi perdagangan antar daerah bahkan antar negara. Penduduk suatu wilayah melakukan perdagangan antar wilayah dengan penduduk lain didorong adanya motif berdagang. Motif berdagang tersebut yaitu

mendapatkan keuntungan tambahan yang diperoleh dari perdagangan internasional tersebut, yang dikenal dengan istilah *gains from trade*. Alasan lain terjadinya perdagangan antar wilayah adalah mobilitas faktor produksi yang terdiri dari tanah, tenaga kerja, barang modal dan manajerial atau keterampilan, serta alasan *transport cost*.

Karena motif tersebut maka terjadi transaksi antara residen dan non residen wilayah tersebut yang dikenal dengan kegiatan ekspor dan impor. Semakin intensif dan besar *volume* perdagangan yang terjadi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain maka akan semakin besar pula kapasitas ekonomi kedua belah pihak untuk berkembang. Suatu wilayah dikatakan memperoleh manfaat dari perdagangan jika terdapat surplus perdagangan. Oleh karenanya upaya mendorong ekspor sudah merupakan strategi tersendiri yang pada saat sekarang akan menentukan perekonomian suatu wilayah.

Analisis terhadap data ekspor impor dalam kurun waktu yang bersamaan mampu untuk melihat posisi neraca perdagangan baik secara nasional, regional, wilayah ataupun lingkup daerah. Dari analisis tersebut dapat diukur apakah posisi perdagangan Kabupaten Tanah Bumbu mengalami surplus atau defisit. Analisis lebih jauh terhadap data ekspor impor juga mampu untuk melihat komoditi terbesar dalam penciptaan ekspor dan impor. Komoditi unggulan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai komoditi ekspor harus didukung dengan berbagai sarana yang harus diciptakan oleh kebijakan ekonomi secara makro dan strategi perusahaan secara mikro.



Gambar 3.16 Perkembangan dan Struktur Ekspor Impor Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Dilihat dari selisih antara besaran ekspor dan impor, Tanah Bumbu merupakan wilayah yang tergolong net eksportir, dimana kumulatif nilai ekspor selalu lebih besar dari impor dan konsisten dari tahun ke tahun. Besaran selisih antara ekspor dan impornya berkisar antara 8-19 triliun rupiah selama tahun 2019-2023. Ekspor dan impor yang dimaksud dalam tabel di atas adalah kumulatif kegiatan transaksi dengan pihak luar negeri, luar propinsi, dan luar kabupaten. Komoditi andalan yang banyak menyumbang nilai ekspor serta devisa bagi negara adalah batubara, produk olahan kelapa sawit yaitu CPO, produk karet seperti SIR20, serta komoditi lainnya. Sementara impor yang cukup besar adalah bahan bakar minyak sebagai bahan baku pertambangan dan industri serta barang kebutuhan konsumsi lainnya baik untuk rumah tangga maupun pemerintah.

F. Perubahan Inventori

Perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen perubahan inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (di samping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 3.6 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	213,88	17,25	21,26	(240,87)	(313,21)
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	141,58	11,98	14,71	(150,51)	(181,98)
Proporsi terhadap PDRB					
(%ADHB)	1,07	0,09	0,09	(0,76)	(0,93)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis secara rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya. Selama kurun waktu 2019–2023, perubahan inventori mengalami perubahan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2019 perubahan inventori sebesar 213,88 miliar rupiah, kemudian terus menurun hingga mencapai 21,26 miliar rupiah pada 2021. Selama 2019-2021 perubahan inventori terus bertanda positif yang berarti terus terjadi penambahan inventori, namun pada tahun 2022 dan tahun 2023 perubahan inventori bertanda negatif

yakni -240,87 miliar rupiah dan -313,21 miliar rupiah, yang berarti terjadi pengurangan persediaan sebesar -240,87 miliar rupiah dan -313,21 miliar rupiah. Secara umum proporsi Inventori terhadap PDRB Tanah Bumbu tergolong kecil, hanya ada disekitar 1 persen.

Dari Fluktuasi pertumbuhan dan kontribusi berbagai komponen pengeluaran dalam struktur ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu dapat disimpulkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga tetap menjadi komponen terbesar dalam PDRB, sementara pengeluaran LNPRT dan pemerintah menunjukkan fluktuasi sesuai dengan kondisi politik dan ekonomi. PMTB sebagai indikator investasi menunjukkan peningkatan yang signifikan pada 2023, mencerminkan iklim investasi yang kondusif di wilayah ini. Data dan tren ini penting untuk memahami dinamika ekonomi dan merencanakan kebijakan ekonomi yang efektif di masa depan.

3.3 INFLASI

Stabilitas harga merupakan salah satu komponen penting dalam menjaga keseimbangan makroekonomi. Harga merupakan nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang. Dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang atau jasa beserta pelayanan. Apabila harga stabil, daya beli masyarakat juga stabil.

Stabilitas harga adalah suatu kondisi dimana inflasi dalam kondisi stabil dan rendah. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus. Inflasi atau kenaikan harga yang tinggi akan membuat masyarakat mengalami penurunan daya beli. Inflasi juga bisa menyebabkan inefisiensi sumber daya akibat perubahan permintaan atau penawaran barang dan jasa secara umum.

Gambaran mengenai kenaikan harga dari berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dari waktu ke waktu dapat diketahui melalui pengukuran

indeks harga konsumen (IHK). IHK merupakan perbandingan antara harga dengan suatu paket komoditas dari suatu kelompok barang atau jasa (market basket) pada suatu periode waktu terhadap harganya pada periode waktu yang telah ditentukan (tahun dasar). Berdasarkan IHK tersebut kemudian diperoleh besaran angka inflasi/deflasi, yaitu besarnya persentase perubahan IHK antar periode. Angka inflasi/deflasi mencerminkan kemampuan daya beli dari uang yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Inflasi bisa terjadi karena dorongan permintaan (*demand pull inflation*) maupun dorongan kenaikan biaya produksi (*cost push inflation*). Inflasi karena dorongan permintaan terjadi ketika permintaan akan barang dan jasa sangat tinggi, sehingga menyebabkan harga barang dan jasa tersebut mengalami peningkatan. Sementara inflasi karena dorongan biaya produksi terjadi ketika biaya produksi (*input*) meningkat sehingga harga produk-produk yang dihasilkan (*output*) juga mengalami peningkatan. Disamping itu, faktor-faktor tak terduga lain seperti kenaikan harga BBM yang cukup tinggi, ataupun wabah penyakit yang datang tiba-tiba seperti COVID-19 juga dapat menjadi pemicu tingginya angka inflasi.

Secara makro, terjadinya inflasi dapat berpengaruh dalam berbagai dimensi ekonomi maupun sosial seperti kemiskinan, ketenagakerjaan, bahkan berbagai hal terkait pemenuhan kebutuhan dasar. Penting bagi pemerintah sebagai penentu kebijakan untuk melakukan upaya menjaga angka inflasi pada level rendah dan stabil. Oleh karenanya, perilaku inflasi penting untuk dipelajari dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan atas respon dari perubahan tekanan terhadap inflasi agar pengendalian inflasi lebih efektif.

3.3.1 INFLASI JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

Teori Keynes menyatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat hidup diluar batas kemampuan ekonominya sehingga menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang-barang melebihi jumlah barang yang tersedia. Keterbatasan jumlah persediaan barang ini terjadi karena dalam jangka waktu yang pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Akibatnya, akan muncul gap antara permintaan

dengan penawaran atau yang dikenal dengan istilah inflationary gap. Keynes menganggap bahwa inflationary gap inilah yang akan memicu terjadinya inflasi jangka pendek.

Inflasi selalu terjadi di setiap negara, baik di negara berkembang maupun di negara maju, tidak terkecuali Indonesia. Dalam lingkup negara berkembang, seperti Indonesia, inflasi bukan semata-mata merupakan fenomena moneter saja, tetapi juga merupakan fenomena struktural dalam negara tersebut. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi negara berkembang umumnya lebih bercorak agraris. Sehingga, guncangan ekonomi yang bersumber dari dalam negeri (misalnya gagal panen) atau hal yang berkaitan dengan hubungan luar negeri (misalnya ekspor-impor) akan sangat berdampak pada fluktuasi harga di pasar domestik..

Fenomena struktural yang disebabkan oleh kesenjangan atau kendala struktural dalam perekonomian di negara berkembang sering disebut dengan Structural Bottleneck. Dua orang peneliti, yaitu Karunarante & Bandara menyebutkan bahwa fenomena ini utamanya terjadi dalam dua hal, antara lain:

1. *Supply* dari sektor pertanian tidak elastis (*agricultural bottleneck*).
2. Penerapan metode dan teknologi sederhana di negara berkembang dalam mengelola sektor pertanian seringkali menjadi salah satu penyebab produksi sektor pertanian domestik tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan masyarakat.
3. Pendapatan ekspor lebih kecil daripada pembiayaan impor (*foreign exchange bottleneck*).
4. Lambatnya pertumbuhan sektor industri seringkali tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan permintaan. Untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri terkadang dibutuhkan produk dari luar negeri sebagai *input* antaranya. Akibatnya, pembiayaan impor akan membengkak dan akan berdampak pada fluktuasi harga barang impor di pasar domestik.

Adanya *structural bottlenecks* dapat memperparah inflasi di negara berkembang secara terus-menerus dalam kurun waktu yang relatif lama. Fenomena tersebut umumnya dikenal sebagai inflasi jangka panjang. Fenomena

ini membutuhkan studi yang lebih mendalam daripada inflasi jangka pendek sebab inflasi jangka panjang kadang tidak dapat diselesaikan dengan pengendalian inflasi jangka pendek.

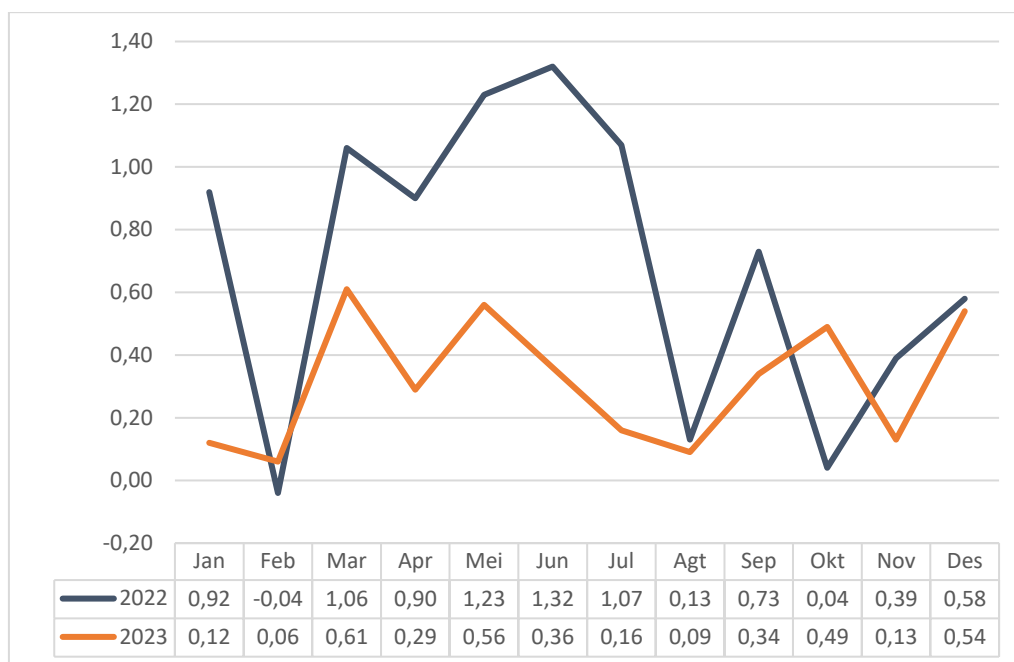
3.3.2 INFLASI DAN INDEKS HARGA KONSUMEN

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, hal tersebut menunjukkan harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Perkembangan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu ke waktu disebut laju inflasi. Laju inflasi tersebut dihitung berdasarkan angka indeks yang disebut sebagai Indeks Harga Konsumen (IHK).

Indeks harga konsumen (IHK) adalah Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Penyusunan IHK menggunakan data harga konsumen yang mencakup barang dan jasa yang dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran (berdasarkan *The Classification of Individual Consumption by Purpose* - COICOP), yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga; serta transpor, komunikasi dan jasa keuangan.

Angka inflasi maupun deflasi dapat menggambarkan bagaimana tingkat kestabilan harga suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Berikut merupakan perkembangan inflasi bulanan Kabupaten Kotabaru sebagai sister city dari Kabupaten Tanah Bumbu. Dasar penentuan sister city berdasarkan karakteristik lapangan usaha dominan (sektor pertambangan mineral), tingginya tingkat harga dan IPM di daerah tersebut. Secara umum perubahan IHK pada tahun 2022 hingga 2023 memiliki kesamaan pola. Perubahan harga pada bulan-bulan tertentu seperti tahun baru, hari raya Idul Fitri, tahun ajaran baru, maupun hari Natal di akhir tahun. Pola tersebut akan terus berulang dari tahun ke tahun,

mengingat peningkatan permintaan barang dan jasa berbanding lurus dengan peningkatan harga-harga.



**Gambar 3. 17 Inflasi Kabupaten Kotabaru per Bulan (Persen)
Tahun 2022-2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

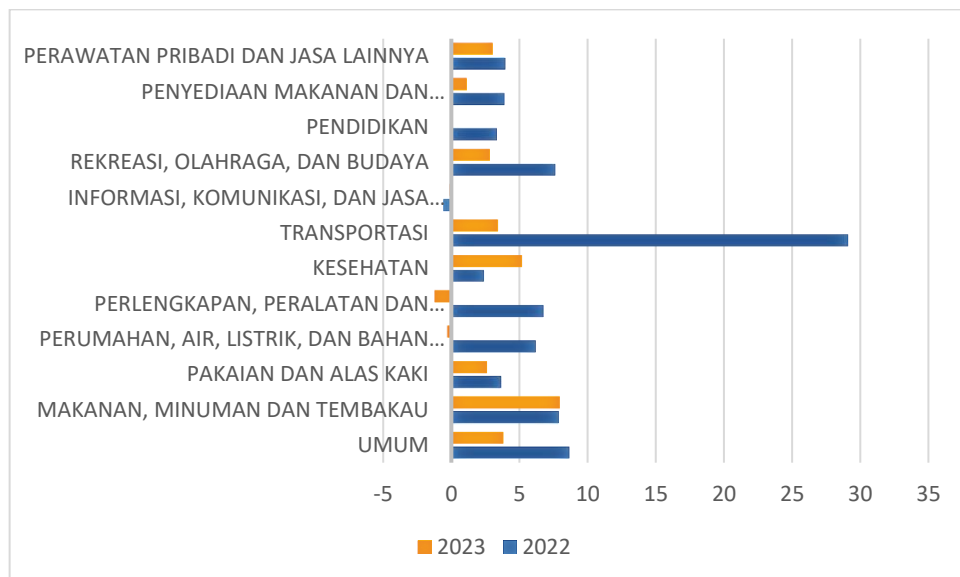
Berdasarkan gambar 3.15, selama rentang tahun 2022-2023 deflasi hanya terjadi pada bulan Februari 2022, Kabupaten Kotabaru mengalami deflasi sebesar 0,04 persen. Deflasi terjadi karena penurunan indeks harga sejumlah kelompok komoditas yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,09 persen, dan kelompok transportasi sebesar 0,10 persen.

Pada Bulan Mei s/d Juli 2022 inflasi berada pada di atas 1.00 persen. Perubahan IHK terbesar ada pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencapai 0,63 persen pada Bulan Mei yang selanjutnya naik menjadi 0,92 persen di Bulan Juni. Perubahan ini disebabkan adanya kenaikan harga pada beberapa bahan makanan menjelang bulan ramadhan diantaranya daging ayam ras, ikan kembung, bawang merah, dan cabai rawit. Pada bulan April 2023 inflasi turun menjadi 0,29 persen, namun naik lagi menjadi 0,56 persen pada Mei 2023. Perubahan tersebut disebabkan oleh peralihan dari bulan Ramadhan ke Hari Raya Idul Fitri. Memasuki perayaan hari raya idul fitri, perubahan IHK pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencapai 1,52 persen

dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Disusul kelompok komoditas perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan perubahan IHK sebesar 0,38 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen dan kelompok transportasi sebesar 0,01 persen.

Jika dilihat dari paket komoditas penyumbang inflasi, pada gambar 3.2 terlihat bahwa pada Tahun 2022, transportasi mempunyai laju inflasi yang sangat tinggi yaitu mencapai hampir 30 persen. Hal ini selaras dengan fenomena laju inflasi untuk sektor transportasi di Indonesia yang juga menjadi penyumbang terbesar yaitu 15,26 persen. Sektor rekreasi, olahraga dan budaya memiliki laju inflasi yang lumayan tinggi yaitu sekitar 7 persen.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, beberapa sektor mengalami perbedaan tren di tahun 2023. Sektor Makanan, Minuman, dan Tembakau memiliki laju inflasi yang tinggi dibandingkan paket komoditas yang lain dengan nilai 7,95. Kelompok ini memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 2,9 persen dengan komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi yaitu cabai rawit, bawang merah dan beras. Sedangkan sektor kedua terbesar adalah sektor kesehatan yang memiliki laju inflasi sekitar 5,19 persen.



Gambar 3. 18 Laju Inflasi (*year on year*) Kabupaten Kotabaru Menurut Paket Komoditas, Tahun 2022-2023 (2018=100)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru mencatat IHK Desember 2023 sebesar 124,40. Artinya secara umum harga-harga pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 24,40 persen lebih mahal dibandingkan harga pada tahun dasar 2022. IHK pada kelompok pengeluaran transportasi menjadi yang tertinggi dibanding kelompok pengeluaran lain. Pada kelompok ini angka IHK mencapai 139,66 atau 39,66 persen lebih mahal daripada harga tahun 2022.

3.3.3 PENGENDALIAN INFLASI KABUPATEN TANAH BUMBU

Inflasi merupakan gejala ekonomi yang menjadi perhatian berbagai pihak. Inflasi berpengaruh bagi masyarakat dan perekonomian suatu negara. Bagi masyarakat, inflasi menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup secara langsung. Bagi dunia usaha, laju inflasi menjadi faktor penting dalam membuat keputusan. Inflasi juga menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi. Mengingat pengaruhnya yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat, maka pemerintah senantiasa berusaha untuk dapat mengendalikan laju inflasi agar tetap rendah dan stabil.

Berdasarkan PMK No. 124/PMK.010/2017 tanggal 18 September 2017, untuk tahun 2023 tingkat sasaran inflasi IHK adalah sebesar $3,0 \pm 1$ persen. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyepakati lima langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) secara daring pada Kamis, (11/02/2023) Langkah strategis yang ditujukan untuk menjaga inflasi tetap dalam kisaran sasaran $3,0 \pm 1$ persen pada tahun 2023 mencakup:

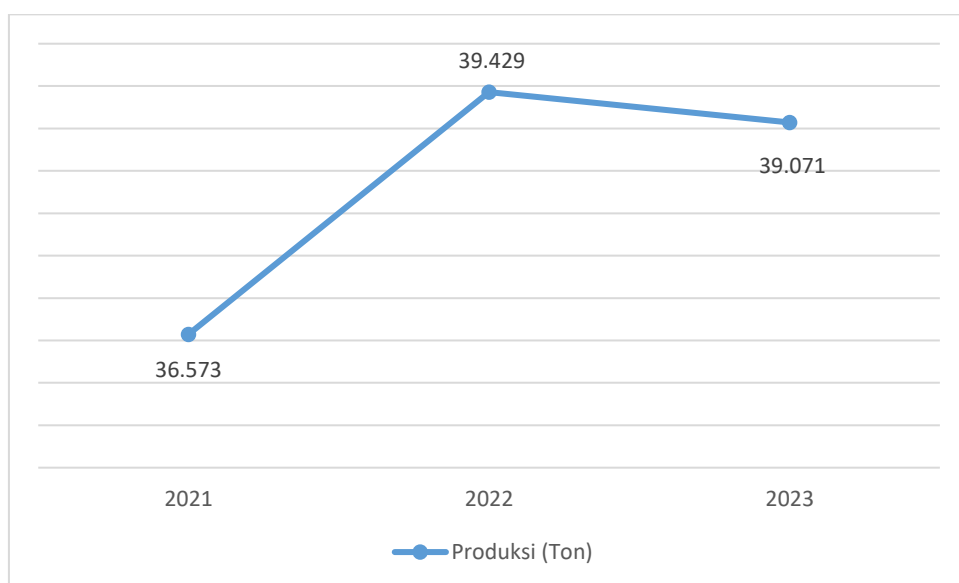
1. Menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (*volatile food*) dalam kisaran 3,0 - 5,0 persen dengan strategi yang mencakup Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K) di masa pandemi COVID-19.

2. Memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2023.
3. Memperkuat sinergi antar Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dalam rangka menyukseskan program TPIP 2023 untuk ketahanan pangan nasional antara lain melalui program food estate serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam.
4. Menjaga ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
5. Menyepakati sasaran inflasi 3 (tiga) tahun ke depan sebagai tindak lanjut akan berakhirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 124/010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, Tahun 2022, dan Tahun 2023. Sasaran inflasi tahun 2022, 2023, dan 2024 disepakati masing-masing sebesar $3\% \pm 1\%$, $3\% \pm 1\%$, dan $2,5\% \pm 1\%$ yang akan ditetapkan kemudian melalui PMK.

Inflasi Kabupaten Kotabaru tahun 2023 mencapai 0,54, dengan IHK 124,40. Pengeluaran untuk kelompok bahan makanan memiliki andil yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kelompok lainnya yaitu sebesar 0,43 persen. IHK untuk kelompok bahan makanan pada tahun 2023 adalah 135,61 yang artinya harga kebutuhan bahan makanan lebih mahal 35,61 persen dibandingkan tahun 2022. Tingkat inflasi tahun ke tahun (yoy) untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa bahan makanan masih memiliki pengaruh yang besar dalam perubahan tingkat inflasi.

Upaya pemerintah Tanah Bumbu dalam menjaga inflasi kelompok makanan khususnya *Volatile Food* (VF) sejalan dengan pemerintah pusat, melihat komposisi pengeluaran masyarakat pada bahan makanan lebih besar dibanding non makanan, dengan beras (padi) masih menjadi makanan pokok utama bagi

masyarakat Tanah Bumbu. Pada tahun 2023, beberapa inovasi dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu dengan pemanfaatan teknologi yang dibutuhkan petani dalam melakukan kegiatan pertanian baik dari segi pengolahan, pascapanen dan pemasaran. Selain itu, langkah yang dijalankan di lapangan juga dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi, melakukan penyuluhan kepada petani, dan *sharing knowledge*.



Gambar 3. 19 Produksi Padi Sawah Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2019-2023

Sumber: Data KSA Badan Pusat Statistik

Setelah sempat mengalami penurunan dari tahun 2019-2020 dikarenakan terjadinya banjir dan hama, produksi padi sawah di Kabupaten Tanah Bumbu akhirnya mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 39.429 Ton dari total 9.849 Ha. Sedangkan pada tahun 2023, realisasi luas panen sepanjang bulan Januari /sd Desember mencapai 9.649 Ha yang mengalami penurunan sebesar 190 Ha (2 persen) dibanding tahun 2022 sebesar 9.849 Ha. Hal ini selaras dengan produksi padi sawah di Tahun 2023 yang mencapai 39.071 Ha atau menurun sebesar 358 Ton (0,01 persen).

Ada beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka meningkatkan produktivitas padi antara lain dengan mengoptimalkan satu kali masa tanam dan meminimalisir terjadinya kerugian akibat musim yang tidak menentu. Mengoptimalkan lahan yang kurang aktif untuk ditanami padi sebagai upaya lain dalam meningkatkan produktivitas padi.

Pengendalian hama bisa dilakukan dengan pemberian bantuan pestisida untuk penyemprotan massal yang disertai dengan kegiatan bimbingan teknis kepada petani tentang tata cara pengendalian hama. Selain itu, sebagai tindakan preventif sebelum kenaikan harga pangan terjadi, dapat dilakukan monitoring Harga Eceran Tertinggi (HET) dan optimalisasi Pasar Murah (PM) dan Operasi Pasar (OP) baik sebelum dan saat Hari Besar Keagamaan dan Nasional.

An aerial photograph of a coastal town. In the foreground, a large, multi-story pink building with a red-tiled roof stands on a grassy area. To its left, a road runs parallel to a body of water. Further back, a dense line of palm trees separates the town from a sandy beach. The ocean extends to the horizon under a cloudy sky.

KETENAGAKERJAAN

"Kualitas sumber daya akan menentukan arah perkembangan perekonomian suatu wilayah"



BAB IV

KETENAGAKERJAAN

Kabupaten Tanah Bumbu terletak di wilayah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang melimpah, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Tenaga kerja yang berkualitas akan mendukung pembangunan perekonomian daerah. Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kabupaten dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar ketiga di Kalimantan Selatan dengan kategori Pertambangan dan penggalan sebagai kontributor utama yaitu mencapai 49,88 persen atau sebesar 16,79 triliun rupiah.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang berperan dalam memajukan pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menentukan arah perkembangan perekonomian suatu wilayah. Dengan memasuki era globalisasi saat ini, pasar tenaga kerja telah mengalami persaingan yang cukup ketat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberi perhatian dan dukungan lebih pada angkatan kerja yang ada di daerahnya agar berdaya saing tinggi sehingga SDM lokal akan terserap pada pasar tenaga kerja di wilayahnya sendiri. Dukungan seperti pendidikan keterampilan dan keahlian juga dapat diberikan agar angkatan kerja memiliki pengetahuan yang lebih luas terutama keahlian atau keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dari lapangan usaha di wilayah masing-masing.

Pertumbuhan tenaga kerja di Tanah Bumbu akan menjadi alat penggerak perekonomian Tanah Bumbu, hal ini akan terjadi jika tenaga kerja memiliki kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia yang berkembang. Hasil maksimal dengan *input* yang minimal diharapkan untuk setiap tenaga kerja. Dengan kata lain, tenaga kerja diharapkan memiliki produktivitas yang tinggi dalam mengolah barang/jasa pada pekerjaannya. Sementara itu, meningkatnya produktivitas juga harus diimbangi dengan menciptakan lapangan kerja yang baru agar lapangan pekerjaan tidak hanya memberikan manfaat pada individu yang sudah bekerja namun juga memberikan

kesempatan pada angkatan kerja yang akan memasuki pasar kerja sehingga pada akhirnya jarak kesenjangan sosial menjadi lebih sempit.

Dalam rangka perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, diperlukan data mengenai kondisi ketenagakerjaan sebagai salah satu bahan untuk menentukan arah kebijakan. Berbagai indikator di bidang ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), distribusi pekerja menurut lapangan kerja dan karakteristik pekerja lainnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan memanfaatkan data tersebut diharapkan perencanaan program-program pemerintah di bidang ketenagakerjaan akan lebih tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kualitas pasar tenaga kerja.

Data ketenagakerjaan pada publikasi ini menggunakan data Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Karena keterbatasan data, data ketenagakerjaan pada tahun 2016 untuk level kabupaten tidak tersedia di BPS dikarenakan pada tahun tersebut. Sakernas Tahunan 2016 untuk estimasi angka kabupaten/kota ditiadakan karena efisiensi anggaran oleh kementerian keuangan. Sementara untuk data tahun 2015 ke belakang tetap tersedia sebagai bahan analisis antar waktu.

4.1. ANGKATAN KERJA SEBAGAI PENGGERAK PEMBANGUNAN

Angkatan kerja yang merupakan bagian dari penduduk adalah penggerak roda perekonomian. Angkatan kerja yang memasuki pasar tenaga kerja akan memberikan pengaruh positif pada perekonomian. Dengan kata lain, pertumbuhan penduduk atau angkatan kerja memiliki hubungan sebab akibat yang positif untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk usia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja dapat dikelompokkan menjadi penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja ini yang disebut sebagai penduduk yang aktif secara ekonomi, memasuki pasar tenaga kerja dan menjadi komponen supply tenaga kerja, serta termasuk dalam kategori faktor produksi dalam dimensi ekonomi. Penduduk angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang termasuk kategori pengangguran. Sementara penduduk bukan

angkatan kerja adalah penduduk yang secara ekonomi tidak aktif meliputi penduduk bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

Peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja tidak hanya mengakibatkan peningkatan perekonomian daerah, namun juga menimbulkan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Jumlah penduduk angkatan kerja diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, jumlah angkatan kerja juga dipengaruhi oleh migrasi penduduk yang masuk sehingga dapat dilihat bahwa Kabupaten Tanah Bumbu dengan potensi ekonomi yang cukup tinggi telah menjadi tempat tujuan pendatang dari luar wilayah Tanah Bumbu.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu harus menghadapi tantangan terkait tenaga kerja, yaitu cara menciptakan lapangan kerja yang dapat memenuhi permintaan dari pasar tenaga kerja. Selain itu, lapangan kerja yang tersedia diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja serta migrasi masuk tenaga kerja, jika lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menyerap penawaran dari angkatan kerja yang tinggi maka akan berakibat meningkatnya pengangguran.

Ketidakmampuan menciptakan lapangan kerja yang bisa mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja dapat berakibat pada meningkatnya pengangguran terutama di kelompok penduduk muda usia 15-29 tahun. Jika penyerapan angkatan tidak optimal maka dampak dari pertumbuhan ekonomi tidak dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh BPS, pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kegiatan utama dari keseluruhan penduduk usia kerja adalah bekerja yaitu 63,63 persen, diikuti mengurus rumah tangga sebesar 21,40 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin penduduk usia kerja laki-laki 81,68 persen diantaranya memiliki kegiatan utama bekerja, jauh dibandingkan penduduk perempuan yang hanya 43,65 persen yang memiliki kegiatan utama bekerja.

Hal itu disebabkan karena pada umumnya laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga, sementara perempuan yang sudah berkeluarga umumnya lebih berkewajiban mengurus rumah tangga. Dalam proses pembangunan,

partisipasi penduduk perempuan juga penting untuk meningkatkan perekonomian. Semakin banyaknya penduduk perempuan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi menunjukkan terjadinya kesetaraan gender yang pada akhirnya diharapkan berkontribusi positif dalam pembangunan ekonomi.

**Tabel 4. 1 Persentase Penduduk Tanah Bumbu Berusia 15+ Tahun
Menurut Kegiatan Utama Tahun 2023**

Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja (TPAK)	91,06	45,01	68,57
Bekerja	84,82	42,34	64,07
Pengangguran (TPT)	6,24	2,67	4,50
Bukan Angkatan Kerja	8,94	54,99	31,43
Sekolah	5,32	5,54	5,43
Mengurus Rumah tangga	0,86	47,84	23,81
Lainnya	2,76	1,60	2,19
Penduduk Usia Kerja (15+)	100	100	100

Sumber: BPS, Sakernas 2023

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja (untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan) dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak bekerja (Sekolah atau mengurus rumah tangga) maupun menganggur. Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu. Perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indikator ini dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (*supply*) yang dapat terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian menurut jenis kelamin dan kelompok umur dapat memberikan gambaran mengenai distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi (*economically active population*) di suatu negara atau wilayah.

Berdasarkan hasil Sakernas 2023, pada tahun 2023 jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Tanah Bumbu diperkirakan berjumlah 236.446 orang. Dari jumlah tersebut penduduk yang merupakan angkatan kerja diperkirakan sebanyak 162.122 orang.

Jumlah tersebut setara dengan 68,57 persen dari total penduduk usia kerja atau penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, dikenal sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Artinya sekitar 2 dari 3 penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi melalui pertisipasinya dalam bekerja maupun sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.

Tabel 4. 2 Distribusi Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan menurut Status Angkatan Kerja Tahun 2023

Kegiatan Utama	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Tanah Bumbu						
Angkatan Kerja	110.125		51.997		162.122	
Bekerja	102.580	93,15	48.912	94,07	151.492	93,44
Pengangguran (TPT)	7.545	6,85	3.085	5,93	10.630	6,56
Bukan Angkatan Kerja	10.810		63.514		74.324	
Sekolah	6.436	59,54	6.405	10,08	12.841	17,28
Mengurus Rumah tangga	1.039	9,61	55.261	87,01	56.300	75,75
Lainnya	3.335	30,85	1.848	2,91	5.183	6,97
Jumlah	120.935		115.511		236.446	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	91,06		45,01		68,57	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,85		5,93		6,56	
Provinsi Kalimantan Selatan						
Angkatan Kerja	1.342.314		830.943		2.173.257	
Bekerja	1.276.460	95,09	803.221	96,66	2.079.681	95,69
Pengangguran (TPT)	65.854	4,91	27.722	3,34	93.576	4,31
Bukan Angkatan Kerja	227.337		714.915		942.252	
Sekolah	109.095	47,99	109.276	15,29	218.371	23,18
Mengurus Rumah tangga	49.972	21,98	562.577	78,69	612.549	65,01
Lainnya	68.270	30,03	43.062	6,02	111.332	11,82
Jumlah	1.569.651		1.545.858		3.115.509	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	85,52		53,75		69,76	

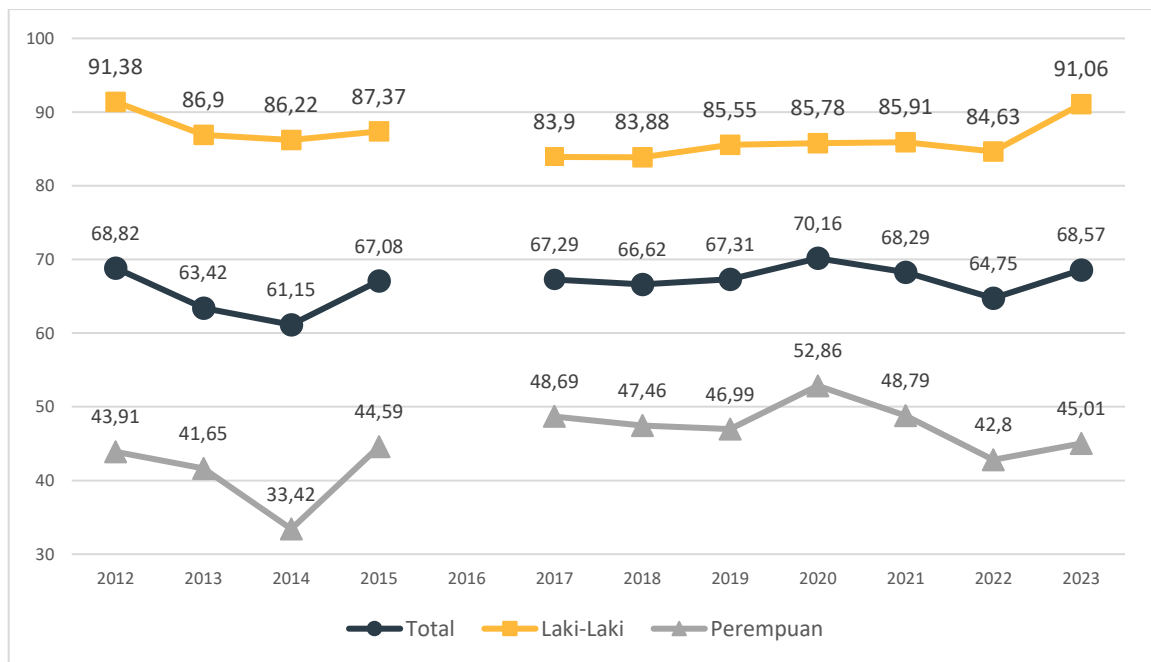
Kegiatan Utama	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,91		3,34		4,31	

Sumber: BPS, Sakernas 2023

Di Kabupaten Tanah Bumbu, angkatan kerja merupakan elemen krusial dalam perekonomian daerah. Menurut Tabel 4.4, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki jumlah angkatan kerja sebanyak 162.122 orang, yang berarti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 68,57 persen. TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa mayoritas penduduk usia kerja berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan antara TPAK laki-laki (91,06 persen) dan perempuan (45,01 persen). Dominasi laki-laki dalam angkatan kerja mencerminkan peran tradisional gender di masyarakat, di mana perempuan lebih banyak berfokus pada tugas-tugas rumah tangga (41,63 persen dari perempuan usia kerja).

TPAK Tanah Bumbu pada periode 2023 berada pada kisaran 68,57 persen. Dengan kondisi TPAK laki-laki adalah sebesar 91,06 persen dan TPAK perempuan 45,01 persen. Dibandingkan tahun lalu, terjadi peningkatan pada TPAK laki-laki sedangkan pada TPAK perempuan terjadi penurunan. Kondisi berdasarkan jenis kelamin ini menunjukkan masih dominannya peran dan partisipasi laki-laki pada pasar kerja di Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagian besar perempuan di Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai kegiatan mengurus rumah tangga. Pada tabel terlihat bahwa 41,63 persen wanita usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kegiatan mengurus rumah tangga. Kondisi di Kabupaten Tanah Bumbu masih memiliki potensi yang cukup besar bagi perempuan dalam memberikan kontribusi yang lebih besar dalam perekonomian di Kabupaten Tanah Bumbu.

Distribusi penduduk di Kabupaten Tanah Bumbu juga memberikan gambaran yang jelas tentang komposisi tenaga kerja. Dari total angkatan kerja, 93,44 persen di antaranya bekerja, sementara 6,56 persen masih menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,56 persen mencerminkan tantangan dalam penyerapan tenaga kerja, meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan dengan TPT di Provinsi Kalimantan Selatan (4,31 persen).



Gambar 4. 1 Perkembangan TPAK Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012-2023

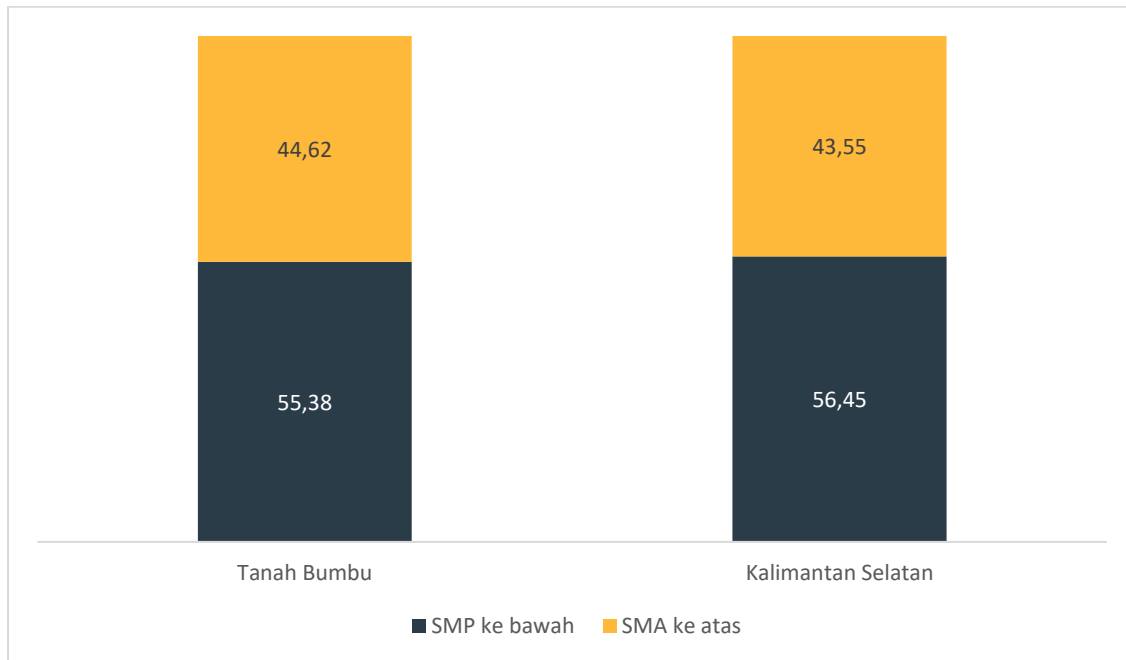
Sumber: BPS, Sakernas 2023

Keterangan: Sakernas Tahunan 2016 untuk estimasi angka kabupaten/kota ditiadakan karena efisiensi anggaran oleh kementerian keuangan

Pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanah Bumbu memiliki nilai berkisar antara 61 persen sampai 70 persen. Tahun 2014, TPAK Tanah Bumbu mencapai titik terendah. Sedangkan tahun 2022 mencapai titik tertinggi dengan TPAK adalah sebesar 70,16 persen. Jika dilihat komposisi TPAK berdasarkan jenis kelamin, kondisi TPAK terendah yang terjadi pada tahun 2014 disebabkan oleh rendahnya TPAK pada jenis kelamin perempuan yaitu sebesar 33,42 persen. Angka TPAK perempuan ini kurang dari setengah dari TPAK laki-laki yaitu sebesar 86,22 persen. Angka tersebut mengartikan bahwa partisipasi perempuan dalam angkatan kerja jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Angkatan kerja berdasarkan latar belakang pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan proporsi mereka yang menyelesaikan pendidikan SMA ke atas masih sedikit lebih baik bila dibandingkan dengan proporsi secara Kalimantan Selatan. Pada tahun 2023, angkatan kerja di Kabupaten Tanah Bumbu dengan tingkat pendidikan tamat SMA ke atas adalah sebesar 44,62 persen.

Pendidikan dan keterampilan sangat mempengaruhi kualitas tenaga kerja. Di Kabupaten Tanah Bumbu, angkatan kerja dengan pendidikan tamat SMA ke atas sedikit lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi. Namun, hanya 19,34 persen tenaga kerja yang memiliki keterampilan bersertifikat, menunjukkan kebutuhan akan peningkatan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja.

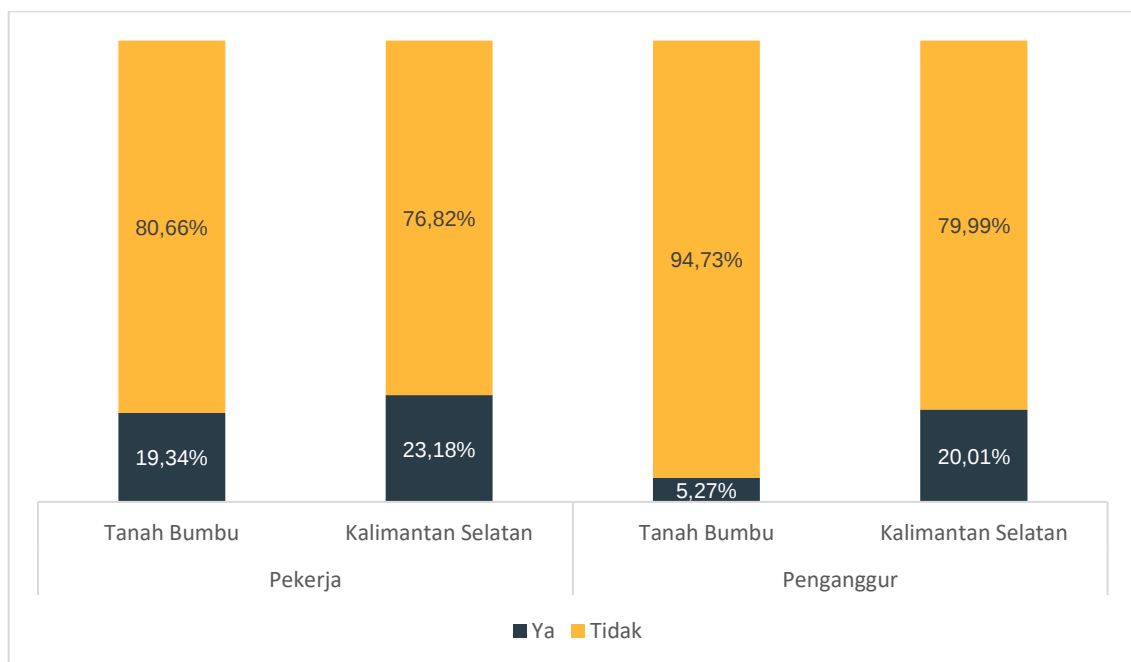


Gambar 4. 2 Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Persen)

Sumber: BPS, Sakernas 2023

Pada masa revolusi industri 4.0 ini membawa banyak dampak, yaitu hilangnya banyak jenis pekerjaan. Namun di sisi lain, banyak jenis pekerjaan baru yang muncul. Teknologi dan informasi semakin berkembang pesat sehingga pertukaran informasi semakin cepat dan banyak inovasi yang bermunculan dari kaum muda. Untuk menyikapi hal tersebut, diharapkan kaum muda dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, sebab perubahan akibat teknologi digitalisasi sekarang ini berlangsung begitu cepat. Tantangan yang tidak dapat dihindari oleh Angkatan kerja Kabupaten Tanah Bumbu yaitu hadirnya penggunaan teknologi digital, automasi dan pertukaran data secara cepat dalam segala aspek. Dengan adanya keterampilan yang dimiliki, maka diharapkan

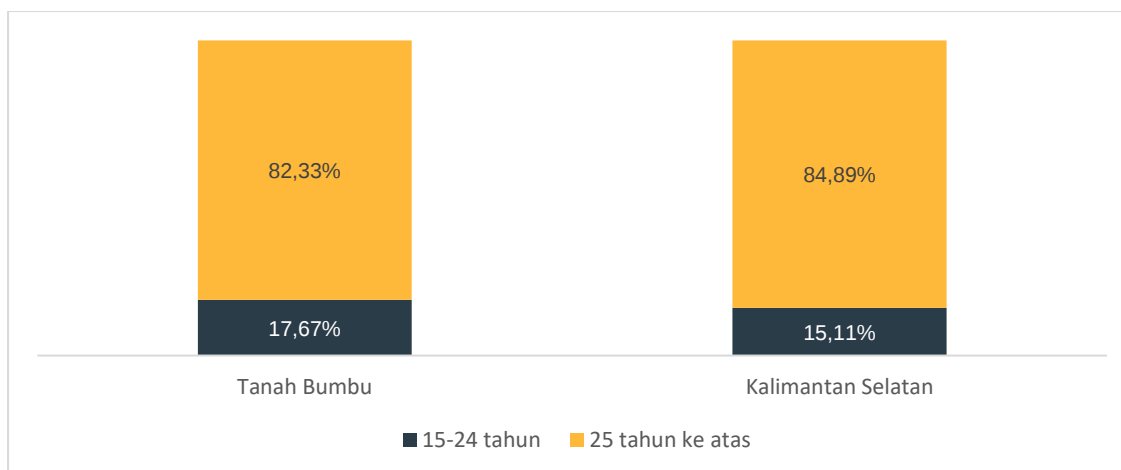
mereka menjadi sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat lebih mudah memasuki pasar tenaga kerja. Perkembangan teknologi dan digitalisasi membawa dampak signifikan terhadap pasar tenaga kerja. Kabupaten Tanah Bumbu harus beradaptasi dengan perubahan ini, terutama dengan peningkatan keterampilan digital di kalangan angkatan kerja. Tantangan utama adalah bagaimana meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terampil dalam teknologi digital untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin berkembang.



Gambar 4.3 Angkatan Kerja menurut Pelatihan yang Bersertifikat Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Persen)

Sumber: BPS, Sakernas 2023

Kondisi di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan masih sedikit angkatan kerja yang memiliki keterampilan. Dengan angka sebesar 19,34 persen pekerja di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki keterampilan yang mempunyai sertifikat. Namun, angka ini sudah lebih baik dibandingkan tahun 2021 yang hanya 17,53 persen. Sedangkan angka Provinsi Kalimantan Selatan sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 23,18 persen pekerja yang memiliki keterampilan yang mempunyai sertifikat. Jumlah penganggur di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki sertifikat hanya sebesar 5,27persen, angka ini turun cukup besar dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 18,24 persen.



Gambar 4. 4 Angkatan Kerja menurut Usia di Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Persen)

Sumber: BPS, Sakernas 2023

Tabel 4. 3 Penduduk Usia 15-24 tahun yang tidak bekerja, tidak sedang sekolah, and tidak sedang mengikuti pelatihan (*Not in employment, education, and training/NEET*) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Persentase NEET
(1)	(2)	(3)
1	Tanah Laut	27,16
2	Kota Baru	29,95
3	Banjar	20,96
4	Barito Kuala	18,97
5	Tapin	28,24
6	Hulu Sungai Selatan	24,20
7	Hulu Sungai Tengah	22,31
8	Hulu Sungai Utara	15,37
9	Tabalong	14,14
10	Tanah Bumbu	23,00
11	Balangan	18,33
12	Kota Banjarmasin	16,95
13	Kota Banjarbaru	16,87
Kalimantan Selatan		21,17

Sumber: BPS, Sakernas 2023

Di Kabupaten Tanah Bumbu, angkatan kerja didominasi oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Kondisi yang hampir sama juga terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari 10 orang angkatan kerja di Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 8 orang yang berusia 25 tahun ke atas. Jika dilihat dari besarnya penduduk usia 15-24 tahun yang tidak sekolah, tidak bekerja, tidak sedang pelatihan (Not in employment, education, and training/NEET). Pada tahun 2023, terdapat 23,00 persen penduduk usia 15-24 tahun yang NEET. Angka ini mengindikasikan potensi besar untuk peningkatan produktivitas jika kelompok ini dapat diarahkan ke dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Kebijakan dan program pelatihan serta pendidikan vokasi dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka NEET.

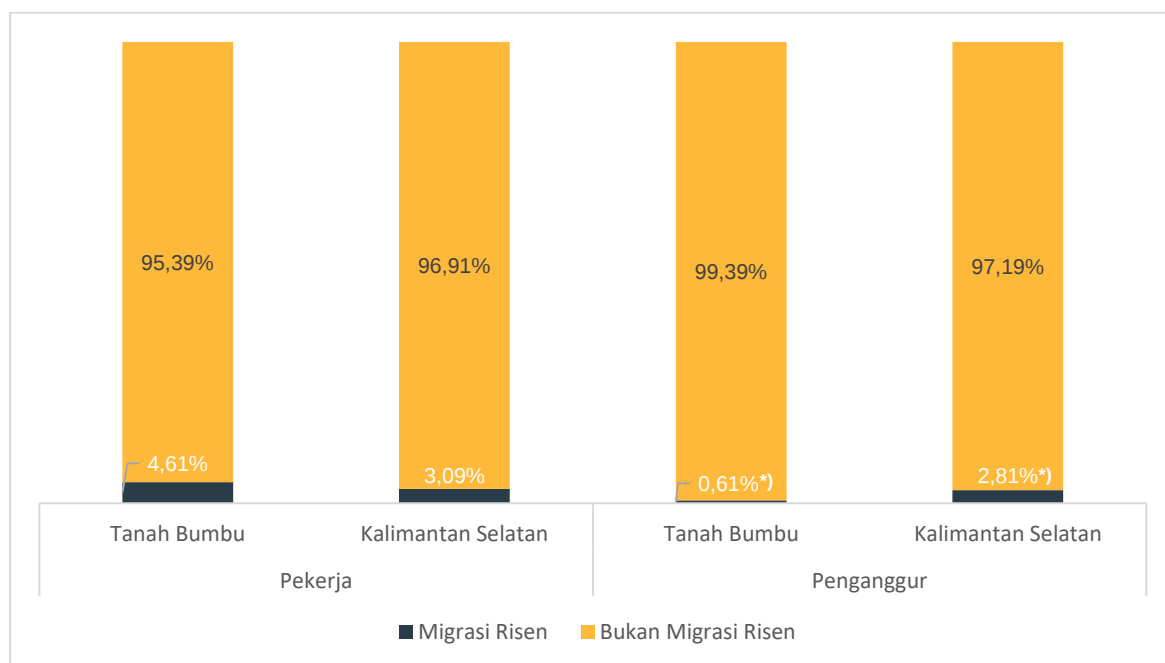
4.2. LAPANGAN USAHA DOMINAN PASAR TENAGA KERJA

Pembangunan ekonomi mampu menambahkan banyak pekerjaan baru di Kabupaten Tanah Bumbu, hal ini juga mampu mengurangi angka pengangguran yang hingga saat ini masih menjadi salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan. Pengangguran dapat menjadi indikator penting yang menjadi sumber permasalahan perekonomian karena dengan adanya pengangguran maka produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menimbulkan masalah sosial lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur pengangguran menggunakan konsep pengangguran terbuka yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (jobless) serta mereka yang merasa putus asa. Konsep inilah yang kita kenal dengan istilah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Migrasi yang dilakukan oleh angkatan kerja disebabkan oleh faktor pendorong dan faktor penarik seseorang untuk bermigrasi. Faktor pendorong berasal dari wilayah asal tenaga kerja antara lain upah/gaji yang rendah, lapangan kerja yang terbatas, rendahnya akses sosial masyarakat. Sedangkan faktor penarik dari wilayah tujuan tenaga

kerja dapat berupa gaji yang kompetitif, dan sebaliknya. Namun, hal tersebut juga mempertimbangkan apakah terdapat perbedaan yang nampak dari keuntungan yang didapatkan. Jika perbedaan tersebut tidak nampak, maka tenaga kerja dapat mengakhiri migrasinya.

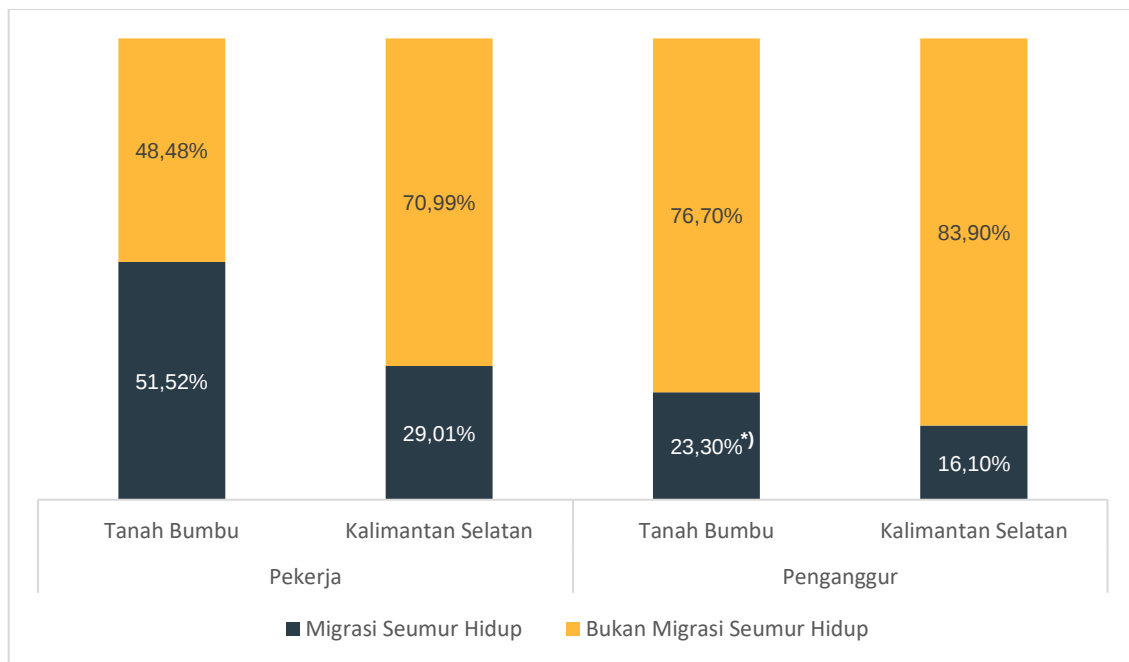


Gambar 4. 5 Angkatan Kerja di Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan menurut Migrasi Risen Tahun 2023

Sumber: BPS, Sakernas 2023

Catatan: *) memiliki nilai RSE yang tinggi

Berdasarkan teori yang dijelaskan, tingginya pengangguran kemungkinan dapat disebabkan oleh tingginya angkatan kerja dari luar yang masuk ke suatu wilayah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan besarnya persentase pekerja yang migrasi seumur hidup di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu 38,75 persen. Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah dapat menarik angkatan kerja dari luar wilayah untuk mencari pekerjaan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.



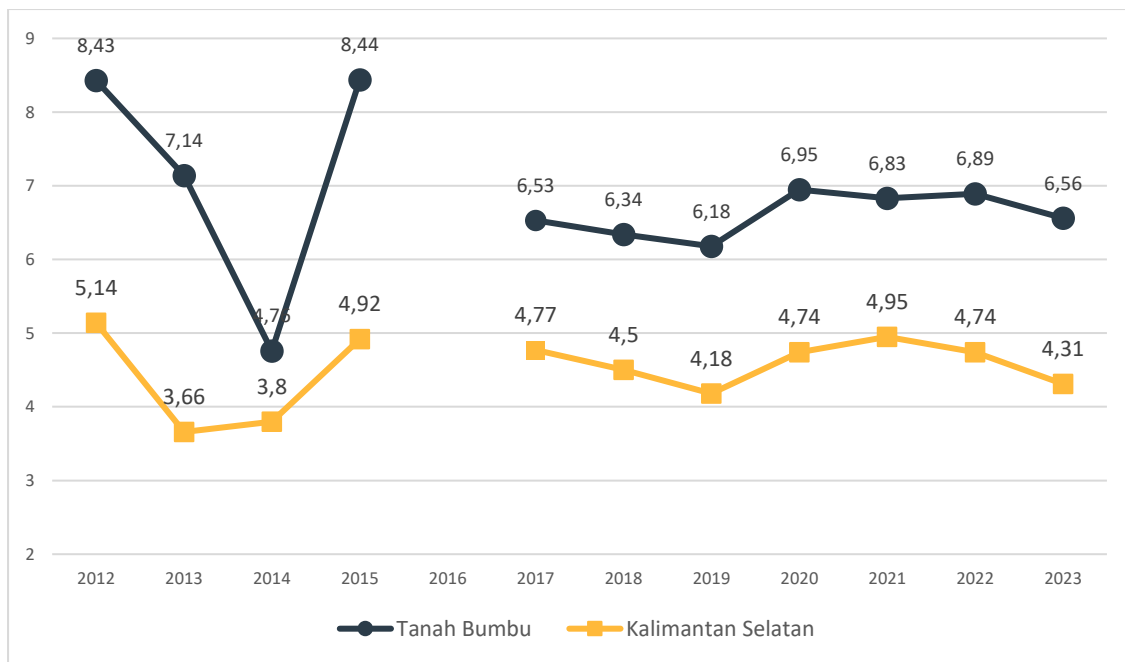
Gambar 4. 6 Angkatan Kerja di Kabupaten Tanah Bumbu menurut Migrasi Seumur Hidup Tahun 2023

Sumber: BPS, Sakernas 2023

Catatan: ^{*)} memiliki nilai RSE yang tinggi

Angka pengangguran menunjukkan banyaknya tenaga kerja yang ada di pasar tenaga kerja yang tidak mampu terserap oleh lapangan pekerjaan yang ada. Semakin besar nilainya berarti semakin banyak orang yang saat itu tidak bekerja dan siap bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Hal ini merupakan salah satu tantangan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menyerap pertumbuhan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya.

Angka pengangguran di Kabupaten Tanah Bumbu sempat mencapai 8,44 persen pada tahun 2015, namun perlahan menunjukkan tren penurunan meskipun tetap berfluktuasi nilainya antar tahun. Pada tahun 2023, angka pengangguran di Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 6,56 persen, angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yaitu 6,89 persen. Tetapi angka ini cukup jauh di atas angka pengangguran Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya sebesar 4,31 persen pada tahun yang sama.



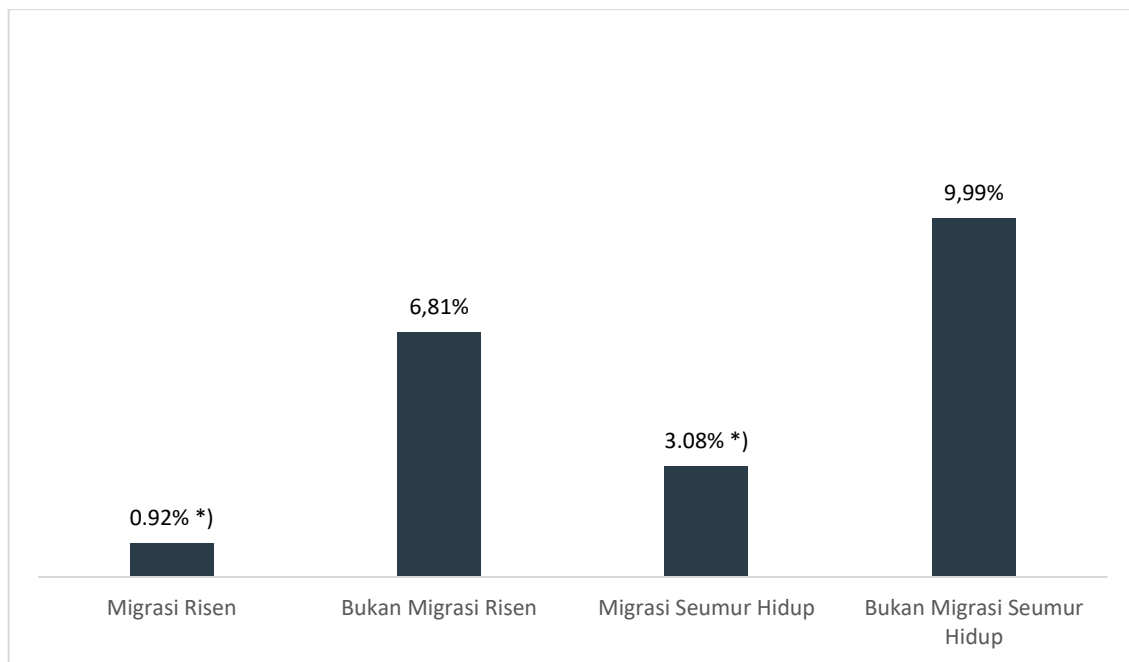
Gambar 4.7 Perkembangan TPT Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012-2023

Sumber: BPS, Sakernas 2023

Catatan: *) memiliki nilai RSE yang tinggi

Kabupaten Tanah Bumbu dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, mulai dari batu bara dan bijih besi serta hasil perkebunan seperti kelapa sawit dan karet. Selain itu, Kabupaten Tanah Bumbu juga dikenal sebagai lumbung penghasil ikan. Hal tersebut menjadi daya tarik bagi angkatan kerja dari luar wilayah untuk mengadu nasib di Kabupaten Tanah Bumbu. Oleh karena itu, angkatan kerja lokal harus siap untuk bersaing dengan angkatan kerja dari luar.

Seiring bertambahnya jumlah angkatan kerja maka tidak dipungkiri bahwa meningkat pula pengangguran, hal ini menjadi isu yang tidak bisa dihindari. Namun, jika dicermati angka pengangguran dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami tren yang menurun dari 8,43 persen pada tahun 2012 hingga 6,56 persen pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja sudah mampu terserap di pasar kerja dengan cukup baik.



Gambar 4. 8 TPT Kabupaten Tanah Bumbu menurut Pola Migrasi Tahun 2023 (persen)

Sumber: BPS, Sakernas 2023

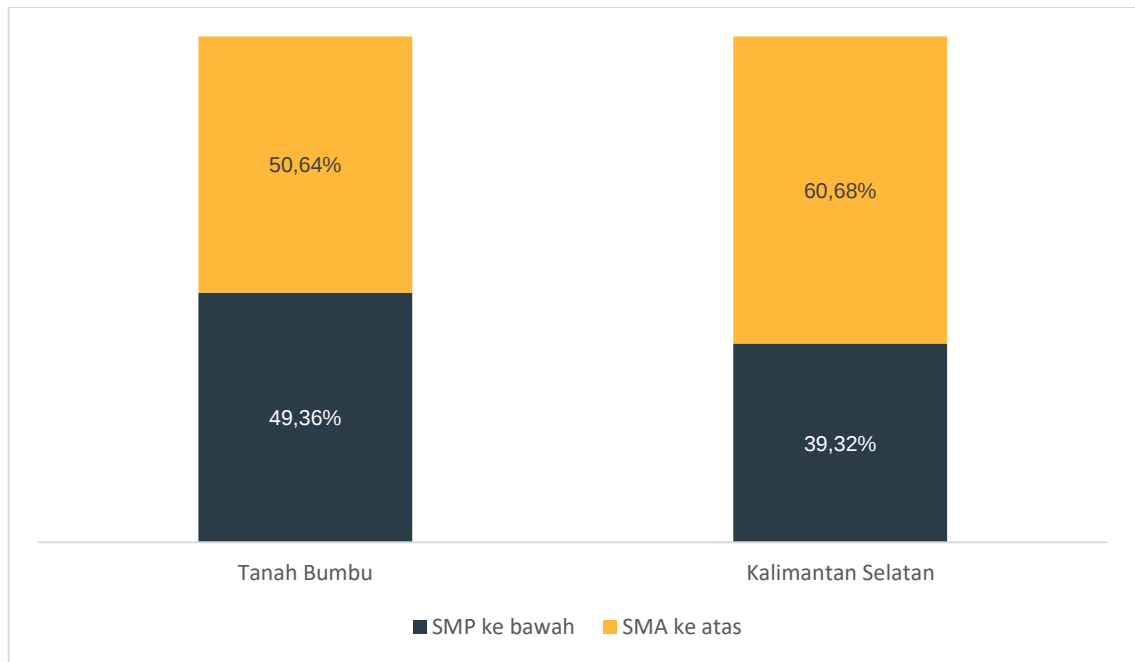
*Catatan: *) memiliki nilai RSE yang tinggi*

Jika dilihat dari pola migrasi, terlihat pada angkatan kerja yang merupakan migrasi risen (kabupaten tempat tinggal lima tahun yang lalu bukan di Kabupaten Tanah Bumbu) tingkat penganggurannya relative lebih rendah daripada mereka yang bukan migrasi risen. Pada angkatan kerja yang migrasi risen tingkat penganggurannya adalah sebesar 0,92 persen, sedangkan pada mereka yang bukan migrasi risen tingkat penganggurannya adalah sebesar 6,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja yang sudah tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu dari lima tahun yang lalu masih belum mendapatkan pekerjaan sebanyak 6,81 persen.

Kondisi serupa terjadi pada angkatan kerja yang merupakan migrasi seumur hidup (kabupaten tempat lahir berbeda dengan Kabupaten Tanah Bumbu). Pada angkatan kerja yang merupakan migrasi seumur hidup tingkat penganggurannya 3,08 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan yang bukan merupakan migrasi seumur hidup sebesar 9,99 persen. Berdasarkan pola migrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa angka pengangguran yang relatif rendah terjadi pada angkatan kerja migrasi risen dan migrasi seumur hidup.

Pengaruh tingkat Pendidikan dan kesempatan kerja terhadap pengangguran di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki keterkaitan yang unik. Seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi nilai dan kualitas kinerjanya. Namun, tidak selalu tingkat pendidikan sesuai dengan kualitas pekerjaan sehingga orang yang berpendidikan tinggi ataupun rendah tidak berbeda produktivitasnya dalam menangani pekerjaan yang sama. Pada ekonomi modern sekarang ini, angkatan kerja yang memiliki keahlian yang tinggi tidak begitu dibutuhkan lagi karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dan proses produksi yang semakin dapat disederhanakan. Dengan demikian, orang berpendidikan rendah tetapi mendapat pelatihan (yang memakan periode jauh lebih pendek dan sifatnya non formal) akan memiliki produktivitas relatif sama dengan orang berpendidikan tinggi dan formal.

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, pengangguran di Kabupaten Tanah Bumbu sebagian besar berpendidikan SMA ke atas yaitu sebesar 50,64 persen. Angka ini masih lebih rendah bila dibandingkan pengangguran yang berpendidikan SMA ke atas di tingkat Provinsi yang sebesar 60,68 persen. Dari sudut pandang ekonomi, hal tersebut terjadi karena pengangguran berpendidikan cenderung meningkat pada saat masyarakat mengalami proses modernisasi dan industrialisasi. Meskipun demikian, revolusi digital dapat mendorong lapangan kerja baru sehingga pemerintah dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang melek teknologi dan sesuai dengan perkembangan zaman.



Gambar 4. 9 Pengangguran di Kabupaten Tanah Bumbu menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023 (persen)

Sumber: BPS, Sakernas 2023

4.3. PENGANGGURAN

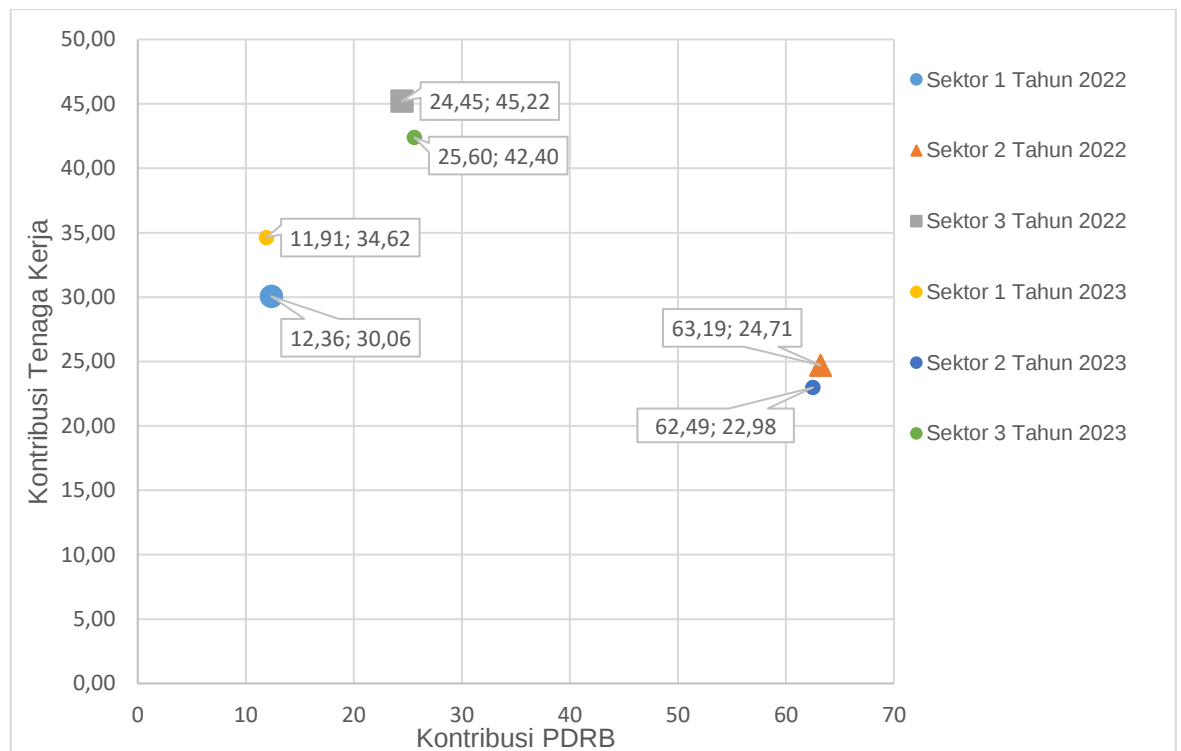
Kabupaten Tanah Bumbu merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam serta memiliki wilayah yang sangat luas. Kondisi ini memberikan potensi dalam bidang pertambangan dan pertanian yang mana struktur ekonomi Kabupaten Bumbu didominasi oleh kedua sektor ini. Pada tahun 2023, kontribusi kedua sektor ini bagi perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu yaitu 49,88 persen dari sektor pertambangan dan 11,91 persen dari sektor pertanian.

Tabel 4. 4 Persentase Penduduk Bekerja dan Kontribusi terhadap PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 dan 2023 Kabupaten Tanah Bumbu

Sektor	Kontribusi PDRB		Kontribusi Tenaga Kerja	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian, Kehutanan, Perikanan	12,36	11,91	30,06	34,62
Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi	63,19	62,49	24,72	22,98
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa lainnya	24,45	25,60	45,22	42,40
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, PDRB dan Sakernas 2022-2023

Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Tanah Bumbu sebesar 0,45 persen, yaitu dari 12,36 persen menjadi 11,91 persen. Pada sektor pertambangan terjadi penurunan sebesar 0,55 persen dari 50,43 persen menjadi 49,88 persen. Sedangkan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dan lainnya dalam PDRB Kabupaten Tanah Bumbu mengalami peningkatan. Sektor perdagangan besar dan eceran dan lainnya merupakan sektor dengan persentase kontribusi tenaga kerja paling besar. Namun, pada tahun 2023 persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor perdagangan besar dan eceran dan lainnya mengalami penurunan dari 45,22 persen menjadi 42,40 persen.



Gambar 4.10 Persentase Penduduk Bekerja dan Kontribusi terhadap PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 dan 2023 Kabupaten Tanah Bumbu

Sumber: BPS, Sakernas 2022 dan 2023

Catatan:

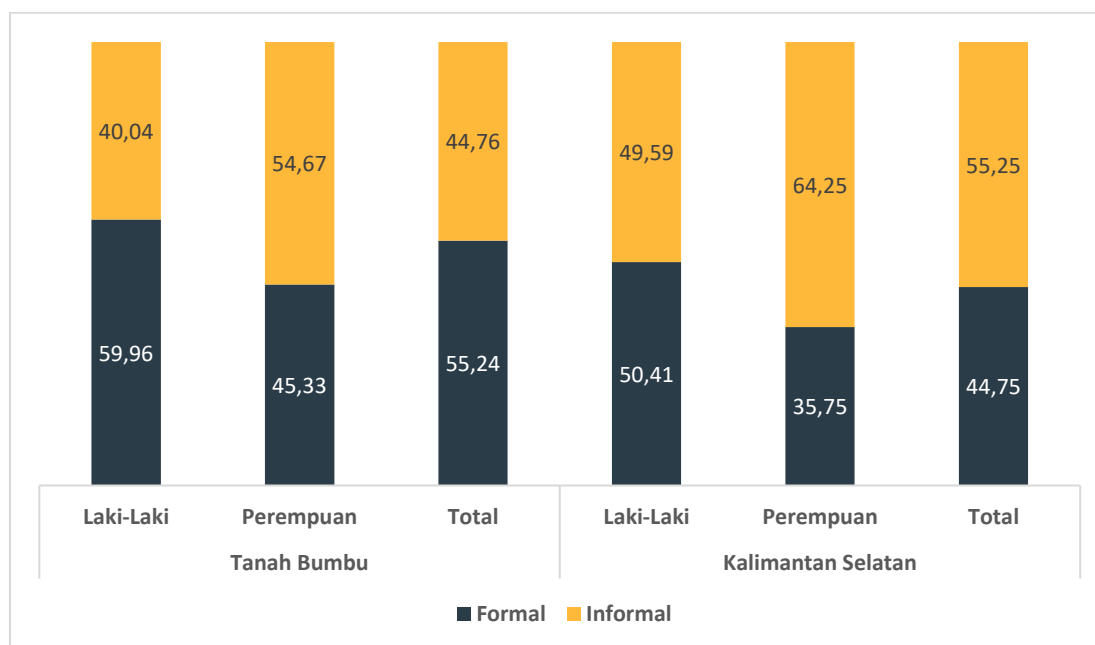
Sektor 1 : Pertanian, Kehutanan, Perikanan

Sektor 2 : Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi

Sektor 3 : Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa lainnya

Pada tahun 2023, sektor 2 dapat dilihat berkontribusi paling besar pada PDRB namun sektor 3 masih menjadi primadona dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan demikian, sektor 3 di Kabupaten Tanah Bumbu cenderung menawarkan status pekerjaan informal kepada tenaga kerja yang diserapnya. Status pekerjaan informal didefinisikan sebagai pekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan pekerja tidak dibayar, pekerja bebas serta pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga. Di Kabupaten Tanah Bumbu pekerja informal masih

mendominasi penyerapan tenaga kerja yang ada. Pada tahun 2023, secara total pekerja informal adalah sebesar 47,71 persen, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi di Provinsi Kalimantan Selatan, angka pekerja informal ini adalah lebih rendah. Pekerja informal di Provinsi Kalimantan Selatan adalah lebih dari seluruh pekerja yaitu sebesar 59,63 persen.



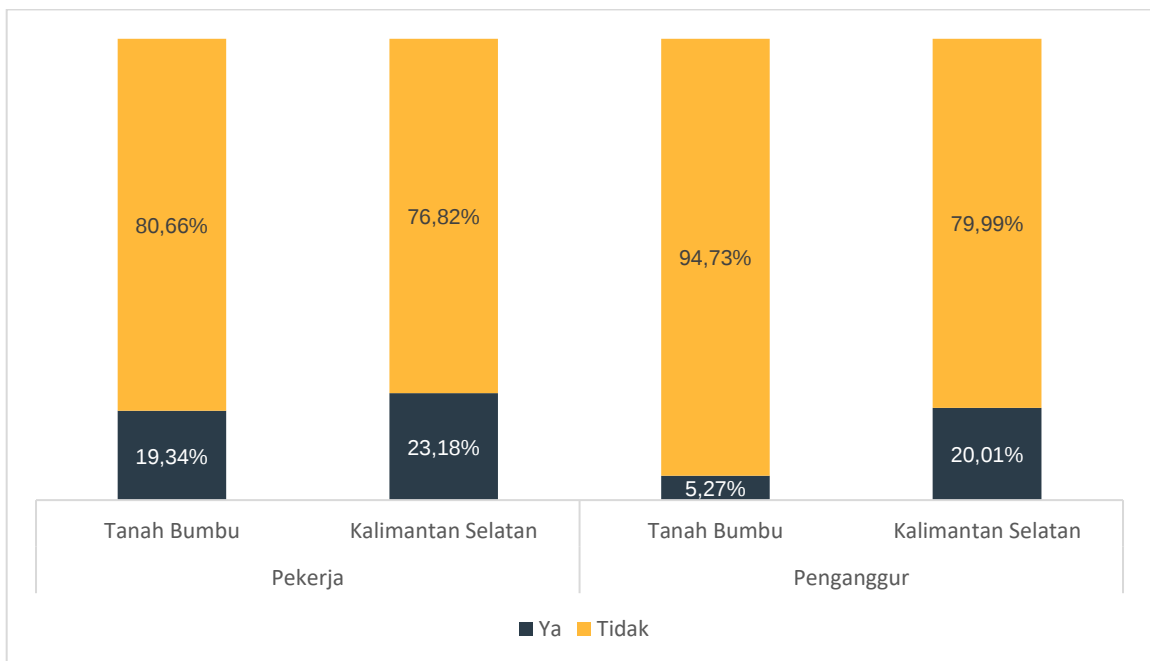
Gambar 4.11 Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Formal dan Informal dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

Sumber: BPS, Sakernas 2023

Jika dilihat menurut jenis kelamin, terdapat perbedaan dalam persentase pekerja informal dan formal di Kabupaten Tanah Bumbu. Data menunjukkan bahwa pekerja perempuan cenderung bekerja pada pekerjaan informal yaitu 54,67 persen dari total pekerja perempuan, sedangkan laki-laki cenderung bekerja pada pekerjaan formal yaitu 59,96 persen dari total pekerja laki-laki. Jika dilihat secara keseluruhan, pekerja informal di Kabupaten Tanah Bumbu lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Selatan.

4.4 PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK PERTUMBUHAN DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

Pada beberapa dekade terakhir ini teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring dengan pesatnya inovasi dan perkembangan teknologi, masyarakat kini telah beralih menggunakan smartphone, tablet, internet, dan berbagai perangkat canggih lainnya. Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia, pemerintah diharapkan melakukan investasi sumber daya manusia terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini menjadi bekal bagi angkatan kerja dalam menyikapi perkembangan teknologi yang mempengaruhi pasar tenaga kerja. Kemajuan teknologi tidak hanya berpeluang untuk mengurangi lapangan pekerjaan, tetapi juga berpeluang untuk menawarkan lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan produktivitas.



Gambar 4. 12 Persentase Angkatan Kerja menurut Keterampilan Bersertifikat yang Dimiliki di Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

Sumber: BPS, Sakernas 2023

Pada Sakernas 2023, angkatan kerja yang memiliki keterampilan dapat dilihat dengan syarat mempunyai sertifikat pelatihan/kursus/training. Pada tahun 2023, pekerja yang mendapatkan pelatihan/kursus/training yang bersertifikat sebesar 19,34 persen. Pada kelompok pengangguran terjadi kondisi yang berbeda, yaitu hanya 5,27 persen yang memiliki keterampilan. Secara tidak langsung, kepemilikan keterampilan

bersertifikat memiliki pengaruh dalam dunia kerja. Secara umum, sebanyak 8 dari 10 angkatan kerja di Kabupaten Tanah Bumbu tidak mempunyai keterampilan yang bersertifikat. Dengan kata lain, sebagian besar pekerja atau pengangguran di Kabupaten Tanah Bumbu tidak mempunyai keterampilan yang bersertifikat.

Selain keterampilan yang bersertifikat, penguasaan teknologi juga bermanfaat meningkatkan kualitas tenaga kerja. Jika seorang tenaga kerja mempunyai penguasaan teknologi yang bagus, maka produktifitasnya juga akan meningkat dan pekerjaan yang dilakukan pasti akan lebih efisien. Seperti misalnya pada era sekarang, e-commerce sudah lebih populer dan sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat.

Tabel 4. 5 Pekerja yang Menggunakan Internet atau Tidak dalam Pekerjaan Utama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023

Kegiatan seminggu yang lalu	Menggunakan Internet Pada Pekerjaan Seminggu yang Lalu		Jumlah
	Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	81,98%	18,02%	100%
Buruh/karyawan/pekerja dibayar	95,26%	4,74%	100%

Sumber: BPS, Sakernas 2023

Penggunaan internet dalam pekerjaan utama seminggu yang lalu di tahun 2023 semakin meningkat dibanding tahun 2021 dari 66,24 persen menjadi 81,98 persen bagi pekerja yang berusaha sendiri. Buruh/karyawan/pekerja dibayar juga cenderung menggunakan internet pada pekerjaannya, dapat terlihat dari tabel di atas, yaitu sebesar 95,26 persen sedangkan sisanya 4,74 persen tidak menggunakan internet. Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa teknologi telah mengubah cara kerja manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Masyarakat dituntut untuk melek teknologi supaya tetap dapat berjalan selaras dengan perkembangan. Oleh karena itu, perlu peran dari pemerintah dalam mendukung terwujudnya melek teknologi bagi masyarakat.

4.5 TINGKAT KESEMPATAN KERJA

Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja. Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi TKK, kesempatan kerja semakin tinggi.

Tabel 4. 6 Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	TKK
(1)	(2)	(3)
1	Tanah Laut	96,42
2	Kota Baru	93,39
3	Banjar	96,23
4	Barito Kuala	96,53
5	Tapin	93,98
6	Hulu Sungai Selatan	97,40
7	Hulu Sungai Tengah	96,34
8	Hulu Sungai Utara	95,68
9	Tabalong	95,90
10	Tanah Bumbu	93,15
11	Balangan	96,99
12	Kota Banjarmasin	92,50
13	Kota Banjarbaru	94,88
Kalimantan Selatan		95,09

Sumber: BPS, Sakernas 2023

Tingkat kesempatan kerja untuk kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 adalah sebesar 93,15 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan angka provinsi Kalimantan Selatan yaitu 95,09 persen. Angka tersebut dapat mengindikasikan bahwa kesempatan kerja di Kabupaten Tanah Bumbu termasuk rendah dibanding kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan.

Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan beberapa tren penting. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi menandakan bahwa sebagian

besar penduduk usia kerja aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun, tantangan besar masih ada dalam hal kesetaraan gender dalam angkatan kerja, pengangguran, serta peningkatan keterampilan dan pendidikan. Dengan fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, serta adaptasi terhadap perubahan teknologi, Kabupaten Tanah Bumbu dapat lebih meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya.

KEMISKINAN

"UNDP mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup "





BAB V

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

5.1. PENGENTASAN KEMISKINAN SEBAGAI SASARAN PEMBANGUNAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang dihadapi seluruh negara dalam melaksanakan pembangunan. Kenyataannya masalah kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang memang lebih kompleks dan bersifat multidimensional karena sangat erat kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Pemerintah menyadari bahwa masalah kemiskinan selalu menjadi salah satu prioritas utama untuk ditangani dalam proses pembangunan. Kegagalan dalam menangani masalah kemiskinan akan menyebabkan munculnya beberapa persoalan lanjutan seperti sosial, politik dan keamanan di tengah - tengah masyarakat.

Kemiskinan menurut *World Bank* (2000) didefinisikan sebagai, "*poverty is pronounced deprivation in well-being*" yang bermakna bahwa kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan. Sedangkan permasalahan inti pada kemiskinan ini adalah batasan-batasan tentang kesejahteraan itu sendiri. *United Nations Development Program* (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup. Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Upaya penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak negara ini merdeka melalui berbagai upaya penganggulangan masalah sosial. Bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang Undang Dasar 1945 memiliki perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Upaya serius melalui program penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak era Orde Baru selama periode Repelita. Meskipun sempat dihantam dengan krisis ekonomi yang memicu krisis lainnya, program-program penanggulangan kemiskinan terus dilakukan sampai sekarang dan diperbaiki bentuknya mengikuti perkembangan kondisi masyarakat agar diperoleh hasil maksimal.

Penanggulangan kemiskinan ini menjadi semakin penting mengingat kemiskinan menjadi sebab terciptanya masalah sosial lain di tengah masyarakat. Permasalahan seperti kebodohan, buta huruf, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia maupun masalah sosial lainnya seringkali bermula dari kondisi kemiskinan yang terjadi. Hal-hal seperti ini lebih mungkin terjadi pada anak yang lahir dari keluarga menengah ke bawah. Berbagai masalah sosial lanjutan yang mungkin muncul dari adanya kemiskinan mengharuskan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk selalu menjadikan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama.

Penanggulangan kemiskinan secara strategis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh masyarakat mampu menikmati kehidupan yang layak dan bermartabat. Untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan ketersediaan data yang akurat menjadi sesuatu hal yang wajib dimiliki. Data kemiskinan ini dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang setiap tahunnya melaksanakan survei yang salah satu tujuannya adalah untuk mengukur kondisi kemiskinan masyarakat. Data kemiskinan yang akurat dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menjadi dasar masukan bagi program pengentasan kemiskinan selanjutnya agar tepat sasaran.

5.2. MENGUKUR KEMISKINAN

Pembahasan tentang kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari pembahasan ekonomi. Beberapa studi empiris, seperti Deininger dan Squire (1995, 1996) menyimpulkan bahwa ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan peningkatan angka kemiskinan. Namun studi yang dilakukan oleh World Bank (1990), Fields dan Jakobson (1989) dan Ravallion (1995), menunjukkan tidak ada korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Kajian-kajian empiris di atas pada hakekatnya adalah menguji hipotesis Kuznets di mana hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan negatif, sebaliknya hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi adalah hubungan positif. Hubungan ini sangat terkenal dengan nama kurva U terbalik dari Kuznets. Kuznets menyimpulkan bahwa pola hubungan yang positif kemudian menjadi negatif, menunjukkan terjadi proses evolusi dari distribusi pendapatan dari masa transisi suatu ekonomi pedesaan (rural) ke suatu ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi industri.

Meski demikian variabel pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya variabel yang berpengaruh terhadap kemiskinan, terdapat beberapa variabel dominan lainnya yang berperan dalam mempengaruhi pola kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan serta variabel lainnya sangat mempengaruhi pola kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan adalah kondisi yang utama (*necessary condition*) tetapi perlu variabel-variabel pendukung lainnya (*sufficient conditions*) untuk menekan angka kemiskinan. Identifikasi terhadap necessary conditions dan sufficient conditions sangat membantu pengambil keputusan untuk membuat kebijakan, membuat analisa, atau peramalan yang dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan usaha untuk menekan kemiskinan.

Pada banyak kasus, sering pula dijumpai negatifnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Ada beberapa alasan mengapa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berdampak pada penurunan kemiskinan. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi ditopang oleh

sektor-sektor yang memiliki elastisitas lapangan kerja rendah, tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun ditopang oleh keberadaan industri milik negara yang memperoleh sejumlah proteksi tertentu juga tidak menjamin akan dapat menyelesaikan kemiskinan. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang oleh industri canggih juga berpotensi memperparah masalah kemiskinan dan pengangguran jika struktur tenaga kerja yang ada didominasi oleh tenaga kerja berkemampuan rendah.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan.

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin", misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pengeluaran.

Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk "termiskin", misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pengeluaran. Ukuran kemiskinan yang sering digunakan Bank Dunia adalah menggunakan batas kemiskinan PPP (*Purchasing Power Parity*) US\$ perkapita per hari. Saat ini ukuran yang digunakan Bank Dunia adalah US\$ 1,25 perkapita per hari.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang artinya keuangan/pendapatan bukan satu-satunya ukuran yang harus diperhatikan. Banyak variable non keuangan yang juga dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan secara lebih luas. Ranis, Ravallion dan Datt menurut analisisnya dalam publikasi World Bank memasukan faktor seperti tingkat kemudahan mendapatkan pendidikan yang murah, hak mendapatkan informasi, layanan kesehatan yang mudah dan murah, perasaan aman baik dalam mendapatkan pendidikan dan lapangan kerja, dan lain lain.

BPS menghitung kemiskinan dengan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Komponen kebutuhan dasar yang digunakan BPS ini terdiri dari kebutuhan makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis

Kemiskinan Non makanan (GNKM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Pengukuran kemiskinan ini menggunakan 3 indikator utama yaitu:

1. **Head Count Index (HCI-P0)**, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
2. **Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1)** yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan
3. **Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)** yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

5.3. PERKEMBANGAN KEMISKINAN TANAH BUMBU

Kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren menurun, meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2021. Berdasarkan data kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Bumbu kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan penurunan sebesar 0,14 poin dibandingkan tahun 2022.

Tabel 5. 1 Perkembangan Kondisi Kemiskinan Kabupaten Tanah Bumbu 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	475.763	513.803	530.568	557.500	619.249
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	17,34	16,83	18,92	17,22	17,17
Presentase Penduduk Miskin / P0 (%)	4,85	4,60	4,82	4,26	4,12
Tingkat Kedalaman / P1	0,79	0,69	0,65	0,36	0,42
Tingkat Keparahan / P2	0,19	0,14	0,12	0,07	0,07

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Berdasarkan Tabel 5.1 jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada Tahun 2021 yaitu sebanyak 18,92 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanah Bumbu mengalami penurunan di 2022 dan 2023 dibandingkan tahun 2021. Persentase penduduk miskin pada tahun 2023 merupakan angka terendah dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, atau bisa dikatakan sejak Kabupaten Tanah Bumbu resmi berdiri pada tahun 2003. Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Bumbu adalah 4,12 persen, menurun dari 4,26 persen pada tahun 2022. Pencapaian ini merupakan hasil dari upaya

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menurunkan angka kemiskinan seperti yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Namun, Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 0,36 pada 2022 menjadi 0,42 pada 2023, menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Selain itu, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan, persentase penduduk miskin Tanah Bumbu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tercatat berada di bawah angka provinsi setelah dalam beberapa tahun sebelumnya berada diatas angka provinsi. Tren penurunan angka kemiskinan ini memberi indikasi yang baik akan adanya

peningkatan kesejahteraan penduduk sebagai dampak keberhasilan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat.

Berbagai program pembangunan sebagai usaha pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terlihat menunjukkan hasil yang positif ditandai dengan terus menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu. Program pemerintah pusat untuk rakyat miskin terlaksana melalui program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), bansos Rastra yang kemudian diganti dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM), Bantuan Subsidi Upah (BSU), maupun Bantuan UMKM.

Dukungan program tambahan dari pemerintah daerah di bidang kesehatan, pendidikan maupun perumahan di Kabupaten Tanah Bumbu cukup membantu seluruh lapisan masyarakat terutama kelompok menengah ke bawah. Program tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi beban hidup penduduk dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah dengan menjamin kesehatan dan pendidikannya, sehingga masyarakat terutama masyarakat miskin tidak terbebani dengan biaya kesehatan dan pendidikan.

Pasca pandemi Covid-19, pemerintah telah mencabut peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak pada kembalinya pola perilaku masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari yang pada akhirnya juga akan berdampak pada pola pengeluaran masyarakat. Anak-anak dapat kembali bersekolah, kembalinya para pekerja ke kantor, tidak ada pembatasan pada moda transportasi seperti penerbangan dan dibukanya tempat wisata. Secara khusus kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu kembali hidup terutama di sektor akomodasi dan makan minum. Dengan dibukanya tempat wisata, tingkat okupansi penginapan atau hotel semakin tinggi dan warung atau rumah makan sekitar tempat wisata semakin banyak.

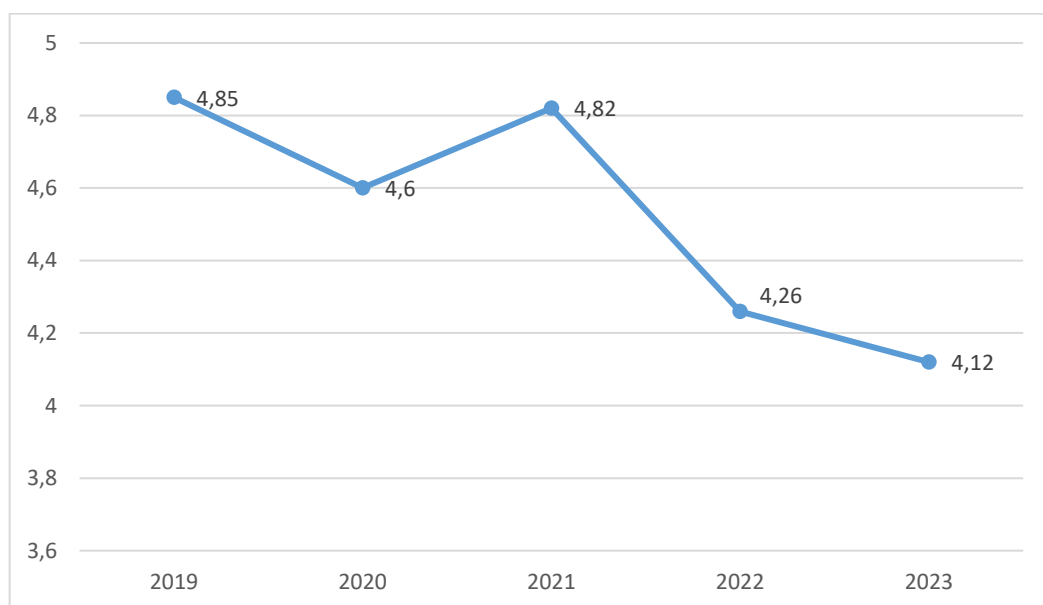
Grafik 5.1 menunjukkan perkembangan persentase penduduk miskin (Po) di Kabupaten Tanah Bumbu selama periode 2019 hingga 2023. Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu dan menggambarkan tren penurunan kemiskinan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 4,84 persen. Angka ini menurun menjadi 4,59 persen pada tahun 2020. Meskipun terjadi sedikit kenaikan pada tahun 2021 menjadi 4,82 persen, tren menurun kembali pada tahun-tahun berikutnya, dengan angka 4,26 persen pada tahun 2022 dan mencapai titik terendah 4,12 persen pada tahun 2023. Pada Tahun 2019 ke 2020 terdapat penurunan dari 4,84 persen menjadi 4,59 persen menunjukkan adanya pengurangan kemiskinan sebesar 0,25 poin persentase. Penurunan ini bisa diindikasikan oleh berbagai program pengentasan kemiskinan yang mulai menunjukkan hasil positif. Pada Tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan kecil dari 4,59 persen menjadi 4,82 persen menunjukkan adanya sedikit peningkatan dalam persentase penduduk miskin. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global atau bencana alam yang mempengaruhi ekonomi lokal.

Tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan signifikan dari 4,82 persen menjadi 4,26 persen mencerminkan adanya langkah-langkah efektif yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Penurunan sebesar 0,56 poin persentase ini mengindikasikan perbaikan yang signifikan dalam kondisi ekonomi dan sosial. Pada tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan lebih lanjut dari 4,26 persen menjadi 4,12 persen menunjukkan tren penurunan yang terus berlanjut. Meskipun penurunan ini lebih kecil dibandingkan periode sebelumnya, tetap menunjukkan konsistensi dalam pengurangan kemiskinan. Grafik perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan yang positif.

Meskipun ada sedikit kenaikan pada tahun 2021, secara keseluruhan, data menunjukkan upaya yang sukses dalam mengurangi kemiskinan. Penurunan konsisten ini mencerminkan efektivitas program pemerintah dan peningkatan kondisi ekonomi serta sosial di daerah tersebut. Tetap diperlukan upaya

berkelanjutan untuk mempertahankan dan mempercepat penurunan kemiskinan di masa mendatang.

Penurunan angka kemiskinan dalam kurun waktu dua tahun terakhir berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu yang mencapai 4,84 pada tahun 2023. Kondisi ini menggambarkan adanya pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yang merata sehingga masyarakat kelompok menengah ke bawah juga mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga menandakan adanya peningkatan daya beli masyarakat. Semakin besar perputaran uang dalam perekonomian masyarakat maka semakin banyak penduduk yang merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut.



Gambar 5.1 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2019-2023

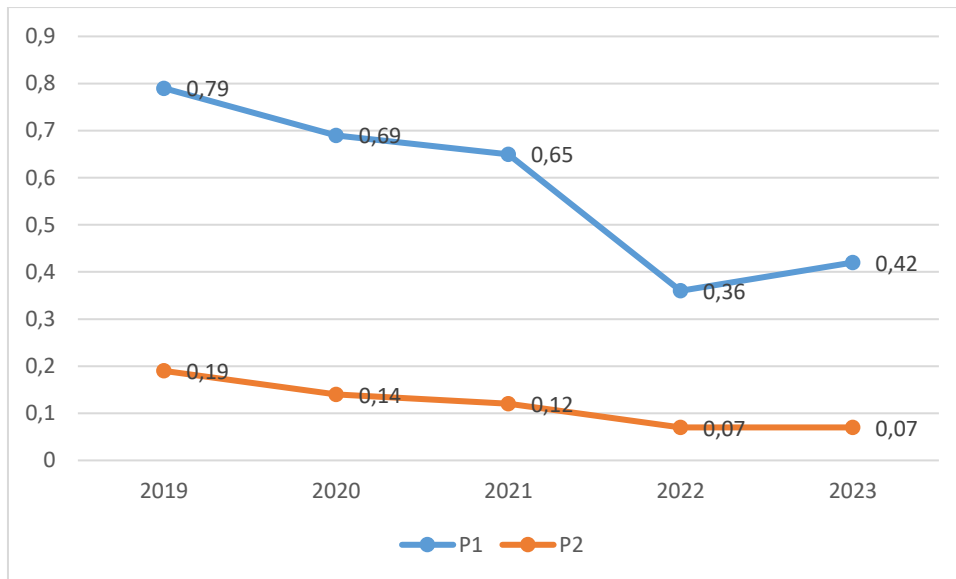
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Salah satu kebijakan dalam pemulihan ekonomi pasca Covid-19 oleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu adalah pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat kelompok bawah. Hal ini bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat agar dapat meningkatkan pola konsumsi. Menjaga pola konsumsi masyarakat ini menjadi penting selain untuk

mengurangi angka kemiskinan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu juga adanya subsidi yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi BBM untuk masrakan maupun untuk petani, subsidi pupuk dan subsidi perumahan. Subsidi ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk kelompok menengah ke bawah.

Selain pemberian BLT, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga menyiapkan anggaran untuk bantuan modal UMKM. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berpotensi besar dalam memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19. UMKM diharapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat terutama produk lokal seperti olahan daging ikan, gula merah, kayu manis dan produk unggulan lainnya. Selain pemberian modal, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi UMKM untuk menurus perizinan di DPMPSTSP. Berbagai kegiatan juga dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu seperti pasar murah, bazaar UMKM dan event besar lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui UMKM agar pertumbuhan ekonomi juga dapat dinikmati oleh kelompok bawah dan dapat menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Tanah Bumbu.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin saja, terdapat dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain menekan jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan kebijakan penanganan kemiskinan yang baik seharusnya juga dapat mengurangi kesenjangan diantara penduduk miskin. Tahun 2023 berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, penurunan persentase penduduk miskin tidak diikuti dengan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahhan Kemiskinan. Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 5.2 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu

Grafik 5.2 menunjukkan perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) selama periode 2019 hingga 2023. Indeks-indeks ini merupakan indikator penting untuk memahami dimensi dan tingkat keparahan kemiskinan di daerah tersebut. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur jarak rata-rata penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks ini, semakin besar jarak pendapatan penduduk miskin dari garis kemiskinan. Tahun 2019 ke 2020 menunjukkan bahwa P1 menurun dari 0,79 pada tahun 2019 menjadi 0,69 pada tahun 2020, menunjukkan perbaikan dalam kondisi pendapatan penduduk miskin. Penurunan sebesar 0,10 poin ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan penduduk miskin mendekati garis kemiskinan. Pada Tahun 2020 ke 2021, P1 kembali menurun dari 0,69 menjadi 0,65, meskipun hanya 0,04 poin, ini tetap mengindikasikan perbaikan. Pada 2021 ke 2022 mengalami penurunan signifikan terjadi dari 0,65 pada tahun 2021 menjadi 0,36 pada tahun 2022, menunjukkan peningkatan yang substansial dalam pengurangan kedalaman kemiskinan. Pada tahun 2023, P1 sedikit meningkat menjadi 0,42. Kenaikan ini mungkin disebabkan oleh kondisi ekonomi

makro atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendapatan penduduk miskin.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengukur distribusi pendapatan di antara penduduk miskin. Indeks ini memperhitungkan apakah pendapatan sangat terdistribusi tidak merata di antara penduduk miskin. Pada tahun 2019 ke 2020, P2 menurun dari 0,19 pada tahun 2019 menjadi 0,14 pada tahun 2020, menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan di antara penduduk miskin. Tahun 2020 ke 2021, Penurunan berlanjut dari 0,14 menjadi 0,12 pada tahun 2021, yang berarti peningkatan dalam kesejahteraan di antara penduduk miskin. Tahun 2022 ke 2023, P2 tetap di angka 0,7. Kedua indeks ini menunjukkan bahwa secara umum, ada perbaikan dalam kedalaman dan distribusi kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu antara tahun 2019 dan 2023. Penurunan konsisten pada P1 hingga tahun 2022 mencerminkan bahwa pendapatan penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, meskipun ada sedikit peningkatan pada tahun 2023.

Sejak tahun 2019 berdasarkan data kemiskinan BPS, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung mengalami penurunan. Akan tetapi, indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami kenaikan dari 0,36 pada 2022 menjadi 0,42 pada tahun 2023. Indeks ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan tidak mengalami perubahan dengan nilai sebesar 0,07 pada 2022 dan 2023. Kenaikan ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu agar rata-rata pengeluaran penduduk miskin bisa semakin mendekati garis kemiskinan.

5.4. PENGELUARAN PER KAPITA

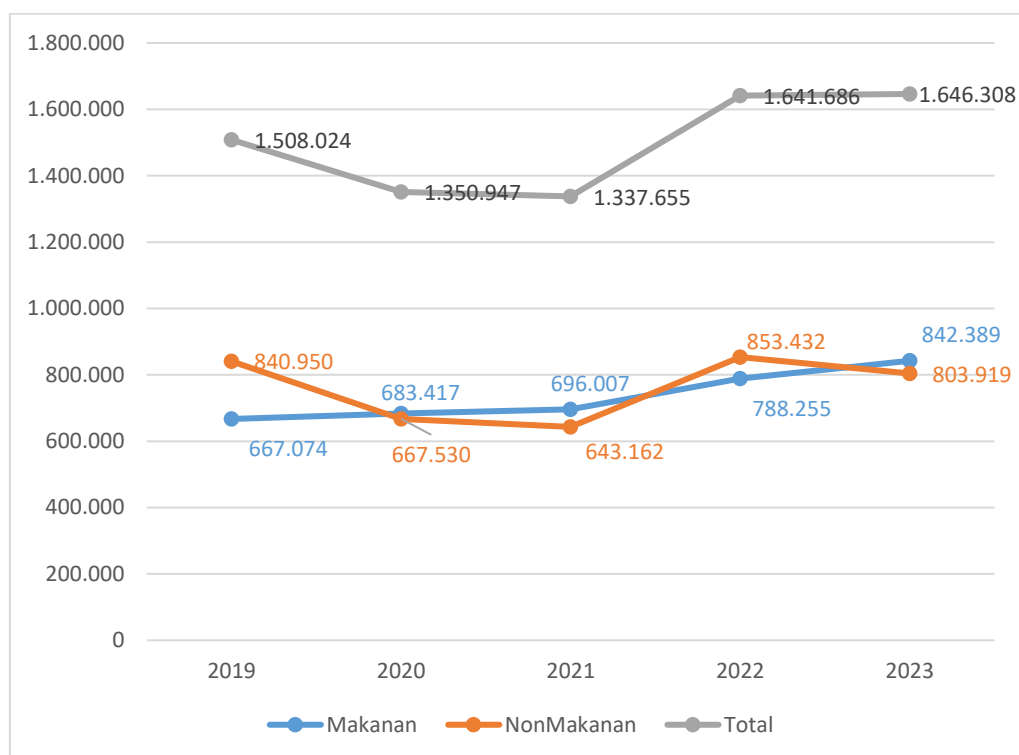
Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Perubahan tingkat kesejahteraan dilakukan dengan melihat pola pengeluaran rumah tangga berdasarkan pengeluaran. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan untuk bukan makanan. Di negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan

masih merupakan bagian terbesar dari keseluruhan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Perubahan angka persentase tersebut setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf kehidupan rumah tangga.

Secara umum pengeluaran rumah tangga terbagi menjadi konsumsi/pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Pola konsumsi masyarakat dapat digambarkan melalui kedua pengeluaran tersebut. Permintaan (demand) terhadap kedua kelompok tersebut berbeda sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan terbatas akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan makanan dibandingkan kebutuhan non makanan. Pada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pengeluarannya berupa makanan, semakin besar tingkat pendapatan porsi pengeluaran untuk makanan akan berkurang dan pengeluaran non makanan akan menjadi lebih banyak.

Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk, dan perubahan komposisinya sebagai indikasi perubahan tingkat kesejahteraan. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumahtangga. Sebaliknya di negara-negara maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa, merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumahtangga. Pengeluaran tersebut tidak bersifat primer lagi, antara lain pengeluaran untuk perawatan kesehatan, perawatan kecantikan, peningkatan pendidikan, rekreasi, olah raga dan sebagainya.

Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk cenderung mengalami peningkatan selama 2 tahun terakhir. Peningkatan pengeluaran terjadi hanya pada pengeluaran makanan saja, yaitu sebesar 6,87 persen. Sebaliknya, pengeluaran nonmakanan mengalami penurunan dari 853.432 rupiah pada tahun 2022 turun menjadi 803.919 rupiah pada tahun 2023 atau sebesar 5,8 persen. Pada tahun 2023 rata-rata total pengeluaran perkapita perbulan adalah 1.646.308 rupiah dengan proporsi 51 persen untuk pengeluaran makanan dan 49 persen untuk pengeluaran nonmakanan.

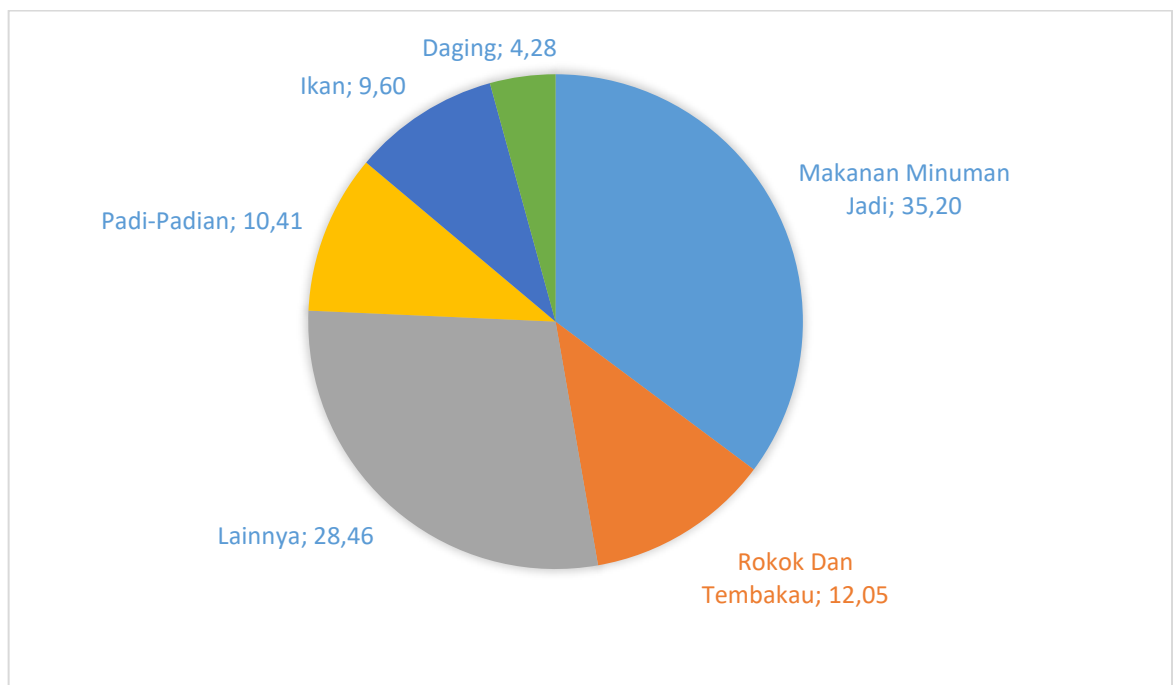


Gambar 5.3 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Kabupaten Tanah Bumbu, Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, Susenas 2023

Pola pengeluaran penduduk Kabupaten Tanah Bumbu seperti pada gambar di atas menunjukkan pergeseran. Dalam rentang tahun 2020-2021, pengeluaran penduduk menunjukkan bahwa pengeluaran makanan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran non makanan. Pada tahun 2022 terjadi perubahan dimana pengeluaran non makanan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran makanan namun pola tersebut Kembali berubah pada tahun 2023. Perubahan pola pengeluaran masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada tahun 2020-2021 pola pengeluaran dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan pengeluaran masyarakat lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, yaitu makanan. Sementara itu, pada tahun 2022 pengurangan pembatasan sudah mulai diterapkan yang berdampak pada pergerakan masyarakat untuk melakukan aktivitas diluar rumah, seperti rekreasi.

Pengeluaran pada kelompok makanan yang paling besar dalam pengeluaran untuk kebutuhan makanan jadi, diikuti pengeluaran untuk rokok/tembakau dan padi-padian. Porsi pengeluarannya berturut-turut sebesar 35,20 persen, 12,05 persen dan 10,41 persen dari total pengeluaran makanan sebulan. Kekayaan hasil laut di Kabupaten Tanah Bumbu menjadikan masyarakat lebih memilih jenis lauk ikan dibandingkan jenis lauk lainnya. Hal ini terlihat dari persentase kelompok ikan (9,6 persen) terhadap total pengeluaran makanan sebulan. Persediaan yang melimpah dengan pilihan yang sangat beragam serta harga yang terjangkau menjadi pertimbangan utama masyarakat.



Gambar 5. 4 Persentase Pengeluaran Penduduk menurut Kelompok Makanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023

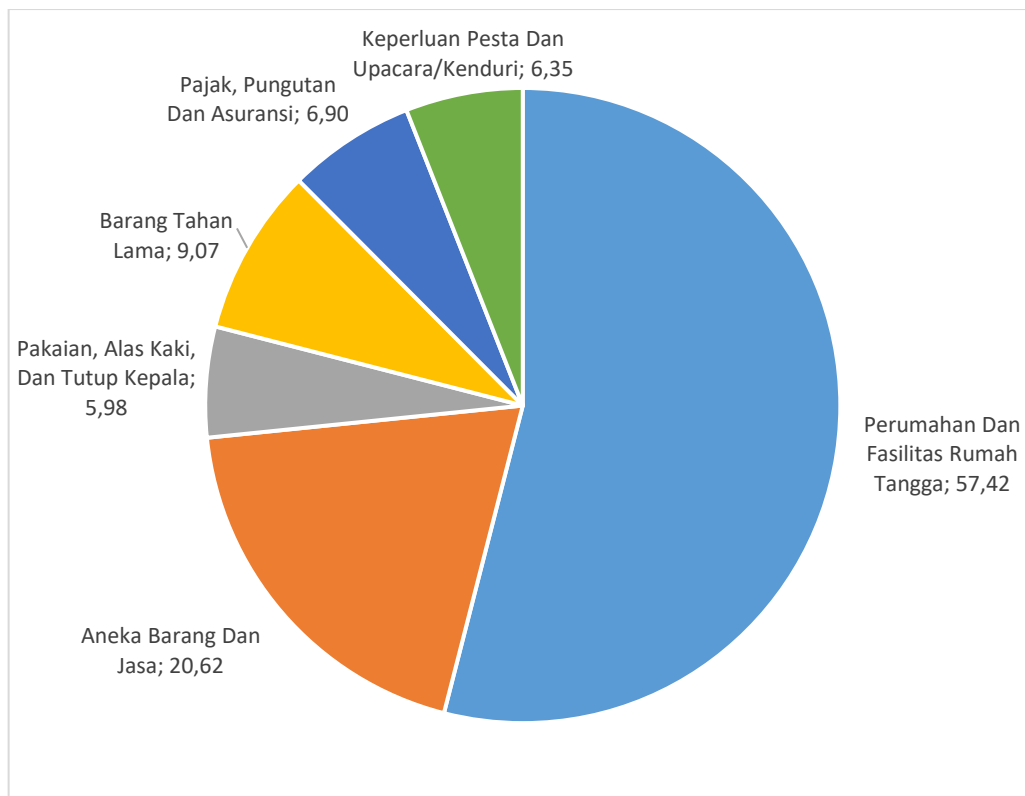
Sumber: BPS, Susenas 2023

Penduduk terutama yang memiliki kondisi perekonomian rumah tangga cukup baik cenderung menyukai kepraktisan dan kecepatan. Hal ini menjadikan makanan jadi menjadi salah satu pilihan utama sehingga menjadikannya kelompok makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten

Tanah Bumbu. Selain itu, gaya hidup yang semakin berkembang menjadikan masyarakat memiliki beragam aktivitas sehingga waktu menjadi sangat berharga.

Komoditas rokok meskipun dari sisi kesehatan berdampak buruk pada kenyataannya masih tetap sebagai salah satu komoditas paling menonjol dalam pengeluaran makanan penduduk Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini sungguh sangat ironis mengingat mengkonsumsi rokok berpotensi besar menimbulkan berbagai macam penyakit ringan hingga berat. Porsi pengeluaran rokok dan tembakau dari total pengeluaran makanan mencapai 12,05 persen, lebih besar dibandingkan dengan porsi untuk pengeluaran ikan, sayuran atau buah-buahan. Porsi pengeluaran untuk rokok dan tembakau ini juga lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rumah tangga untuk membeli telur, susu atau daging.

Porsi untuk pengeluaran rokok tentu akan sangat lebih bermanfaat jika dialihkan untuk peningkatan gizi keluarga terutama pada kelompok penduduk berpendapatan rendah, mengingat konsumsi rokok juga banyak ditemui pada kelompok penduduk dengan pendapatan menengah ke bawah. Dengan gizi yang lebih baik tentu akan meningkatkan tingkat kecerdasan anak dan selanjutnya akan berpeluang meningkatkan kesuksesan anak dalam menempuh pendidikan. Bagi anak yang hidup dari keluarga menengah ke bawah, kesuksesan dalam menempuh pendidikan akan meningkatkan harapan untuk dapat lepas atau terhindar dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pengeluaran rokok juga bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan non makanan yang lebih penting untuk anggota keluarga seperti perbaikan rumah, sarana internet untuk menunjang pendidikan dan peningkatan pengetahuan.



Gambar 5.5 Persentase Pengeluaran Penduduk menurut Kelompok Non Makanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023

Sumber: BPS, Susenas 2023

Pada kelompok pengeluaran non makanan, lebih dari setengah pengeluaran masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga. Pengeluaran tersebut mencakup pengeluaran untuk sewa rumah, biaya listrik/air/telepon, dan pengeluaran telekomunikasi seperti pulsa dan paket internet. Kelompok pengeluaran ini mempunyai porsi sekitar 57 persen dari total pengeluaran non makanan penduduk Kabupaten Tanah Bumbu diikuti oleh pengeluaran aneka barang dan jasa sebesar 21 persen. Pada kelompok ini mencakup pengeluaran untuk perawatan sehari-hari (sabun, barang kecantikan, surat kabar dan lainnya), biaya untuk kesehatan/pelayanan pengobatan, biaya pendidikan, biaya transportasi dan akomodasi, dan jasa lainnya diluar dari pengeluaran untuk perumahan, pakaian, barang tahan lama, pajak/asuransi maupun biaya keperluan pesta. Pengeluaran non makanan lainnya yang memiliki proporsi signifikan adalah barang tahan lama seperti pembelian sepeda motor, telepon seluler, perhiasan, dan barang tahan lama

lainnya dengan proporsi pengeluaran mencapai 9 persen dari total pengeluaran non makanan.

5.5 MENGUKUR KETIMPANGAN

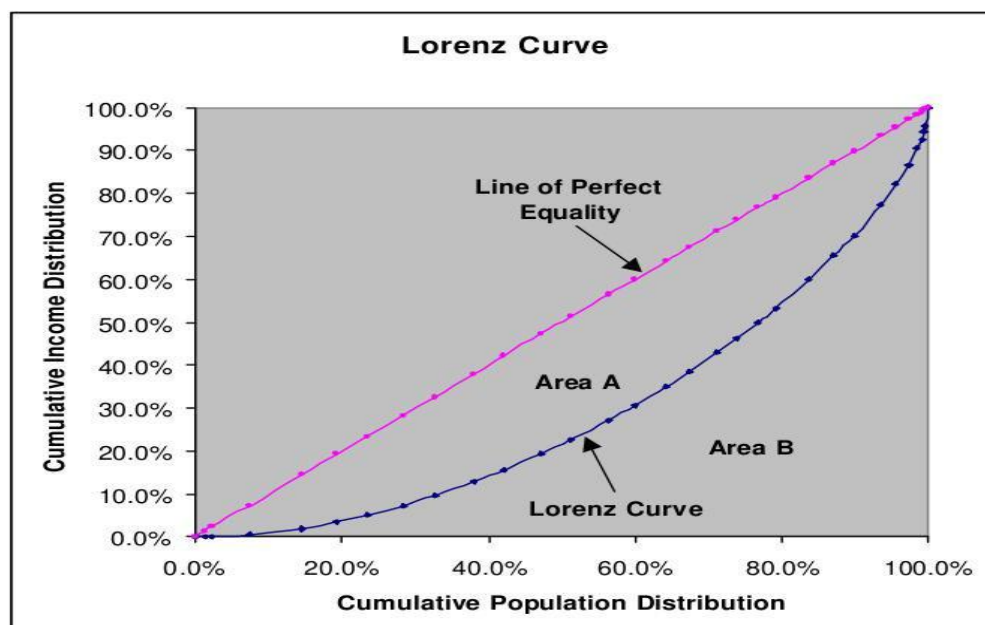
Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan yang paling umum digunakan. Rasionya berada di antara 0 (sepenuhnya setara) dan 1 (sepenuhnya tidak setara), dengan jangkauan umum di antara 0,3 dan 0,5. Rasio Gini umumnya dihitung dari distribusi pendapatan atau konsumsi (distribusi konsumsi biasanya lebih setara rata-rata 6,6 poin daripada distribusi pendapatan; Deininger dan Squire 1996). Rasio Gini dibangun dari kurva Lorenz, yang membandingkan kurva frekuensi kumulatif distribusi aktual (konsumsi dalam kasus Indonesia) dengan kurva frekuensi kumulatif yang akan dihasilkan jika konsumsi semua individu sama. Rasio Gini dihitung sebagai $A/(A+B)$, di mana A dan B adalah area yang ditunjukkan dalam grafik. Meskipun memenuhi banyak syarat untuk suatu ukuran ketimpangan, namun rasio Gini tidak mudah dibagi atau ditambah berdasarkan kelompok, maka rasio Gini nasional tidak sama dengan jumlah rasio Gini di bawah tingkat nasional (misalnya perkotaan/ pedesaan atau daerah)

Hubungan antara distribusi jumlah penduduk dan distribusi pendapatan sering digambarkan secara grafis dengan Kurva Lorenz, sementara ukuran umum yang biasa digunakan untuk melihat distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi disebut Koefisien Gini (Gini Ratio). Secara grafis, hubungan dan perpaduan antara kurva Lorenz dan Gini Ratio dapat dilihat pada gambar 5.1

Pada gambar dapat dilihat sumbu vertikal menunjukkan persentase jumlah pendapatan dan sumbu horizontal menunjukkan persentase jumlah penduduk, sedangkan garis diagonal adalah garis yang menggambarkan pemerataan pendapatan sempurna. Kurva Lorenz ditunjukkan oleh garis yang melengkung di bawah garis diagonal. Semakin dekat posisi garis Lorenz ke garis diagonal, berarti semakin merata pendapatan. Sebaliknya bila garis Lorenz

semakin menjauhi garis diagonal, berarti semakin tidak merata pendapatan yang berarti juga semakin banyak kecenderungan orang miskin di wilayah tersebut.

Koefisien Gini pada gambar di bawah didefinisikan sebagai luas bidang A dibagi luas bidang A+B. Secara ekstrim, jika $A=0$ maka koefisien gini menunjukkan nilai 0 yang berarti terjadi distribusi pendapatan yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis, sedangkan jika $B=0$ maka koefisien gini menunjukkan nilai 1 yang berarti terjadi ketimpangan sempurna yaitu hanya terdapat satu orang yang memiliki segalanya sedangkan yang lain tidak memiliki apa-apa. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Semakin kecil nilai koefisien gini mengindikasikan semakin meratanya distribusi pendapatan dan sebaliknya



Gambar 5.6 Kurva Gini Ratio

Pada hakekatnya kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok berpendapatan rendah adalah hal yang tidak dapat terhindarkan baik itu di daerah yang miskin, daerah sedang berkembang, bahkan daerah yang tergolong

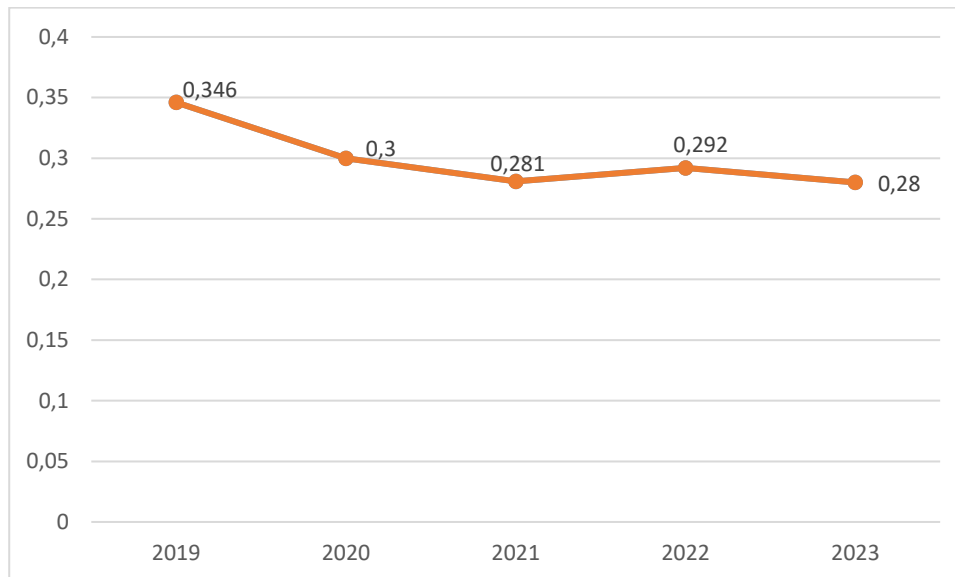
maju sekalipun. Hanya saja yang membedakan dari semua itu adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing daerah.

Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah penghasil batu bara beberapa tahun lalu merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Kalimantan Selatan, tetapi beberapa tahun ini pertumbuhan tidaklah setinggi beberapa tahun sebelumnya bahkan sempat mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan perekonomian pada sektor pertambangan membuat pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi harga komoditas batu bara. Pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pemerintah tentunya yang berkualitas dimana salah satu hasilnya adalah berkurangnya kesenjangan masyarakat. Muara dari pertumbuhan berkualitas tentunya adalah kesejahteraan masyarakat yang cukup merata. Namun disadari atau tidak, proses ekonomi merupakan proses dalam masyarakat yang rasional dan bisa jadi lebih menguntungkan pemilik modal.

Mengukur ketimpangan pendapatan suatu wilayah memang tidak sederhana, butuh pemahaman yang lebih mendalam terhadap karakteristik ekonomi regional dan karakteristik penduduk serta struktur tenaga kerjanya agar gambaran ukuran ketimpangan lebih jelas dan mampu menghasilkan solusi praktis untukantisipasi di masa yang akan datang. Mengukur ketimpangan dengan gini ratio berarti mengasumsikan bahwa pendapatan masyarakat diproksi dengan variabel pengeluaran. Gini Ratio Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2019-2023 berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menurun. Tahun 2019 Gini Ratio tercatat mencapai 0.346. Sementara itu, dua tahun berikutnya cenderung mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Gini ratio kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebelum akhirnya kembali turun pada 2023 menjadi 0,28.

Secara umum dalam kurun waktu tiga tahun terakhir gini ratio Kabupaten Tanah Bumbu berada pada tingkat ketimpangan rendah, yaitu gini ratio di bawah 0,3. Peningkatan gini ratio menandakan ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu semakin melebar, sebaliknya penurunan gini ratio menandakan ketimpangan semakin berkurang. Penurunan angka gini ratio di

tahun 2023 mengindikasikan ketimpangan pendapatan di antara penduduk Kabupaten Tanah Bumbu semakin berkurang. Hal ini bisa disebabkan meningkatnya pengeluaran pada penduduk kelompok bawah atau menurunnya pengeluaran penduduk pada kelompok atas atau bisa juga terjadi keduanya.



**Gambar 5.7 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2019-2023**

Sumber : BPS, Susenas

Gambar 25 menunjukkan perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2019 hingga 2023. Gini Ratio adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Secara umum, terdapat tren penurunan dalam Gini Ratio dari tahun 2019 ke 2023. Pada tahun 2019, Gini Ratio berada pada angka 0.34, yang kemudian menurun signifikan menjadi 0.30 pada tahun 2020. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2021 dengan nilai Gini Ratio mencapai 0.28. Namun, pada tahun 2022, terdapat sedikit peningkatan dalam Gini Ratio menjadi 0.29. Kenaikan ini mungkin mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan

pendapatan meskipun relatif kecil. Pada tahun 2023, Gini Ratio kembali menurun ke 0.28, menunjukkan adanya upaya yang berhasil untuk mengurangi ketimpangan pendapatan kembali.

Penurunan Gini Ratio dari tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam distribusi pendapatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap perbaikan ini antara lain: Peningkatan akses ke pendidikan dan pelatihan keterampilan yang meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, Program-program pemerintah yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kebijakan ekonomi lokal yang mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, sehingga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Peningkatan Gini Ratio pada tahun 2022 meskipun kecil, perlu dicermati lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebabnya. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan ekonomi, perubahan dalam pasar tenaga kerja, atau ketidakmerataan akses terhadap sumber daya mungkin berperan dalam peningkatan ketimpangan ini.

Secara keseluruhan, data menunjukkan adanya tren positif dalam pengurangan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2019 hingga 2023, meskipun terdapat sedikit fluktuasi pada tahun 2022. Upaya-upaya yang konsisten dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa ketimpangan pendapatan terus berkurang dan distribusi kesejahteraan semakin merata di masa mendatang. Program-program yang fokus pada peningkatan pendidikan, keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja perlu diperkuat untuk mendukung tren positif ini.

Untuk terus mengurangi ketimpangan pendapatan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Tanah Bumbu dapat mempertimbangkan langkah-langkah berikut:

1. Meningkatkan Akses Pendidikan dan Pelatihan: Memperluas program Pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

2. Mendukung Usaha Kecil dan Menengah: Meningkatkan dukungan bagi usaha kecil dan menengah melalui kebijakan yang mendukung akses permodalan, pelatihan bisnis, dan akses pasar.
3. Memperkuat Program Sosial: Memperkuat program-program sosial yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, seperti bantuan langsung tunai, program kesehatan, dan perumahan yang terjangkau.

Tren Gini Rasio Kabupaten Tanah Bumbu seperti yang terlihat dalam gambar terjaga pada nilai Gini Rasio dalam level sedang yaitu kisaran 0,3. Meskipun tidak segenting masalah kemiskinan, kewaspadaan terhadap meningkatnya ketimpangan tetap harus dijaga mengingat efek buruk yang dapat dihasilkan bagi masyarakat. Melihat permasalahan yang cukup kompleks dalam mengurangi ketimpangan pendapatan ini maka diperlukan sensitivitas dan kejelian dari seluruh pihak baik swasta sebagai calon investor maupun pemerintah setempat dalam mengelola potensi yang ada dan mengambil kebijakan yang tepat.



PARIWISATA

**"Pariwisata adalah pendorong ekonomi yang kuat,
menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan
pendapatan daerah."**



BAB VI

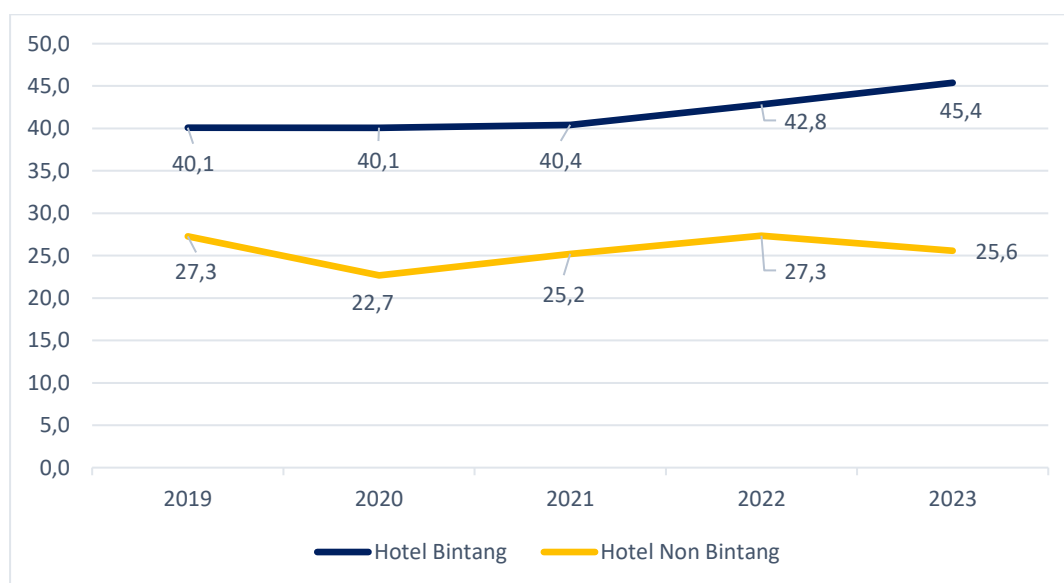
PARIWISATA

Pariwisata menyangkut segala aspek yang terkait dengan sektor pariwisata seperti promosi, atraksi, arsitektur, etika, pola manajemen sehingga diharapkan dapat memberikan dampak ganda terhadap kegiatan-kegiatan di sektor lain. Pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang pendapatan bagi pengembangan sektor pariwisata juga dinilai menjadi suatu hal yang sangat penting baik sebagai salah satu penyerap tenaga kerja. Salah satu aspek pemegang peranan dalam meningkatkan sektor pariwisata adalah jasa perhotelan. Dalam perekonomian, kegiatan perhotelan tergabung dalam kategori penyediaan akomodasi dan makan minum. Kategori ini termasuk ke dalam kategori yang memiliki peluang yang cukup potensial untuk dilakukan pengembangan di Tanah Bumbu. Pada tahun 2023, kontribusi aktivitas kategori penyediaan akomodasi dan makan minum di Tanah Bumbu sekitar 0,73 persen (setara dengan 247,26 miliar rupiah) terhadap total kegiatan perekonomian. Besaran tersebut meningkat dari tahun 2022 yang hanya mencapai 221,72 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan sektor perhotelan di Tanah Bumbu mengalami pertumbuhan yang positif dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Selain itu, perkembangan angkutan laut dan udara juga menjadi kontributor dalam meningkatkan sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam perekonomian, kegiatan angkutan laut dan udara tergabung dalam kategori transportasi dan pergudangan. Kategori ini termasuk ke dalam kategori yang memiliki peluang yang cukup baik untuk dilakukan pengembangan di Tanah Bumbu. Pada tahun 2023, kontribusi aktivitas kategori transportasi dan pergudangan di Tanah Bumbu sekitar 5,71 persen (setara dengan 1.922,78 miliar rupiah) terhadap total kegiatan perekonomian. Besaran tersebut meningkat dari tahun 2022 yang hanya mencapai 1.571,78 miliar rupiah.

6.1 TINGKAT PENGHUNIAN KAMAR

Salah satu indikator perhotelan adalah tingkat penghunian kamar hotel (TPK) dimana indikator ini digunakan dalam menghitung jumlah okupansi hotel selama kurun waktu tertentu. Selama kurun waktu 2019-2023, kinerja perhotelan bintang dan non bintang di Tanah Bumbu cenderung stagnan dimana TPK hotel bintang hanya berkisar di antara 40 s.d 45 persen sedangkan TPK hotel non bintang berkisar antara 25 s.d 27 persen.



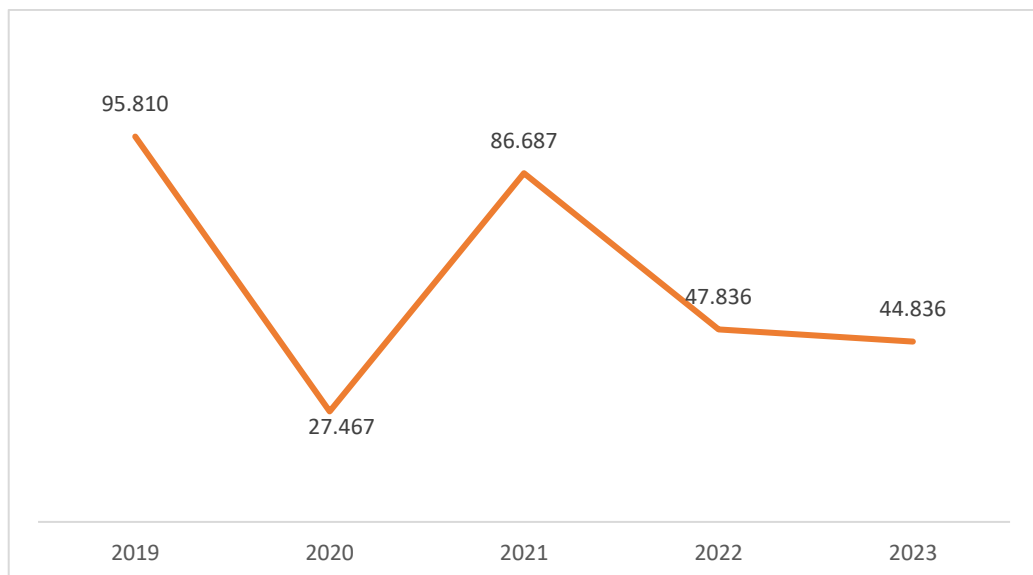
Gambar 6.1 Tingkat penghunian kamar hotel (TPK) , 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik

Persebaran hotel dan penginapan sendiri sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Simpang empat, Batulicin dan Satui yang merupakan pusat ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat 3 (tiga) hotel berbintang di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu Hotel Ebony di Kecamatan Batulicin, Hotel Medina di Kecamatan Kusan Hilir, dan Hotel Satui Adygraha di Kecamatan Satui.

6.2 PERKEMBANGAN PENUMPANG ANGKUTAN UDARA

Selain data pertumbuhan ekonomi, salah satu indikator perkembangan aktivitas angkutan di suatu wilayah dapat berupa perkembangan jumlah penumpang angkutan. Salah satu pelayanan publik unik dari Tanah Bumbu dibandingkan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu memiliki angkutan udara. Tercatat hanya 3 kabupaten saja yang memiliki bandar udara di Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong (sudah tidak beroperasi) dan Kabupaten Tanah Bumbu. Berikut perkembangan jumlah penumpang angkutan udara di Kabupaten Tanah Bumbu selama tahun 2019-2023



Gambar 6.2 Perkembangan jumlah penumpang angkutan udara, 2019-2023

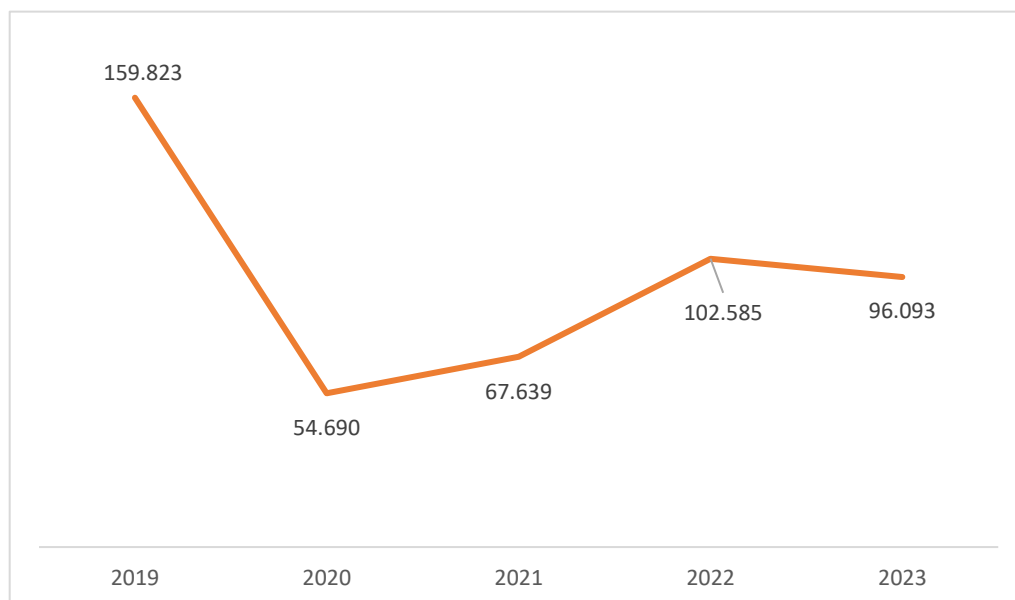
Sumber : Badan Pusat Statistik

Selama kurun waktu 2019-2023, jumlah penumpang angkutan udara di Tanah Bumbu cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena berkurangnya jumlah armada penerbangan yang melayani penumpang di Tanah Bumbu selama 5 tahun terakhir dari 2 armada (Wings Air dan NAM Air) menjadi tersisa hanya armada yang berasal dari Wings Air. Rute penerbangan juga hanya tersisa Batulicin-Banjarbaru dari yang semula melayani penerbangan Batulicin-Banjarbaru dan Batulicin – Makassar.

6.3 PERKEMBANGAN ANGKUTAN LAUT

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki empat pelabuhan laut yang dijadikan sarana penyeberangan penumpang baik penyeberangan antar kabupaten maupun untuk penyeberangan antar pulau. Salah satunya yaitu Pelabuhan Batulicin atau Pelabuhan Samudra merupakan pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan antar provinsi. Pelabuhan ini melayani penumpang umum tujuan ke Sulawesi, Jawa, dan daerah lainnya di Timur Indonesia.

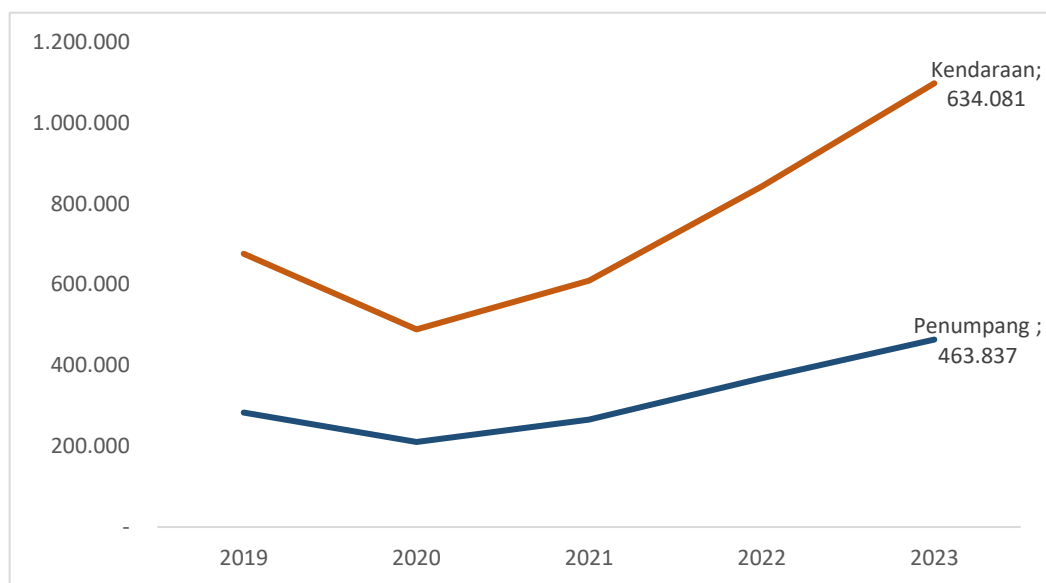
Selama kurun waktu 2019-2023, jumlah penumpang angkutan laut di Tanah Bumbu mengalami tren penurunan dan kenaikan dimana penurunan penumpang drastis terjadi di tahun 2020 saat wabah covid melanda yang membuat terjadinya perbatasan perjalanan. Setelah wabah berakhir, kondisi kondisi penyeberangan penumpang kembali meningkat. Setelah sempat naik hampir 2x lipat pada tahun 2022, jumlah penumpang angkutan laut Tahun 2023 kembali turun menjadi 96.093 penumpang.



Gambar 6.3 Perkembangan jumlah penumpang Angkutan Laut, 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik

Selain penyeberangan antar provinsi, Kabupaten Tanah Bumbu juga mempunyai pelayanan penyeberangan antar kabupaten yang di layani oleh PT. ASDP. Penyeberangan fery ini melayani penyeberangan Batulicin-Kotabaru yang bisa diakses dari Kecamatan Batulicin. Selama kurun waktu 2019-2023, jumlah penumpang maupun barang yang dilayani oleh ASDP Pelabuhan Fery di Tanah Bumbu terus mengalami kenaikan. Setelah sempat turun di tahun 2020 terkait dampak covid, jumlah kendaraan terus meningkat hingga mencapai 634.081 kendaraan (meningkat 127,65 persen) yang menggunakan penyeberangan fery Batulicin – Kotabaru. Demikian juga dengan tren yang di alami jumlah penumpang dimana jumlah penumpang pelabuhan ferry berjumlah 463.837 penumpang (meningkat 120,43 persen).



Gambar 6.4 Perkembangan jumlah penumpang ASDP, 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik



ANALISIS POTENSI SEKTOR

Analisis potensi sektoral membantu mengidentifikasi sektor-sektor yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, memungkinkan perencanaan yang lebih tepat dan investasi yang lebih efektif



BAB VII

ANALISIS POTENSI

SEKTORAL

7.1 Analisis Location Quotient (LQ)

Metode *Location Quotient* (LQ) merupakan salah satu metode yang lazim digunakan untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi potensial dan keunggulan komparatif suatu wilayah. Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang dianalisis dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas.

Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan. Menurut Sjafrizal (2008), sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keunggulan kompetitif (*Competitive Advantage*) yang cukup tinggi. Sedangkan sektor non-basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis atau *service industries*.

LQ mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan. Teknik LQ banyak digunakan dalam pembahasan kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor unggulan sebagai *leading sector* suatu kegiatan ekonomi (industri).

LQ dapat digunakan sebagai alat analisis awal untuk suatu daerah, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan alat analisis lainnya. Berdasarkan analisis tersebut dapat diidentifikasi sektor-sektor apa saja yang dapat dikembangkan, sehingga sektor yang dikatakan potensial dapat dijadikan sektor prioritas utama dalam perencanaan pembangunan ekonomi

Location Quotient (LQ) diformulasikan sebagai berikut :

$$LQ = (V_{ik}/V_k) / (V_{ip}/V_p)$$

Keterangan :

V_{ik} : Nilai output (PDRB) kategori i daerah studi k (kabupaten/kota misalnya) dalam pembentukan Produk Domestik Regional Riil (PDRR) daerah studi k.

V_k : Produk Domestik Regional Bruto total semua kategori di daerah studi k

V_{ip} : Nilai output (PDRB) kategori i daerah referensi p (provinsi misalnya) dalam pembentukan PDRR daerah referensi p.

V_p : Produk Domestik Regional Bruto total semua kategori di daerah referensi p.

Berdasarkan formulasi di atas, nilai LQ masing-masing lapangan usaha pada perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu relatif terhadap lapangan usaha yang sama di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.1 Nilai LQ Lapangan Usaha Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2019-2023**

Kategori (1)	Lapangan Usaha (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (5)	2022* (6)	2023** (7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,17	1,19	1,17	1,08	1,05
B	Pertambangan dan Penggalan	1,80	1,84	1,71	1,57	1,62
C	Industri Pengolahan	0,61	0,60	0,73	0,70	0,73
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,39	0,39	0,38	0,34	0,34
E	Pengadaan Air	0,26	0,26	0,26	0,23	0,22
F	Konstruksi	0,79	0,80	0,76	0,68	0,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,79	0,78	0,74	0,64	0,63

Kategori (1)	Lapangan Usaha (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (5)	2022* (6)	2023** (7)
H	Transportasi dan Pergudangan	1,00	1,03	0,99	0,79	0,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,46	0,46	0,44	0,39	0,40
J	Informasi dan Komunikasi	0,96	0,97	0,94	0,85	0,86
K	Jasa Keuangan	0,52	0,53	0,50	0,44	0,43
L	Real Estate	0,97	0,98	0,93	0,83	0,82
M,N	Jasa Perusahaan	0,43	0,44	0,42	0,37	0,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,56	0,54	0,53	0,49	0,50
P	Jasa Pendidikan	0,90	0,89	0,85	0,77	0,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,52	0,53	0,49	0,44	0,44
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,69	0,70	0,67	0,60	0,59

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu (data diolah)

Location Quotient (LQ) merupakan alat analisis ekonomi yang digunakan untuk mengukur spesialisasi relatif suatu sektor ekonomi di suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah yang lebih besar (misalnya nasional). Nilai LQ lebih dari 1 menunjukkan bahwa sektor tersebut lebih terkonsentrasi di wilayah yang dianalisis, sementara nilai LQ kurang dari 1 menunjukkan konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah referensi.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat tiga sektor perekonomian yang tergolong sektor basis di Kabupaten Tanah Bumbu. Bila diurutkan berdasarkan nilai koefisien rata-rata LQ tertinggi sampai terendah, maka sektor pertambangan dan penggalian pada peringkat pertama dengan 1,62 kemudian diikuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor informasi dan komunikasi yang pada tahun 2023 berada di posisi tiga teratas. Ketiga sektor basis ini memperlihatkan keunggulan kompetitif dan nilai kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu karena telah mampu bersaing dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan

Selatan. Selain itu, ketiga sektor ini memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu dengan lebih dari setengah total PDRB. Adanya sektor informasi dan komunikasi sebagai salah satu sektor yang menempati posisi 3 teratas nilai LQ terbesar menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu tidak hanya berbasis pada sektor primer seperti pertanian dan pertambangan semenjak era pandemi covid-19.

Tabel 2.5 menunjukkan nilai LQ untuk berbagai kategori lapangan usaha di Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2019 hingga 2023. Analisis tren menunjukkan:

1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A)

- Nilai LQ untuk sektor ini menunjukkan tren penurunan dari 1,17 pada tahun 2019 menjadi 1,05 pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan bahwa sektor ini semakin kurang terkonsentrasi di Kabupaten Tanah Bumbu dibandingkan dengan wilayah referensi.

2. Sektor Pertambangan dan Penggalan (B)

- Sektor ini memiliki LQ tertinggi di antara semua kategori, menunjukkan konsentrasi yang sangat tinggi di Kabupaten Tanah Bumbu. Meskipun ada penurunan dari 1,84 pada tahun 2020 menjadi 1,62 pada tahun 2023, sektor ini tetap sangat dominan.

3. Sektor Industri Pengolahan (C)

- Sektor ini menunjukkan peningkatan LQ dari 0,61 pada tahun 2019 menjadi 0,73 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan peningkatan spesialisasi dalam sektor industri pengolahan di wilayah tersebut.

4. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas (D)

- Nilai LQ sektor ini relatif stabil namun rendah, menunjukkan bahwa sektor ini tidak terkonsentrasi di Kabupaten Tanah Bumbu.

5. Sektor Pengadaan Air (E)

- Nilai LQ tetap rendah dan stabil, mencerminkan kurangnya spesialisasi di sektor ini.

6. Sektor Konstruksi (F), Perdagangan Besar dan Eceran (G)

- Kedua sektor ini menunjukkan penurunan LQ, yang berarti sektor-sektor ini menjadi kurang terkonsentrasi di Kabupaten Tanah Bumbu dibandingkan dengan wilayah referensi.

7. Sektor Transportasi dan Pergudangan (H)

- Sektor ini menunjukkan penurunan LQ dari 1,00 pada tahun 2019 menjadi 0,80 pada tahun 2023, menunjukkan bahwa sektor ini menjadi kurang penting secara relatif.

8. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I)

- Nilai LQ sektor ini tetap rendah, mencerminkan kurangnya spesialisasi di sektor ini.

9. Sektor Informasi dan Komunikasi (J)

- Nilai LQ sektor ini relatif stabil mendekati 1, menunjukkan konsentrasi yang mendekati rata-rata nasional.

10. Sektor Jasa Keuangan (K), Real Estate (L), Jasa Perusahaan (MN)

- Ketiga sektor ini menunjukkan tren penurunan LQ, mengindikasikan penurunan dalam konsentrasi relatif di Kabupaten Tanah Bumbu.

11. Sektor Administrasi Pemerintahan (O), Jasa Pendidikan (P), Jasa Kesehatan (Q), Jasa lainnya (RSTU)

- Sektor-sektor ini juga menunjukkan penurunan LQ, mengindikasikan penurunan dalam konsentrasi relatif di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, data LQ menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian tetap merupakan sektor yang paling terkonsentrasi di Kabupaten Tanah Bumbu meskipun ada penurunan nilai LQ. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga penting meskipun mengalami penurunan konsentrasi. Sebaliknya, sektor-sektor seperti pengadaan listrik, gas, dan air tetap rendah konsentrasinya, menunjukkan kurangnya spesialisasi di sektor-sektor ini.

Penurunan LQ di beberapa sektor mungkin mencerminkan perubahan struktural dalam ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu, mungkin sebagai hasil dari diversifikasi ekonomi atau perubahan dalam kebijakan ekonomi. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memperhatikan tren ini untuk menyusun kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki potensi tinggi dan menjaga keseimbangan ekonomi di wilayah tersebut.

Sektor lain yang menarik untuk diperhatikan yakni Industri Pengolahan dimana nilai LQ nya meningkat secara fluktuatif dari 0,61 di 2019 menjadi 0,73 di 2023. Perlu diperhatikan pula bahwa Industri pengolahan merupakan kategori dengan kontribusi terbesar ketiga di Tanah Bumbu, sehingga peningkatan LQ di kategori ini merupakan indikasi bahwa kategori ini memiliki potensi yang masih sangat besar untuk dapat dikembangkan lagi dan menjadi kategori yang kompetitif.

Penentuan sektor dan sub sektor basis saat ini dan dimasa yang akan datang dapat digunakan dengan metode analisis gabungan *LQ* dan *DLQ*. Hasil analisis gabungan *LQ* dan *DLQ* yang menunjukkan nilai *LQ* non basis dan pada nilai *DLQ* basis, berarti sektor tersebut mengalami reposisi menjadi sektor basis di masa yang akan datang (reposisi basis). Sebaliknya, jika nilai *LQ* basis dan pada nilai *DLQ* non basis, maka dapat diartikan sektor tersebut mengalami reposisi menjadi sektor non basis pada masa yang akan datang (reposisi non basis). Jika nilai *LQ* basis dan pada nilai *DLQ* menunjukkan basis berarti sektor tersebut tidak mengalami reposisi atau tetap basis saat ini dan masa yang akan datang. Namun jika nilai *LQ* menunjukkan non basis dan pada nilai *DLQ* menunjukkan non basis, maka sektor tersebut tidak mengalami reposisi atau non basis saat ini dan pada masa yang akan datang.

Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) digunakan untuk menentukan reposisi sektor dan sub sektor ke depan di daerah tertentu. Analisis ini penting digunakan untuk mengetahui apakah di masa yang akan datang sektor dan sub sektor tertentu dapat bertahan sebagai sektor dan sub sektor basis atau tidak dan sebaliknya apakah sektor dan sub sektor yang sebelumnya bukan basis

dapat mengalami reposisi/berpotensi menjadi sektor dan sub sektor basis di masa yang akan datang.

Formula penghitungan Dynamic Location Quotient (DLQ) adalah sebagai berikut:

$$DLQ = [((1+g_i)/(1+g_j)) / ((1+G_i)/(1+G_j))]^t$$

Keterangan:

g_i : Laju pertumbuhan sektor i di daerah studi

g_j : Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di daerah studi

G_i : Laju pertumbuhan sektor i di daerah referensi

G_j : Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di daerah referensi

T : selisih tahun akhir dan tahun awal

Kriteria keputusan nilai DLQ adalah;

1. Nilai $DLQ > 1$ berarti suatu sektor masih dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis pada masa yang akan datang.
2. Nilai $DLQ < 1$ berarti sektor tersebut tidak dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis pada masa yang akan datang

Jika nilai DLQ berada di atas 1, maka potensi perkembangan sektor i di suatu regional lebih cepat dibandingkan sektor yang sama di daerah referensi. Dengan kata lain, perkembangan sektor tersebut di Kabupaten Tanah Bumbu lebih cepat daripada perkembangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

**Tabel 7.2 Hasil Analisis LQ dan DLQ Lapangan Usaha
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023**

Kategori (1)	Lapangan Usaha (2)	LQ (3)	DLQ (4)	Keterangan (5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,05	0,50	Reposisi Non Basis
B	Pertambangan dan Penggalian	1,62	1,55	Basis
C	Industri Pengolahan	0,73	1,40	Reposisi Basis
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,34	1,00	Reposisi Basis
E	Pengadaan Air	0,22	0,55	Non Basis
F	Konstruksi	0,67	0,71	Non Basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,63	0,57	Non Basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0,80	1,16	Reposisi Basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,40	0,99	Non Basis
J	Informasi dan Komunikasi	0,86	1,04	Reposisi Basis
K	Jasa Keuangan	0,43	0,65	Non Basis
L	Real Estate	0,82	0,69	Non Basis
M,N	Jasa Perusahaan	0,37	0,83	Non Basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,50	1,43	Reposisi Basis
P	Jasa Pendidikan	0,77	1,23	Reposisi Basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,44	0,57	Non Basis
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,59	0,76	Non Basis

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu (data diolah)

Tabel 7.2 menyajikan hasil Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) untuk berbagai lapangan usaha di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2023. LQ digunakan untuk mengukur spesialisasi relatif suatu wilayah dalam suatu sektor dibandingkan dengan wilayah referensi, sementara DLQ mengukur perubahan spesialisasi relatif tersebut dari waktu ke waktu. Berikut adalah ulasan dan analisis lebih lanjut mengenai tabel tersebut:

1. Kategori Lapangan Usaha

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A) memiliki LQ sebesar 1,05 dan DLQ sebesar 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini saat ini merupakan sektor basis (spesialisasi tinggi), namun cenderung mengalami penurunan spesialisasi (reposisi non basis).

- Pertambangan dan Penggalan (B) dengan LQ sebesar 1,62 dan DLQ sebesar 1,55 adalah sektor basis yang kuat dan cenderung mempertahankan atau meningkatkan spesialisasinya, menandakan peran penting sektor ini dalam perekonomian daerah.

- Industri Pengolahan (C) menunjukkan LQ rendah dengan nilai 0,73 namun DLQ tinggi dengan nilai 1,40, menunjukkan bahwa sektor ini sedang bergerak menuju status basis.

- Pengadaan Listrik dan Gas (D) memiliki LQ sangat rendah dengan nilai 0,34 namun DLQ pas-pasan dengan nilai 1,00 yang menunjukkan adanya potensi peningkatan spesialisasi di masa depan.

2. Non Basis dan Basis

- Sektor dengan $LQ < 1$ dan $DLQ < 1$, seperti Pengadaan Air (E) dan Konstruksi (F), menunjukkan bahwa sektor-sektor ini tidak dominan dalam perekonomian daerah dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menjadi sektor basis.

- Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G) dengan LQ dan DLQ yang rendah menunjukkan bahwa sektor ini tidak signifikan dalam konteks lokal.

- Sektor Transportasi dan Pergudangan (H), dengan nilai LQ 0,80 dan DLQ 1,16 serta Jasa Pendidikan (P) dengan LQ 0,77 dan DLQ 1,23 yang menunjukkan sektor-sektor ini sedang bergerak menuju reposisi sebagai sektor basis, mencerminkan pertumbuhan yang signifikan.

3. Sektor yang Menonjol

- Pertambangan dan Penggalian (B) adalah sektor yang paling menonjol dengan LQ dan DLQ tinggi, mencerminkan dominasi yang kuat dan keberlanjutan spesialisasi sektor ini dalam ekonomi lokal.

- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (O) menunjukkan peningkatan signifikan dalam spesialisasi dengan DLQ 1,43 meskipun LQ hanya 0,50 menunjukkan peran penting yang meningkat dalam perekonomian daerah.

Dari perhitungan DLQ terlihat bahwa kebanyakan lapangan usaha di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan sektor nonbasis. Artinya kedepannya sektor-sektor ini kurang mampu untuk diandalkan dalam memacu perekonomian. Sektor pertambangan dan penggalian menjadi satu-satunya sektor yang saat ini berstatus sektor basis, atau sektor yang dapat diunggulkan dan mempunyai daya saing yang tinggi dibandingkan sektor pertambangan dan penggalian di Kalimantan Selatan lainnya. Lapangan usaha yang menjadi sorotan pada hasil perhitungan DLQ di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mempunyai LQ lebih dari 1 tetapi DLQ kurang dari 1, yang berarti bahwa sektor ini sedang mengalami reposisi atau pergeseran menjadi sektor non basis. Mengingat kontribusi sektor ini yang besar terhadap PDRB Tanah Bumbu maka langkah-langkah untuk mempertahankan posisinya sebagai basis atau mencari alternatif sektor untuk didorong lebih lanjut perlu direncanakan.

Kategori Industri Pengolahan menjadi sektor yang juga perlu menjadi perhatian karena saat ini sektor ini berstatus reposisi basis. Artinya sektor ini pada masa yang akan datang memiliki potensi untuk menjadi sektor unggulan dan berdaya saing tinggi.

Analisis LQ dan DLQ memberikan wawasan berharga tentang struktur ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu. Sektor-sektor dengan LQ tinggi (sektor basis) memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal, sedangkan sektor-sektor dengan DLQ tinggi menunjukkan potensi untuk menjadi sektor basis di masa depan. Pola reposisi dari non basis ke basis, dan sebaliknya, menunjukkan dinamika ekonomi yang penting untuk diperhatikan dalam perencanaan dan pengembangan ekonomi wilayah. Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan bahwa meskipun

beberapa sektor dominan, ada beberapa sektor yang menunjukkan potensi pertumbuhan dan perlu perhatian khusus dari pembuat kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

7.2 ANALISIS SEKTORAL TIPOLOGI KLASSEN

Pendekatan Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah (Syafriзал, 1997).

Pendekatan Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Tipologi Klassen mengelompokkan suatu kategori dari suatu daerah dengan cara membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah (atau nasional) yang menjadi acuan. Dalam hal ini akan dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu dengan Provinsi Kalimantan Selatan serta membandingkan share kategori suatu daerah dengan share kategori daerah acuan. Hasil analisis Tipologi Klassen akan menunjukkan posisi pertumbuhan dan share suatu kategori pembentuk PDRB Kabupaten Tanah Bumbu. Tipologi Klassen dengan pendekatan sektoral menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut.

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*)

Kuadran ini merupakan kuadran sektor dengan laju pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g) dan memiliki kontribusi terhadap PDRB (s_i) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan g_i lebih besar dari g dan s_i lebih besar dari s . Sektor dalam kuadran I dapat pula diartikan sebagai sektor yang potensial karena memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang lebih besar daripada daerah yang menjadi acuan atau secara nasional.

2. Daerah maju, tetapi tertekan (*high income but low growth*).

Sektor yang berada pada kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g), tetapi memiliki kontribusi terhadap PDRB daerah (s_i) yang lebih besar dibandingkan kontribusi nilai sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan g_i lebih kecil dari g dan s_i lebih besar dari s . Sektor dalam kategori ini juga dapat dikatakan sebagai sektor yang telah jenuh.

3. Daerah berkembang cepat (*high growth but low income*)

Kuadran ini merupakan kuadran untuk sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g), tetapi kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB (s_i) lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan g_i lebih besar dari g dan s_i lebih kecil dari s . Sektor dalam Kuadran III dapat diartikan sebagai sektor yang sedang booming. Meskipun pangsa pasar daerahnya relatif lebih kecil dibandingkan rata-rata nasional.

4. Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*)

Kuadran ini ditempati oleh sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (g) dan sekaligus memiliki kontribusi tersebut terhadap PDRB (s_i) yang lebih kecil dibandingkan nilai kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi acuan atau secara nasional (s).

Tabel 7.3 Klasifikasi Hasil Tipologi Klasen

Kontribusi Sektoral	Pertumbuhan Sektoral	
	$g_i > g$	$g_i < g$
$s_i > s$	Sektor maju dan tumbuh dengan pesat	Sektor Maju tapi tertekan
$s_i < s$	Sektor Potensial	Sektor Relatif Tertinggal

Dimana : g_i : Pertumbuhan Sektor ke i Kabupaten Tanah Bumbu

g : Pertumbuhan Sektor Provinsi Kalimantan Selatan

s_i : *Share* kategori di Kabupaten Tanah Bumbu

s : *Share* kategori di Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan menggunakan metode tersebut, masing-masing kategori penyusun PDRB pada kondisi tahun 2023 dan 2022 dapat diklasifikasikan ke dalam kuadran-kuadran sebagaimana Tabel 2.8 dan Tabel 2.9.

Tabel 7.4 Klasifikasi Sektoral Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

Kontribusi Sektoral	Pertumbuhan Sektoral	
	$gi \geq g$	$gi < g$
$si \geq s$	• Pertambangan dan Penggalian	• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
$si < s$	• Industri Pengolahan • Informasi dan Komunikasi • Pengadaan Listrik dan Gas • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib • Transportasi dan Pergudangan • Jasa Pendidikan	• Konstruksi • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum • Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Pengadaan Air • Jasa Keuangan • Real Estate • Jasa Perusahaan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial • Jasa Lainnya

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu (data diolah)

Beberapa kategori seperti Industri Pengolahan; Informasi dan Komunikasi; Pengadaan Listrik dan Gas; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial; Transportasi dan Pergudangan; dan Jasa Pendidikan termasuk kedalam kategori yang potensial untuk dikembangkan. Kategori-kategori tersebut memiliki peluang besar dalam peningkatan perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu. Sementara sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan termasuk dalam sektor maju tapi tertekan. Ini menunjukkan bahwa kategori ini walaupun saat ini kontribusinya masih besar namun pertumbuhannya mulai melambat.

Tabel 7.5 Klasifikasi Sektoral Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023

Kontribusi Sektoral	Pertumbuhan Sektoral	
	$gi \geq g$	$gi < g$
$si \geq s$	• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	• Pertambangan dan Penggalian • Transportasi dan Pergudangan
$si < s$	• Industri Pengolahan • Pengadaan Air • Informasi dan Komunikasi • Jasa Lainnya • Pengadaan Listrik dan Gas • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	• Konstruksi • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum • Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Jasa Keuangan • Real Estate • Jasa Perusahaan • Jasa Pendidikan • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu (data diolah)

Terdapat beberapa sektor yang berpindah kuadran jika dibandingkan posisinya pada tahun 2022 dan 2023. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang semula merupakan sektor maju dan tumbuh pesat berubah menjadi sektor maju tetapi tertekan pada tahun 2023. Sebagai salah satu sektor penunjang perekonomian Tanah Bumbu yang juga menyerap banyak tenaga kerja, penting untuk diberikan perhatian lebih bagi sektor. Sektor Pertambangan dan Penggalian berpindah dari sektor maju tapi tertekan menjadi sektor maju dan bertumbuh pesat sejalan dengan pertumbuhan sektor ini di Tanah Bumbu yang lebih tinggi dari provinsi Kalimantan Selatan.

Sektor Industri Pengolahan tetap menjadi sektor yang potensial, ini menunjukkan semakin perlunya dorongan pergerakan ekonomi di sektor Industri Pengolahan, sejalan dengan proses industrialisasi yang mulai berkembang. Sesuai dengan pendapat Hoover dan Fisher yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi regional dapat melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Subsistensi ekonomi

Dalam tahapan ini masyarakat hanya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri pada tingkat cukup untuk hidup sehari-hari. Kehidupan penduduk sebagian

besar masih tergantung pada sektor pertanian dan mengumpulkan hasil alam lainnya.

2. Pengembangan transportasi dan spesialisasi lokal

Pada tahap ini telah terdapat peningkatan baik dalam prasarana maupun sarana transportasi yang berakibat pada terjadinya spesialisasi baru diluar pertanian, dimana hasil produksi, bahan dasar, dan pemasarannya masih terbatas dan tergantung pada daerah pertanian yang bersangkutan.

3. Perdagangan antar daerah

Pada tahap ini telah terjadi perkembangan perdagangan antar daerah. Hal ini mungkin saja terjadi karena telah terjadi perbaikan di bidang transportasi dan perubahan di sektor kegiatan dari arah peningkatan produksi jenis ekstensifikasi menjadi pertanian yang lebih dititik beratkan pada intensifikasi.

4. Industrialisasi

Dengan makin bertambahnya penduduk dan menurunnya potensi produksi pertanian serta kegiatan ekstratif lainnya, daerah dipaksa untuk mengembangkan sumber pendapatan dan lapangan kerja, yaitu melalui ndustrialisasi dengan lebih menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut industri manufaktur serta pertambangan dan galian.

5. Spesialisasi daerah

Pada tahap ini daerah telah sampai pada tingkat spesialisasi kegiatan, baik barang dan jasa untuk keperluan penjualan kedaerah lain termasuk tenaga ahli dan jasa-jasa khusus.

6. Aliran faktor produksi antar daerah

Peningkatan infrastruktur dan arus informasi pada akhirnya menaikkan tingkat mobilisasi faktor produksi antar daerah. (Fembyantara, 2009)

Dengan adanya penjelasan tahapan tersebut, maka dapat diindikasikan Kabupaten Tanah Bumbu sedang bergerak memasuki tahap industrialisasi dengan semakin meningkatnya pembangunan dan kegiatan perekonomian pada sektor industri pengolahan.

7.3 ANALISIS MRP

Selain alat analisis LQ, alat analisis yang lain dirasa penting digunakan untuk mengidentifikasi kategori ekonomi potensial suatu daerah (Yusuf, 1999). Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) adalah alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi kategori ekonomi potensial suatu daerah. Metode identifikasi dari analisis ini berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB. Tujuan analisis MRP adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi potensial suatu daerah berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB (*competitive advantage*). Rumus yang digunakan dalam perhitungan analisis MRP adalah:

$$RP_{ip} = \frac{\left(\frac{y_{ipt} - y_{ip0}}{y_{ip0}} \right)}{\left(\frac{y_{pt} - y_{p0}}{y_{p0}} \right)}$$

RP_{ip} = Rasio pertumbuhan kategori i Kabupaten Tanah Bumbu

y_{ipt} = PDRB kategori i Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023

y_{ip0} = PDRB kategori i Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2010

y_{pt} = PDRB total Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023

y_{p0} = PDRB total Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2010

$$RP_{in} = \frac{\left(\frac{y_{int} - y_{in0}}{y_{in0}} \right)}{\left(\frac{y_{nt} - y_{n0}}{y_{n0}} \right)}$$

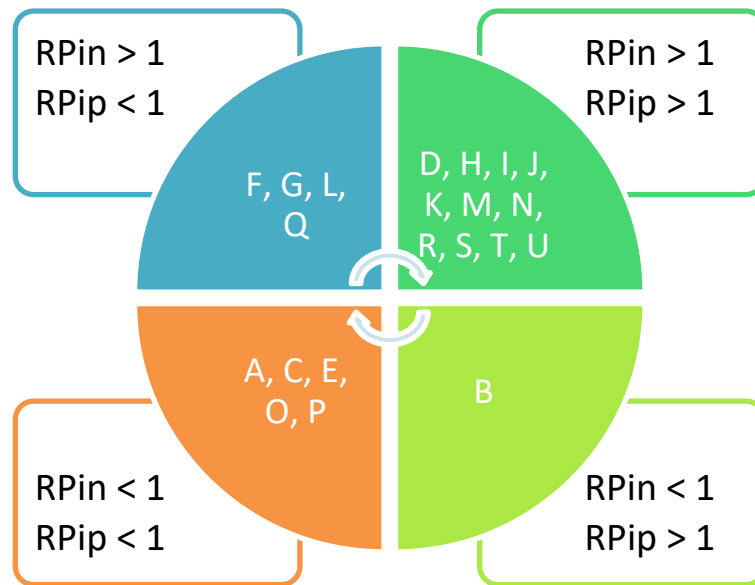
RP_{in} = Rasio pertumbuhan kategori i Provinsi Kalimantan Selatan

y_{int} = PDRB kategori i Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023

y_{in0} = PDRB kategori i Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010

y_{nt} = PDRB total Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023

y_{n0} = PDRB total Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010



Gambar 7.1 Hasil Perhitungan Analisis MRP Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu (diolah)

Gambar 7.1 menyajikan hasil perhitungan Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) untuk lapangan usaha di Kabupaten Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023. MRP adalah alat analisis yang berguna untuk mengevaluasi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi relatif terhadap pertumbuhan di wilayah yang lebih luas. Gambar ini mengelompokkan lapangan usaha berdasarkan kombinasi dari dua rasio: nilai RP_{in} (Rasio Pertumbuhan internal) dan nilai RP_{ip} (Rasio Pertumbuhan proporsional).

Hasil analisis MRP yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 7 lapangan usaha yang memiliki nilai $RP_{ip} > 1$ dan $RP_{in} > 1$. Dengan kata lain, terdapat 7 lapangan usaha yang memiliki keunggulan dari sisi pertumbuhan ekonominya, baik di level Kabupaten Tanah Bumbu maupun level Provinsi Kalimantan Selatan. Lapangan usaha tersebut antara lain adalah Pengadaan Listrik dan Gas (D); Transportasi dan Pergudangan (H); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I); Informasi dan Komunikasi (J); Jasa Keuangan dan Asuransi (K); Jasa Perusahaan (M,N); dan Jasa Lainnya (R, S, T, U). Sektor-sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang kuat secara internal maupun dibandingkan dengan wilayah referensi. Sektor-sektor tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Untuk kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan menonjol di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan namun kurang menonjol di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Konstruksi (F); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G); Real Estate (L); Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Q). Sektor-sektor ini menunjukkan potensi untuk pertumbuhan meskipun saat ini tumbuh lebih lambat dari rata-rata provinsi. Kebijakan yang mendukung dan investasi tambahan mungkin dapat memicu percepatan pertumbuhan di sektor-sektor ini.

Sedangkan lapangan usaha yang pertumbuhannya kurang menonjol di Provinsi Kalimantan Selatan tetapi menonjol di Kabupaten Tanah Bumbu adalah Pertambangan (B). Sektor ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pertumbuhan cepat baik secara internal maupun dibandingkan dengan wilayah referensi. Ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan adalah pendorong utama ekonomi daerah dan harus dipertahankan serta ditingkatkan.

Lapangan usaha yang kurang menonjol karena tingkat pertumbuhannya rendah baik di Provinsi Kalimantan Selatan maupun Kabupaten Tanah Bumbu adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A); Industri Pengolahan (C); Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (E); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (O); Jasa Pendidikan (P). Sektor-sektor ini mengalami pertumbuhan yang lambat secara keseluruhan, baik secara internal maupun dibandingkan dengan wilayah referensi. Strategi peningkatan daya saing dan produktivitas mungkin diperlukan untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor ini.

Analisis MRP memberikan wawasan penting tentang dinamika pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu. Sektor pertambangan muncul sebagai sektor utama dengan pertumbuhan kuat. Sektor-sektor lain menunjukkan variasi dalam kinerja pertumbuhan, dengan beberapa sektor menunjukkan potensi yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Strategi yang berfokus pada peningkatan daya saing, investasi, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dapat membantu mengoptimalkan potensi ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu secara keseluruhan.



KESIMPULAN

BAB VIII

KESIMPULAN

8.1 KETERKAITAN INDIKATOR MAKROEKONOMI (PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN, DAN INFLASI)

Berbagai indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran dan inflasi sangat berperan dalam kestabilan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator kunci dalam menilai kesehatan ekonomi suatu daerah. Kabupaten Tanah Bumbu telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa sektor non-pertambangan seperti Transportasi dan Pergudangan; Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Sektor Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Jasa Lainnya.

Salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat stabilitas perekonomian suatu negara adalah inflasi, karena perubahan dalam indikator ini akan berdampak langsung terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Inflasi tidak selalu berdampak negatif bagi perekonomian, namun juga bisa berdampak positif terutama terhadap iklim investasi. Nilai inflasi di bawah 10 persen justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga seperti ini pada dasarnya merupakan insentif bagi pengusaha untuk meningkatkan kegiatan produksinya.

Angkatan kerja merupakan penduduk yang secara ekonomi mampu bekerja dan berproduktivitas untuk dapat menghasilkan suatu nilai tambah dari berbagai barang dan jasa yang dihasilkannya. Dengan demikian, peningkatan jumlah angkatan kerja berhubungan dengan peningkatan tenaga kerja. Di mana tenaga kerja merupakan suatu input dari proses produksi yang akan memberikan kontribusi yang positif terhadap output agregat suatu wilayah baik dari sudut pandang pengeluaran maupun produksi yang pada akhirnya akan berdampak

terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Akan tetapi, ketidakmampuan menyerap angkatan kerja akan meningkatkan angka pengangguran pada wilayah tersebut. Jika penyerapan angkatan tidak optimal maka dampak dari pertumbuhan ekonomi tidak dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pengangguran tetap menjadi tantangan signifikan di Kabupaten Tanah Bumbu.

8.2. KESIMPULAN

Keberlanjutan pemulihan ekonomi berpengaruh positif pada perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah penghasil batu bara merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Kalimantan Selatan, tetapi beberapa tahun ini sempat mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan ketergantungan perekonomian daerah terhadap sektor pertambangan membuat pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi harga komoditas batu bara dan adanya pandemi COVID-19. Akan tetapi, Kabupaten Tanah Bumbu mulai mengalami peningkatan pada sektor lain, diantaranya Transportasi dan Pergudangan, . Hal ini menjadikan sektor ini sebagai angin segar bagi Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengurangi ketergantungannya terhadap sektor Pertambangan.

Kabupaten Tanah Bumbu tidak memiliki angka inflasi sendiri sehingga didekati dengan angka inflasi dari sister city-nya yaitu Kabupaten Kotabaru. . Angka inflasi Kabupaten Kotabaru menunjukkan terjadi fluktuasi selama kurun waktu 2022-2023. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya tingkat inflasi selama beberapa tahun terakhir ini. Hal ini menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Inflasi yang berperan besar pada Kabupaten Tanah Bumbu berasal dari inflasi dari komponen yang bergejolak (*Volatile Food*). Pengertian dari *Volatile Food* itu sendiri adalah inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen raya, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas

pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk angkatan kerja tidak hanya mengakibatkan peningkatan perekonomian daerah, namun hal tersebut juga akan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Jumlah penduduk angkatan kerja diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan struktur dari penduduk kebanyakan adalah penduduk usia muda sehingga penduduk usia muda tersebut yang akan berpotensi masuk ke dalam angkatan kerja di masa yang akan datang. Selain itu, jumlah angkatan kerja juga dipengaruhi oleh migrasi penduduk yang masuk sehingga dapat dilihat bahwa Kabupaten Tanah Bumbu dengan potensi ekonomi yang cukup tinggi telah menjadi tempat tujuan pendatang dari luar wilayah Tanah Bumbu. Tingkat pengangguran mencapai 6,56 persen, yang merupakan angka tertinggi kedua di Kalimantan Selatan setelah Kota Banjarmasin. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pada kelompok usia muda 15-29 tahun pada Kabupaten Tanah Bumbu, angkanya mencapai hampir tiga kali lipat dari tingkat pengangguran terbuka seluruh kelompok umur yaitu sebesar 15,23 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan lapangan kerja baru dan relevan bagi penduduk muda serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang lebih sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja.

Walaupun lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pertambangan dan Penggalian menjadi dua kontributor terbesar dalam PDRB Kabupaten Tanah Bumbu, tetapi sektor perdagangan besar dan eceran dan lainnya merupakan sektor dengan persentase tenaga kerja paling banyak di Kabupaten Tanah Bumbu. Sayangnya, sektor ini cenderung menawarkan status pekerjaan informal kepada tenaga kerja yang diserapnya. Pada tahun 2023, secara total pekerja informal adalah sebesar 47,71 persen, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi di Provinsi Kalimantan Selatan, angka pekerja informal ini lebih rendah. Pekerja informal di Provinsi Kalimantan Selatan adalah lebih dari seluruh pekerja yaitu sebesar 59,63

persen. Pandemi COVID-19 juga membuat perubahan besar terhadap pola pekerjaan di Kabupaten Tanah Bumbu. Pemberlakuan *Work From Home* (WFH) untuk mengurangi aktivitas berkumpul dan meningkatnya minat masyarakat untuk berbelanja melalui situs daring melalui *e-commerce* dan media sosial membuat masyarakat lebih terbiasa untuk menggunakan internet pada pekerjaannya. Berdasarkan hasil Sakernas 2023, lebih dari 81 persen pekerja yang berusaha sendiri dan 95,26 persen buruh/karyawan/pekerja dibayar menggunakan internet pada pekerjaannya.

Kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren menurun selama dua tahun terakhir. Tahun 2022 mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 0,56 persentase poin dan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,70 persentase poin dibandingkan tahun 2021. Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan, persentase penduduk miskin Tanah Bumbu memang selalu tercatat di atas angka provinsi, akan tetapi selama dua tahun terakhir, angka kemiskinan Kabupaten Tanah Bumbu selalu di bawah angka kemiskinan Kalimantan Selatan. Tren penurunan angka kemiskinan ini memberi indikasi yang baik akan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk sebagai dampak keberhasilan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat. Indeks Keparahana Kemiskinan (P_2) Kabupaten Tanah Bumbu juga mengalami tren yang positif, indeks ini mengalami penurunan. Namun, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) mengalami sedikit kenaikan. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Di sisi lain, rata-rata pengeluaran perkapita penduduk berangsur-angsur mengalami peningkatan selama 2 tahun terakhir. Total kenaikan pengeluaran per kapita pada tahun 2023 dibandingkan dengan pengeluaran per kapita tahun 2022 adalah sekitar 6,87 persen pada pengeluaran makanan. Sebaliknya, pengeluaran nonmakanan mengalami penurunan sebesar 5,8 persen dari 853.432 rupiah pada tahun 2022 menjadi 803.919 rupiah pada tahun 2023.

Pengeluaran pada kelompok makanan yang paling besar dalam pengeluaran untuk kebutuhan makanan jadi, diikuti pengeluaran untuk rokok/tembakau dan padi-padian. Komoditas rokok meskipun dari sisi kesehatan berdampak buruk pada kenyataannya masih tetap menjadi salah satu komoditas paling menonjol dalam pengeluaran makanan penduduk Kabupaten Tanah Bumbu, mencapai 12,05 persen, lebih besar dibandingkan dengan porsi untuk pengeluaran protein dan padi-padian. Hal yang unik yaitu kelompok makanan dan minuman jadi memiliki persentase tertinggi dalam pengeluaran makanan di Kabupaten Tanah Bumbu. Artinya, penduduk lebih menyukai untuk membeli makanan dan minuman di luar dibandingkan memasak di rumah. Poin positif dari hal ini adalah kategori Penyediaan Makan dan Minum (PMM) bisa menjadi salah satu sektor yang dikembangkan di Kabupaten Tanah Bumbu dengan adanya *demand* dari penduduk.

Pada kelompok pengeluaran non makanan, setengah dari total pengeluaran non makanan digunakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga. Pengeluaran tersebut mencakup pengeluaran untuk sewa rumah, biaya listrik/air/telepon, dan pengeluaran telekomunikasi seperti pulsa telepon. Kelompok pengeluaran ini mempunyai porsi sekitar 57 persen dari total pengeluaran non makanan penduduk Kabupaten Tanah Bumbu.

Di dalam sektor pariwisata terdapat berbagai macam interaksi antara antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha yang bersifat multidimensi. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Bumbu mulai dilirik untuk menjadi sektor potensial untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Kondisi geografis Kabupaten Tanah Bumbu cukup unik terdapat dataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir pantai. Jalur perhubungan di wilayah Tanah Bumbu selain dihubungkan lewat jalan darat, melalui jalur sungai, laut dan udara.

Pada tahun 2023, kontribusi aktivitas kategori penyediaan akomodasi dan makan minum di Tanah Bumbu sekitar 0,73 persen (setara dengan 247,26 miliar rupiah) terhadap total kegiatan perekonomian. Besaran tersebut meningkat dari tahun 2022 yang hanya mencapai 221,72 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan

sektor perhotelan di Tanah Bumbu mengalami pertumbuhan yang positif dalam meningkatkan perekonomian daerah.

8.3. REKOMENDASI KEBIJAKAN

a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu kabupaten yang perekonomiannya tergantung pada SDA khususnya pertambangan batubara diharapkan dapat mulai mengurangi ketergantungan terhadap sektor ini dan mulai mengembangkan sektor lain. Beberapa sektor dapat dijadikan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor-sektor yang berpotensi tersebut antara lain Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Sektor Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi. Selain sektor-sektor di atas, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (PMM) serta Jasa Lainnya juga berpotensi untuk menjadi sektor potensi sebagai penunjang dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Tanah Bumbu juga mempunyai beberapa lokasi wisata yang dapat dikembangkan seperti di daerah Kusan Hilir dan Angsana yang terkenal dengan area pantainya. Pemerintah Daerah dapat melakukan promosi dan pembinaan masyarakat lokal sekitar pantai untuk meningkatkan nilai jual kawasan pariwisata tersebut. Pemanfaatan SDA yang terbarukan seperti komoditas karet dan kelapa sawit yang merupakan komoditas potensial Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengembangkan potensi lapangan usaha Industri Pengolahan. Kabupaten Tanah Bumbu telah memiliki beberapa industri pengolahan karet mentah menjadi karet setengah jadi dan pembangunan pabrik biodiesel baru untuk meningkatkan pemanfaatan kelapa sawit. Proses hilirisasi produk yaitu pemanfaatan mentah menjadi produk jadi atau barang akhir tentu perlu dikembangkan agar hasil produksi dapat bernilai lebih tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan mendukung kegiatan hilirisasi produk oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak pada industri pengolahan dengan cara mendorong lebih banyak investasi, membangun iklim investasi yang sehat dan

memperkuat peran industri antara sebagai penghasil bahan baku untuk industri hilir.

Salah satu upaya untuk mendorong atmosfer industri di wilayah Tanah Bumbu menjadi lebih baik adalah dengan dukungan infrastuktur yang memadai seperti kondisi jalan sebagai arus keluar masuknya produk industri karena infrastruktur yang baik dapat mendorong efisiensi produksi dari aktivitas industri local Tanah Bumbu seperti industri makanan olahan hasil perikanan laut, industri CPO, dan industri kain tenun. Kondisi lain yang perlu diperhatikan adalah memastikan konektivitas antar wilayah, antar kecamatan dalam wilayah Tanah Bumbu maupun dengan kabupaten/kota lainnya. Infrastruktur yang baik akan mempengaruhi daya tarik investasi di sebuah daerah. Pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk menekan angka inflasi, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan melakukan berbagai langkah strategis yang dapat difokuskan pada upaya mengendalikan inflasi *volatile food* maksimal lima persen. Usaha pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam menjaga inflasi kelompok makanan khususnya *volatile food* (VF) sejalan dengan program pemerintah pusat, karena komposisi pengeluaran masyarakat pada bahan makanan lebih besar dibanding non makanan.

b. Mengurangi pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu masalah struktural klasik yang dihadapi oleh pemerintah. Ketidakmampuan menciptakan lapangan kerja yang bisa mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja dapat berakibat pada meningkatnya pengangguran terutama di kelompok penduduk muda usia 15-29 tahun. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki tingkat pengangguran tertinggi kedua setelah Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan yaitu sebesar 6,56 persen dan tingkat pengangguran terbuka pada kelompok penduduk usia muda (15-29 tahun) mencapai hampir 16 persen di Kabupaten Tanah Bumbu.

Selanjutnya, penciptaan lapangan kerja pada sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dan Transportasi dan Pergudangan bisa menjadi salah satu alternative kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Tanah Bumbu karena sektor ini merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua dan ketiga di Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu, mengembangkan lapangan usaha Pengadaan Akomodasi, Makan dan Minum, dan Pariwisata juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi pengangguran di daerah ini.

Data menunjukkan bahwa 65,66 persen pengangguran di Tanah Bumbu memiliki pendidikan SMA ke atas. Angka ini cukup mengkhawatirkan di mana tingkat pendidikan yang cukup tinggi justru berada pada kondisi menganggur. Hal ini dapat secara implisit menunjukkan kualitas pendidikan di suatu daerah. Sistem pendidikan belum dapat mengakomodasi permintaan pasar tenaga kerja terbukti dengan tingginya tingkat pengangguran pada tingkat pendidikan SMA ke atas. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan dapat mengakomodir celah antara permintaan pasar tenaga kerja dan sistem pendidikan, melakukan diskusi dengan pelaku usaha mengenai kebutuhan tenaga kerja, dan membuat program yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi para pencari kerja.

Sebagai tambahan, pemerintah daerah juga dapat memberikan dukungan kepada UMKM dengan memberikan modal dengan bunga ringan sehingga UMKM dapat mengembangkan usahanya dan pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki beberapa industri yang termasuk kearifan lokal yaitu industri makanan olahan hasil perikanan laut seperti amplang, bakso ikan, kerupuk, dan lain-lain, serta industri kain tenun khas Pagatan. Industri ini menjadi ciri khas dengan memanfaatkan kreativitas, keterampilan, serta pelestarian tradisi budaya dari masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.

c. Upaya pengentasan kemiskinan

Salah satu upaya yang cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan adalah pemberdayaan masyarakat, seperti pemberian pelatihan kewirausahaan, pelatihan dan pembinaan petani, sosialisasi dan pelatihan Kader Kesehatan

Masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu membentuk individu atau kelompok untuk mengetahui peluang, cara menghadapi situasi yang ada, dan bisa menentukan jalan untuk kehidupan di masa depannya. Pemberdayaan masyarakat memang tidak bisa langsung memberantas kemiskinan dan tidak secepat bantuan tunai langsung yang dapat signifikan dalam waktu singkat meningkatkan daya beli masyarakat khususnya bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, tetapi pemberdayaan masyarakat dapat memberikan efek jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini karena pemberdayaan masyarakat dapat membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya demi mewujudkan masyarakat mandiri dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Salah satu strategi untuk mengentaskan kemiskinan yaitu dengan mengadakan pelatihan yang sesuai dengan lapangan kerja dominan di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan Besar, Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Salah satu wujud nyata yang dapat diadopsi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu antara lain dengan mengadakan pelatihan dan pembinaan petani dan nelayan karena sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan tiga besar PDRB di Tanah Bumbu. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dapat melakukan pembinaan dan pelatihan yang berhubungan dengan industri pengolahan di Tanah Bumbu seperti pelatihan pembuatan kain tenun, pembinaan pengolahan ikan kering, dan pembinaan industri amplang, termasuk membuat kemasan yang bagus dan menarik perhatian. Selain itu, beberapa kebijakan terkait pengurangan beban penduduk/masyarakat seperti BPJS, BOS, KIP, PKH, dll agar ditingkatkan pelayanannya dan diberikan kemudahan dalam pengurusannya. Beberapa daerah di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki jarak yang lumayan jauh dan kondisi geografis yang sulit sehingga masyarakat agak kesulitan dalam hal pengurusan pelayanan social gratis yang diberikan pemerintah. Kebanyakan dari penduduk/masyarakat melakukan pengurusan administrasi bantuan-bantuan ini secara kolektif melalui RT setempat tetapi dalam segi waktu hal ini menjadi

kurang efektif atau mereka melakukan pengurusan sendiri tetapi dengan biaya yang tidak murah untuk transportasi dan akomodasi. Disarankan agar pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pelayanan jemput bola sehingga masyarakat yang jauh dari ibukota kabupaten dapat mengurus administrasi program-program ini menjadi lebih mudah.

Berdasarkan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, Tanah Bumbu masih memiliki angka kemiskinan ekstrim yang salah satu penyebabnya adalah pernikahan usia dini. Berdasarkan buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022/2023, persentase penduduk yang menikah di bawah umur 16 tahun berkisar 21 persen. Pernikahan di bawah umur memiliki berbagai macam implikasi terhadap kualitas kehidupan seseorang. Pernikahan dini dapat mengakibatkan masalah kesehatan karena reproduksi yang belum siap, terputusnya pendidikan terutama bagi perempuan, dan meningkatkan kejadian stunting di kalangan balita. Minimnya pengetahuan mengenai pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi di Indonesia menyebabkan pelaku pernikahan di bawah umur mengalami berbagai macam masalah kesehatan produksi. Selain itu, terputusnya pendidikan bisa meningkatkan kemungkinan seseorang masuk ke dalam kelompok miskin dikarenakan tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Pernikahan di bawah umur juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya kejadian stunting karena kurangnya edukasi dan informasi yang dimiliki oleh ibu hamil di bawah umur mengenai pentingnya gizi di saat kehamilan dan lima tahun pertama tumbuh kembang anak. Salah satu solusi permasalahan pernikahan usia dini ini adalah dengan memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan anak khususnya perempuan. Pendidikan memastikan anak perempuan memperoleh keterampilan dan pengetahuan untuk mencari pekerjaan dan sarana untuk menghidupi keluarga mereka. Hal ini dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan mencegah pernikahan anak yang terjadi sebagai akibat dari kemiskinan ekstrim dan/atau keuntungan finansial.

d. Meningkatkan IPM

SDM yang berkualitas adalah salah satu modal pembangunan suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kualitas SDM pada suatu wilayah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Tanah Bumbu berada pada kategori tinggi dengan nilai 70,71 dan 71,00 berturut pada tahun 2022 dan 2023. Pembangunan manusia Kabupaten Tanah Bumbu berada pada peringkat 4 dari 13 Kabupaten/Kota selama beberapa tahun terakhir ini.

Dilihat lebih jauh melalui komponen pembentuk IPM Kabupaten Tanah Bumbu, terdapat tiga komponen pembentuk IPM yang masih di bawah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah, (HLS) dan pengeluaran per kapita penduduk yang disesuaikan (PP). RLS dan HLS dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan biaya transportasi, keterbatasan dana pendidikan, dan faktor sosial budaya seperti pernikahan anak. Untuk meningkatkan RLS dan HLS yaitu melalui pemerataan dan kemudahan akses layanan pendidikan dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi anak dari rumah tangga miskin untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang diinginkan. Selain itu, penyuluhan pentingnya pendidikan untuk mendapatkan hidup layak khususnya bagi masyarakat berpendapatan di bawah garis kemiskinan.

Secara khusus, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selaku pengambil kebijakan di daerah diharapkan mengadopsi kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik potensi daerah itu sendiri, tentunya tuntutan pengenalan potensi daerah dapat dijadikan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pemerintah tentunya yang berkualitas, yaitu salah satu hasilnya adalah berkurangnya kesenjangan pendapatan masyarakat. Muara dari pertumbuhan berkualitas tentunya adalah kesejahteraan masyarakat yang cukup merata. Namun disadari atau tidak, proses ekonomi merupakan proses dalam masyarakat yang rasional dan bisa jadi lebih menguntungkan pemilik modal. Untuk mencapai empat poin penting tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu hanya perlu memastikan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023-2026 dapat berjalan dengan baik dan dengan kecepatan yang tinggi. Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023-2026 secara jelas dapat menjawab empat poin

penting yang menjadi masalah peningkatan indikator makro ekonomi yang pada intinya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Melalui implementasi kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan Kabupaten Tanah Bumbu dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, mengurangi pengangguran, mengendalikan inflasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.